LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

JL. KOLONEL TB. SUWANDI LINGKAR SELATAN CADIKA
KEL. LONTAR BARU SERANG-BANTEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kuasaNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparasi dan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan, serta bentuk pertanggungjawaban sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Serang di Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi, B idang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejateran Keluarga, BidangPemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Harapan kami kedepan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang tahun 2021 ini dapat dijadikan bahan informasi, referensi dan evaluasi bagi pengelola program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam rangka peningkatan kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban publik atas pelaksanaa tugas dan pertanggung jawaban sebagai aparatur pemerintah.

Demikian kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang sudah terlib at secara aktif dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 ini, serta semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi pihak -pihak yang berkepenti ngan, sehingga dijadikan bahan informasi, referensi dan evaluasi, maupun sebagai pemicu peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang di tahun mendatang.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atas penyelenggaraan kinerja tahun 2021. Namun pertanggungjaw aban ini tidak semata -mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategis, yang dituangkan dalam bentuk t ahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata -mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelu arga Berencana Kota Serang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2018-2023.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-

pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Serang. apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyeba bnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang periode tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberda yaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1) Dari 4 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode tahun 2018-2023, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2021 telah dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelua rga Berencana dan para pejabat dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait
2) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan d alam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2021 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**i**
IKHTISAR EKSEKUTIF.....**ii**
DAFTAR ISI.....**iv**
DAFTAR TABEL.....**v**
DAFTAR GAMBAR.....**vii**
BAB I PENDAHULUAN..... **I.1**
1.1 Latar Belakang..... I.1
1.2 Maksud dan Tujuan..... I.2
1.3 Dasar Hukum..... I.2
1.4 Sistematika Penulisan..... I.4
1.5 Gambaran Umum DP3AKB Kota Serang..... I.5
a) Kondisi Organisasi..... I.5
b) Sumber Daya Manusia..... I.7
c) Isu Strategis..... I.9
d) Identifikasi Permasalahan..... I.11
BAB II PERENCANAAN KINERJA..... **II.1**
A. Rencana Strategis..... II.1
B. Indikator Kinerja Utama OPD..... II.7
C. Perjanjian Kinerja OPD..... II.8
D. Rencana Anggaran..... II.9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... **III.1**
A. Capaian Indikator Kinerja Utama DP3AKB..... III.1
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran..... III.4
C. Akuntabilitas Keuangan..... III.14
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2020
A. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Reviu Lkjip 2020..... IV.1
BAB IV PENUTUP..... **V.1**
A. Kesimpulan..... V.1
B. Saran..... V.2
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data pegawai berdasarkan jenis kelamin
Tabel 1.2 Data Jumlah kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan terakhir
Tabel 1.3 Data Jumlah kepegawaian PNS menurut tingkat kepangkatan, golongan dan ruang
Tabel 1.4 Data Jumlah kepegawaian PNS berdasarkan tingkat keikutsertaan diklat aparatur
Tabel 1.5 Isu Strategis dan Aspek Terkait
Tabel 1.6 Identifikas Permasalahan
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tabel 2.2 Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021
Tabel 2.4 Rencana anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021
Tabel 2.5 Rencana Aksi DP3AKB Tahun 2021
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 Dengan Tahun 2019 & Tahun 2020
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 Dengan Target Renstra DP3AKB Tahun 2018-2023

Tabel 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi Realisasi Capaian IKU DP3AKB Kota Serang Tahun 2021

Tabel 3.5 Komposisi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021

Tabel 3.6 Realisasi Serapan Anggaran DP3AKB Kota Serang Tahun 2021 Berdasarkan Program dan Kegiatan

Tabel 3.7 Kegiatan Dengan Realisasi Serapan Anggaran Dibawah 90% Dan Penyebab / Permasalahannya

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Grafik Trand Realisasi Capaian Rasio KDRT Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Gambar 3.2 Grafik Trand Realisasi Capaian Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Gambar 3.3 Grafik Trand Realisasi Capaian Keberhasilan Pemeberdayaan Perempuan Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Gambar 3.4 Grafik Trand Realisasi Capaian Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Gambar 3.5 Grafik Trand Realisasi Capaian Persentase Kelompok Masyarakat Berprestasi Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Gambar 3.6 Grafik Trand Realisasi Capaian RJAK /TFR Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Gambar 3.7 Grafik Trand Realisasi Capaian Ni8lai LKjIP Tahun 2019 s/d Tahun 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tu gas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan atas pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang No 7 Tahun 2016, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, merupakan sebagai le mbaga pembantu teknis Walikota yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota Serang mempunyai kewajiban melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberd ayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dipimpin oleh Kepala Dinas menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota Serang sebagai bahan penyu sunan laporan kinerja Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah adalah sebagai sarana bagi Perangkat Daerah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang untuk dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap stakeholder;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah guna membantu evaluasi kinerja Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemrintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 T ahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang No.7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Walikota Serang No. 81 Tahun 2021Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2021
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi gambaran umum pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana seb agai Instansi Pemerintah yang memberikan gambaran kinerja kepada masyarakat yang menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang, sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) (tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta program kegiatan), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Anggaran

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Th 2021, Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Th 2021, Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pearangkat Daerah Th 2019 – 2021

BAB IV : TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2020

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1.5 GAMBARAN PELAYANAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB)

a) Kondisi Organisasi

Sejalan dengan upaya mendukung visi dan misi RPJMD Walikota dan Wakil Walikota Serang. *"Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Program Keluarga Berencana* di Kota Serang dengan harus menunjukan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga t ercapai kondisi yang diharapkan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempun, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang yaitu : Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan ker jasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana Kota Serang. Upaya -upaya yang dilakukan agar pelaksanaan lebih baik di tahun mendatang adalah dalam bentuk :

1. Melaksanakan pelayanan KB secara continue dan menyeluruh melalui safari KB di setiap Kecamatan se-Kota Serang
2. Melaksanakan penyuluhan dan KIE reprodukasi pada remaja dan PUS.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempun, Perlindungan Anak dan Keluarg a Berencana Kota Serang sesuai ketentuan Peraturan Walikota Serang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempun, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

STRUKTUR ORGANISASI DP3AKB KOTA SERANG

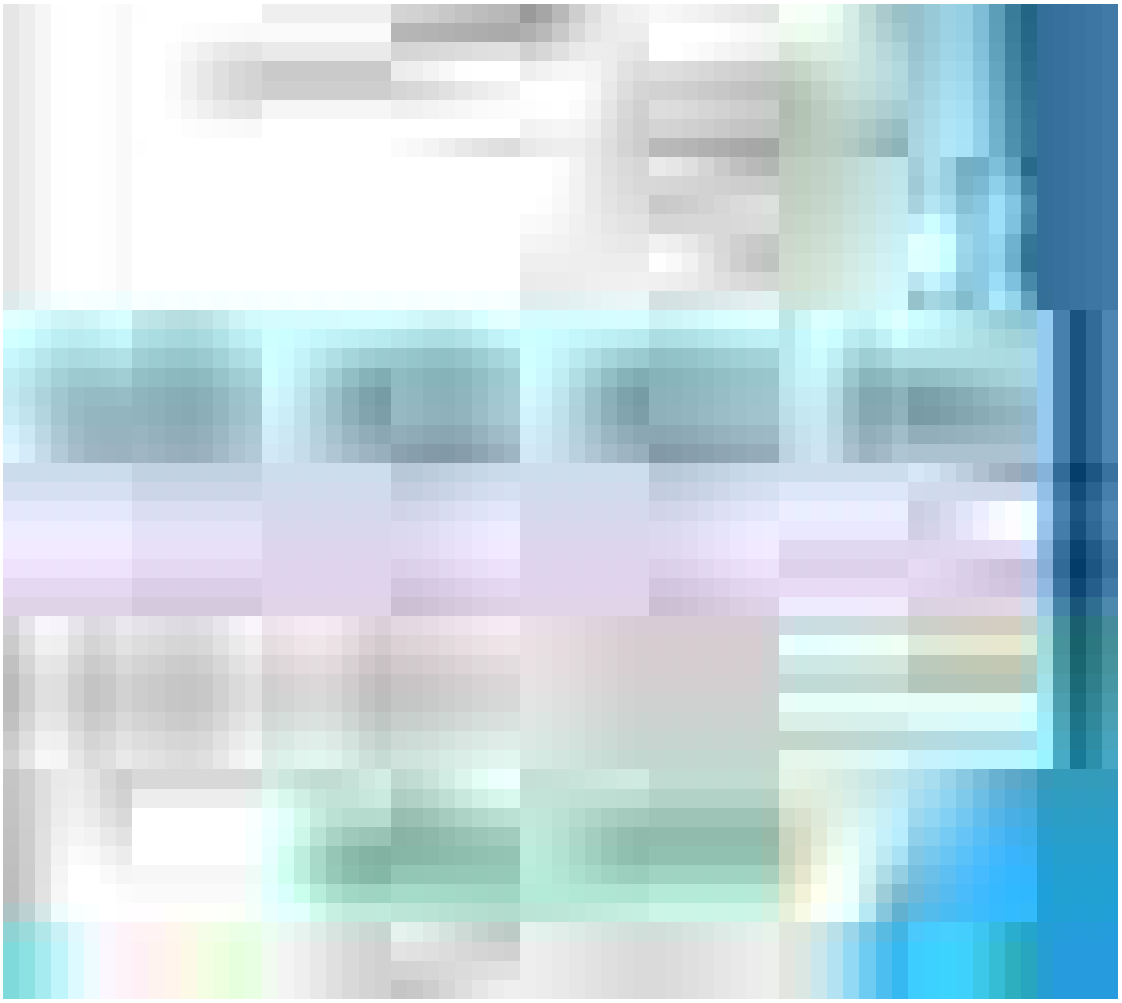

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DP3AKB Kota Serang

a) Kepala Dinas;
b) Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi membawahkan :
    1. Seksi Advokasi Dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
    2. Seksi Penggerakan Dan Pendayagunaan Penyuluh KB (PlKB) Dan Kader KB;
    3. Seksi Pengendalian Penduduk, Data Dan Informasi Keluarga.

d) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
   1. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
   2. Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan KB;
   3. Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.

e) Bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan:
   1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
   2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
   3. Seksi Penguatan Lembaga Layanan dan Kualitas Keluarga.

f) Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak membawahkan:
   1. Seksi Perlindungan Perempuan ;
   2. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
   3. Seksi Khusus Anak.

g) Unit Pelaksana Teknis.

h) Kelompok jabatan fungsional.

b) Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjut nya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisa si karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang memiliki jumlah pegawai sebagaimana berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6	20	26
2.	Non PNS/Tenaga Harian Lepas	19	16	35
JUMLAH		**25**	**36**	**61**

Sumber : DP3AKB Kota Serang Tahun 2021

Tabel 1.2
Data Kepegawaian PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		%
		L	P	
1.	SD / Sederajat	0	0	0
2.	SLTP / Sederajat	0	0	0
3.	SLTA / Sederajat	0	0	0
4.	SLTA Kejuruan	1	0	3,84
5.	Diploma I	0	0	0
6.	Diploma II	0	0	0
7.	Diploma III	0	0	0
8.	Diploma IV	0	0	0
9.	Strata I	2	9	26,92
10.	Strata II	4	13	69,23
11.	Strata III	0	0	0
TOTAL		**7**	**22**	**100**

Sumber : DP3AKB Kota Serang Tahun 2021

Tabel 1.3

Data Kepegawaian PNS Menurut tingkat Kepangkatan,

Golongan dan Ruang

NO	KEPANGKATAN	GOL	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	11
4.	Penata Tingkat I	III/d	7
5.	Penata	III/c	3
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
7.	Penata Muda	III/a	2
8.	Pengatur Tk.I,II/d	II/d	0
9.	Pengatur	II/c	0
10.	Pengatur Muda tingkat I	II/b	1
11.	Pengatur Muda	II/a	0
12.	Juru Tk.I/d	I/c	0
JUMLAH			**29**

Sumber : DP3AKB Kota Serang Tahun 2021

Tabel 1.4

Data Kepegawaian PNS Berdasarkan

Tingkat Keikutsertaan Diklat Aparatur

NO	DIKLAT	JUMLAH
1	Diklatpim II	0
2	Diklatpim III/Sederajat	4
3	Diklatpim IV/Sederajat	13
JUMLAH		**17**

Sumber : DP3AKB Kota Serang Tahun 2020

c) Isu Strategis Dan Permasalahan

1) Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dimasa datang. Identifikasi isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD. Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
- Memastikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
- Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi
- Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun aspek terkait dengan isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini

Tabel 1.5
ISU STRATEGIS DAN ASPEK TERKAIT

NO	ISU STRATEGIS	ASPEK TERKAIT
1	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Inventarisasi Potensi Perempuan
		Keberdayaan Perempuan
		Partisipasi dalam Pembangunan
2	Memastikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Pemenuhan Sarana Prasarana Publik
		Pembinaan Dunia usaha dan Masyarakat
		Pemenuhan Hak Anak
		Advokasi Perlindungan Perempuan
3	Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Data Mikro Keluarga
		Pemenuhan Tenaga Penggerak Keluarga Berencana
		Promosi KIE
4	Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Implementasi Layanan KB
		Pembinaan Kesertaan KB
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2) Identifikasi Permasalahan

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dikelompokkan masalah pokok dengan uraian masalah dan akar masalah untuk mendapatkan daftar permasalahan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	**MASIH RENDAHNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN**	Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Realisasi pemberdayaan perempuan dalam politik dari target pertumbuhan
			Realisasi pemberdayaan perempuan dalam perekonomian dari target pertumbuhan
			Realisasi pemberdayaan masyarakat dari target pertumbuhan ekonomi
			Realisasi pengembangan LPM dari LPM yang dibina
		Belum Optimalnya Perlindungan Perempuan Dan Pemenuhan Hak Anak	Pemenuhan Hak anak dalam ruang publik dari data ruang publik
			Realisasi perlindungan perempuan dalam ruang publik dari data ruang publik
			Realisasi sistem informasi gender dan anak dari rencana pengembangan

2	**MASIH RENDAHNYA KUALITAS HIDUP KELUARGA**	Belum Optimalnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Realisasi promosi KIE terhadap pasangan usia subur dari target pertumbuhan
			Realisasi pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB dari kebutuhan
		Belum Optimalnya Pelayanan Keluarga Berencana	Realisasi Kesertaan KB dari jumlah pasangan usia subur
			Realisasi pelayanan KB dari kesertaan KB
		Masih Rendahnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Realisasi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga terhadap keluarga aktif
			Realisasi data keluarga yang akurat dari jumlah keluarga

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Serang, tujuan, sasaran, program dan kegiat an. Adapun visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Serang, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencna Kota Serang sebagai berikut :

Adapun Visi dan Misi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023

"Terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya"

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten ke depan menjadi kota peradaban yang ditandai keberdayaan sumberdaya manusia, pemerintahan, dan pembangunan lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politi k, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Misi :

1. Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif

berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, m elalui peningkatan daya saing daerah.

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menghadirkan kepemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga kota serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidungan Anak d an Keluarga Berencana adalah Misi ke-1 (satu) dan Misi ke 3 (tiga). Misi ke-1 yaitu Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-1 ditetapkan tujuan: **"**Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya**"** dan sasaran : **"**Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk**"** *dan Misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Perekonomian daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yng Berdaya Saing. Dalam rngka mendukung pencapaian Misi ke -3 (tiga) ditetapkan tujuan :* **"**Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah **"** *dan sasaran :* **"**Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat**"**

Tujuan dan sasaran Perangkat daerah merupakan pen jabaran bagaiman pencapaian Tujuan dan Sasaran terhadap Visi dan Misi Walikota Serang Tahun 2018 - 2023. Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga Anak dan Keluarga Berencana adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk, dengan sasraran adalah meningkatnya pasangan usia subur yang mengikuti program KB

Secara lengkap adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga Anak dan Keluarga Berencana tertuang dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana Kota Serang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR RENSTRA
				Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan masyarakat	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perekonomian dan politik	Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	Persen	30	50	100	100	100	100
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina	Persen	30	50	100	100	100	100
		Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	Persen	30	50	69	70	71	71
Meningkatnya pelayanan perlindungn terhadap perempuan dan anak	Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan hak anak	Rasio KDRT	Rasio	80	83	0.0046	0.0045	0.0044	0.0044
		Persentase Perlindungan Perempuan dan Hak Anak	Persen	60	80	100	100	100	100
Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Terlaksananya kependudukan dan Keluarga Berencana	Tingkat kelahiran Rata-Rata/RJAK	Poin	2,47	2,34	2,34	2,33	2,32	2,32
Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	Poin	85	65.66	66	67	67.50	67.50

Strategi adalah langkah -langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kebijakan diambil sebagai a rah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program -program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2,2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang

MISI I	MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN				
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Mempersiapkan data dan rencana Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Menguatkan proses Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Mengoptimalkan Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Pencapaian kinerja Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Pencapaian kinerja Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi
	Mempersiapkan data dan rencana Pembentukan peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan	Menguatkan proses Pembentukan peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Mengoptimalkan Pembentukan peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pencapaian kinerja peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pencapaian kinerja peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

MISI I	MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN				
STRATEGI			ARAH KEBIJAKAN		
	2019	2020	2021	2022	2023
	Keluarga				
	Mempersiapkan data dan rencana Pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Menguatkan Proses pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Pencapaian kinerja pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Pencapaian kinerja pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

MISI 3	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING				
STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk mencapai Kualitas Hidup Perempuan	Mempersiapkan data dan rencana Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Menguatkan proses Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Mengoptimalkan Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Pencapaian kinerja Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Pencapaian kinerja Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra dan Renja telah ditetapkan 11 (sebelas) program dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan sebagaimana berikut :

A. Program

Program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana Kota Serang pada tahun 2021 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
3. Program Perlindungan Perempuan;
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
6. Program Pemenuhan Hak Anak;
7. Program Perlindungan Khusus Anak;
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
9. Program Pengendalian Penduduk;
10. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
11. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Pencegahan Kekerasan terhadap PerempuanLingkup Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

11. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota
12. Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15. Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan bagi Anak yang M,emerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
17. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
18. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
19. Pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
20. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
21. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
22. Pemberdayaan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
23. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga

B. Indikator Kinerja Utama OPD

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dilakukan de ngan membandingkan antara rencana kerja (*perfomence plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*perfomence result*) yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Hasil pengukuran ini bermanfaat unt uk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perekonomian dan politik	Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	100%
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina	100%
		Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	69%
2	Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan hak anak	Rasio KDRT	0.0046
		Persentase Perlindungan Perempuan dan Hak Anak	100%
3	Terlaksananya kependudukan dan Keluarga Berencana	Tingkat kelahiran Rata-Rata/RJAK	2,34
4	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	66

C. Perjanjian Kinerja OPD

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amana. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 merupakan gambaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2018-2023, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja serta alokasi anggaran. Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanj ian Kinerja tersebut didukung oleh 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang terangkum dalam 11 (sebelas) program.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota serang yang disepakati bersama dengan Walikota Serang sebagaimana terlampir.

D. Rencana Anggaran

Struktur anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 terdiri dari Belanja Pegawai dengan pagu anggaran Rp.4.953.752.936,- , Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran Rp.8.687.058.208,- serta Belanja Modal dengan pagu anggaran Rp.312.734.561, -, dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
	BELANJA	**13.953.545.705,00**
	BELANJA PEGAWAI	**4.953.752.936,00**
	BELANJA BARANG DAN JASA	**8.687.058.208,00**
	BELANJA MODAL	**312.734.561,00**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**6.371.088.274,00**
.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.150.000,00
2	Administrsi Keuangan Perangkat Daerah	4.959.035.936,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	31.200.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.412.272,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.005.561,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.740.000,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.544.505,00
II	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**306.763.089,00**
8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	306.763.089,00
III	**Program Perlindungan Perempuan**	**222.930.000,00**
9	Pencegahan Kekerasan terhadap PerempuanLingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.090.000,00
10	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	167.840.000,00
IV	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**105.339.500,00**
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	105.339.500,00
V	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**103.450.000,00**
12	Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	103.450.000,00

	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
VI	**Program Pemenuhan Hak Anak**	**146.699.601,00**
13	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	146.699.601,00
VII	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**364.964.500,00**
14	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303.015.000,00
15	Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan bagi Anak yang M,emerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/	61.949.500,00
VIII	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**1.383.617.192,00**
16	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum	1.383.617.192,00
IX	**Program Pengendalian Penduduk**	95.195.239,00
17	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	22.730.239,00
18	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72.465.000,00
X	**Program Keluarga Berencana**	3.811.022.310,00
19	Pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	674.408.250,00
20	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	482.797.500,00
21	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.161.472.560,00
22	Pemberdayaan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	492.344.000,00
XI	**Program Pemberdayaan Dan Peningk Keluarga Sejahtera**	**1.042.476.000,00**
23	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga	1.042.476.000,00

E. Rencana Aksi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Rencana Aksi pelaksanaan akuntabilitas kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2. 5 berikut ini (Tabel 2.5 terlampir).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungja wabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk setiap sa saran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja input, output, dan outcome. Indikator kinerja input adalah sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja output adalah keluaran nyata dan langsung dapat dilihat se telah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja outcome adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Sesuai petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Insta nsi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang menetapkan Indikator kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

a. Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan
b. Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat terbina
c. Persentase kelompok masyarakat yang berprestasi
d. Rasio KDRT
e. Persentase Perlindungan Perempuan dan Hak Anak

f. Tingkat kelahiran Rata-Rata/RJAK

g. Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN	KET
1	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perekonomian dan politik	Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina	100%	100%	100%	
		Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	69%	65%	94,20%	
2	Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan hak anak	Rasio KDRT	0.0046	0,0044	95,65%	
		Persentase Perlindungan Perempuan dan Hak Anak	100%	100%	100%	
3	Terlaksananya kependudukan dan Keluarga Berencana	Tingkat kelahiran Rata-Rata/RJAK	2,34	1,5	64.10%	
4	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	66			Nilai Capaian LKjIP 2021 belum ada

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dianalisis bahwa realisasi capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagian sudah mencapai target bahkan melebihi target dan sebagian lagi masih dibawah target yang sudah di tetapkan. Realisasi capaian IKU yang sudah mencapai target adalah : Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan (100%), Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina (100%), dan Persentase Perlindungan Perempuan dan Hak Anak (100%). Sedangkan realisasi capaian IKU yang masih dibawah target yang ditetapkan anatara lain : Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi (65%), Rasio KDRT (0,0044), Tingkat kelahiran

Rata-Rata/RJAK (1,5). Sedangkan capaian Nilai LKjIP belum bisa diukur karena nilai LKjIP 2021 diperoleh setelah laporan direviu oleh Inspektorat Kota Serang. Realisasi capaian IKU Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan sudah mencapai target disebabka n karena semua organisasi perempuan sudah terbina dan ikut berpartisipasi dalam program pemberdayaan perempuan baik melalui kegiatan P2WKSS, kegiatan PKK, Kegiatan Posyandu, maupun kegiatan UP2K. Sementara itu untuk realisasi capaian IKU yang masih dibawah target hal tersebut disebabkan karena pencapaian target dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama situasi dan kondisi saat ini yang masih dalam Pandemi Covid 19 dan karena adanya penurunan tingkat kelahiran (capaian realisasi RJAK). Realisasi capaian R JAK 1,5 (dibawah target) menunjukan bahwa tingkat kelahiran yang terjadi pada tahun 2021 menurun, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengendalian penduduk di Kota Serang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Adapun rincian kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Capaian Keberhasilan pemberdayaan perempuan. Untuk indikator kegiatannya, yaitu : Pembinaan kader posyandu, pembinaan TP PKK di Kecamatan dan Kelurahan, pembinaan DWP, GOW, terlaksananya program OPD di loka si P2WKSS, terlaksananya kegiatan HKG PKK
2. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina. Untuk indikator kegiatannya ,yaitu : Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat, Bintek lembaga pemberdayaan masyarakat, Monitoring dan evaluasi lembaga pemberdayaan masyarakat
3. Rasio KDRT. Untuk indikator rasio KDRT, kegiatanya yaitu: Pembentukan PATBM, PUSPAGA, P2TP2A, dan pemenuhan perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh UPTD PPA
4. Persentase perlindungan perempuan dan anak. Untuk indikator kegiatanny a yaitu : Pembentukan PATBM, PUSPAGA, P2TP2A, dan pemenuhan perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh UPTD PPA
5. Tingkat Kelahiran Rata -Rata (RJAK). Untuk indikator kegiatannya, yaitu : Pelayanan KB, Advokasi dan Pelayanan KB, Pembentukan kelomp ok PIK-R, Pelaksanaan penyuluhan di Kampung KB.
6. Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100) merupakan nilai keseluruhan kegiatan yang telah di review oleh inspektorat Kota Serang.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

a) Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan hasil realisasi capaian IKU tahun 2021 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020. Gambaran perbandingan realisasi capaian IKU tahun 2021 dengan realisasi capaian IKU tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlingdungan Anak dan Keluarga Brencana Kota Serang Tahun 2021 dengan Tahun 2019 dan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN			KET
			2019	2020	2021	
1	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perekonomian dan politik	Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	Hasil realisasi capain sama
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina	100%	100%	100%	Hasil realisasi capain sama
		Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	0%	0%	65%	Hasil realisasi capain meningkat
2	Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan hak anak	Rasio KDRT	0,056	0,0047	0,0044	Hasil Realisasi Capaian Menurun kemudian cenderung meningkat
		Persentase Perlindungan Perempuan dan Hak Anak	100%	100%	100%	Hasil realisasi capain sama
3	Terlaksananya kependudukan dan Keluarga Berencana	Tingkat kelahiran Rata-Rata/RJAK	2.34	2.37	1.50	Hasil Realisasi Capaian Menurun
4	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	66,79	65.62		Hasil Realisasi Capaian Menurun

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa capaian realisasi yang mengalami penurunan adalah Tingkat Kelahiran Rata-rata/RJAK, dan nilai evaluasi LKjIP. Sedangkan untuk Rasio KDRT mengalami penurunan, namun di tahun 2021 sedikit cenderung meningkat.

Sementara itu trand kenaikan dan penurunan realisasi capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021 dengan tahun 2019 & 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 3.1
Grafik Trand Realisasi Rasio KDRT Tahun 2019 s/d Tahun 2021

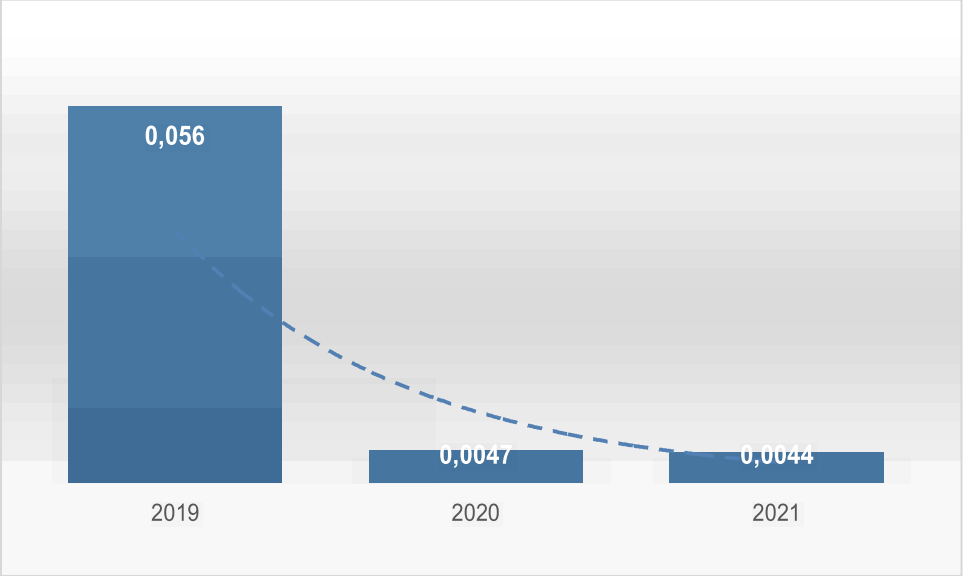

Dari gambar 3.1 diatas terlihat bahwa trand capaian realisasi Rasio KDRT mengalami penurunan. Hal ini juga merupakan salah satu indikator kalau penanganan kasus KDRT dan perlindungan perempuan memang benar-benar tertangani dengan baik dan sosialisasi pemahaman terkait dengan dampak buruk dari kekerasan dalam rumah tangga tersampaikan dengan baik. Mudah2an kondidi seperti ini tetap bisa konsisten pada tahun-tahun mendatang.

Adapun adanya kecenderungan sedikit meningkat di tahun 2021 disebabkan karena ada sedikit peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi semua kasus tersebut berhasil ditangani dan dilayani dengan baik, sebagai hasil sinergitas kinerja antara UPTD PPA, P2TP2A, jajaran Kepolisian dan lintas sektor terkait lainnya.

Sementara itu untuk realisasi capaian perlindungan perempuan dan anak dari tahun 2019 s/d tahun 2021 trand nya sama tidak ada penurunan, tetapi tetap konsisten diangka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak memb erikan dampak yang cukup signifikan. Adapun trand realisasinya dapat diketahui pada gambar 3.2 sebagai berikut :

Gambar 3.2
Grafik Trand Realisasi Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Gambar 3.3
Grafik Trand Realisasi Capaian Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Gambar 3.4
Grafik Trand Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina Tahun 2019 s/d tahun 2021

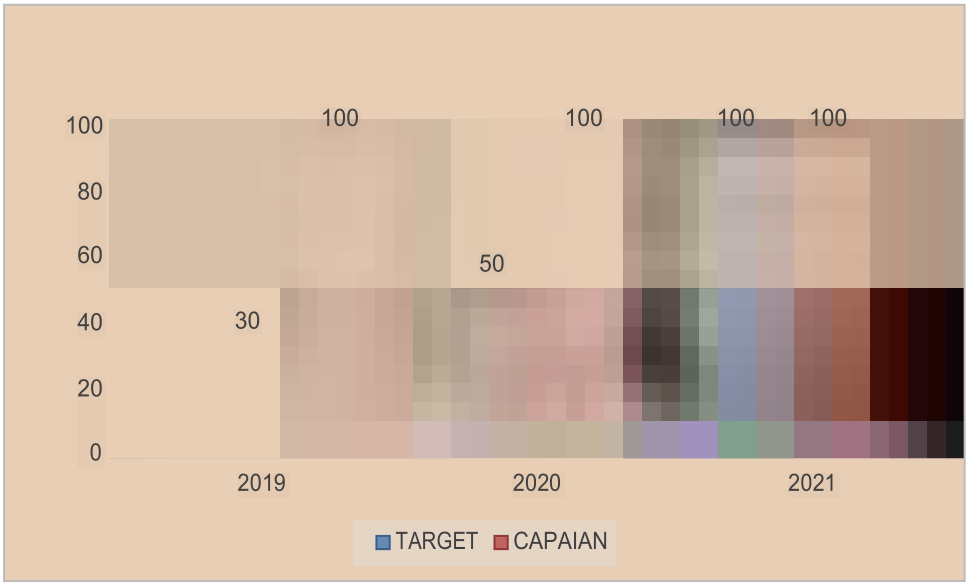

Gambar 3.3 diatas memberikan gambaran bahwa Capaian Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan cukup konsisten dan trandnya linier dari tahun 2019 s/d tahun 2021 ada diangka 100%. Hal ini berbanding lurus dengan realisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina yaitu sama-sama mencapai 100% (Gambar 3.4). Untuk realisasi capaian Kelompok Masyarakat Yang Berprestasi ternyata trandnya mengalami peningkatan pada tahun 2021, karena di tahun 2019 dan 2020 capaiannya masih nol (0%). Hal ini disebabkan karena tahun 2019 – 2020 kita mengalami Pandemi Covid 19, dimana ada kebijakan pemerintah tentang PPKM dimana masyarakat dihimbau untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan 5 M, yang secara langsung dan tidak langsung ruang gerak masyarakat agak terganggu, pakem tidak ada kegiatan. Baru di tahun 2021 ada sedikit keleluasaan untuk melaksanakan kegiatan seiring dengan menurunnya kasus Covid di Kota Serang. Grafik tentang Trand Kelompok Masyarakat yang Beprestasi dapat dilihat pada gambar 3.5 dibawah ini :

Gambar 3.5
Grafik Trand Realisasi Persentasi Kelompok Masyarakat Berprestasi Tahun 2019 s/d Tahun 2021

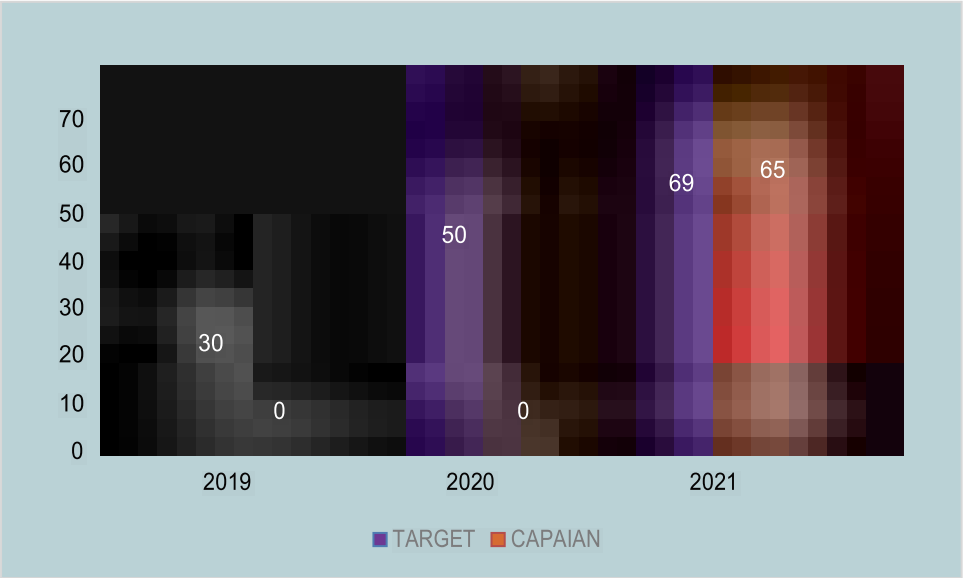

Grafik Trand Capaian Realisasi RJAK dan Capaian Nilai LKjIP dapat diketahui pada gambar 3,6 dan gambar 3.7 berikut ini :

Gambar 3.6
Grafik Trand Realisasi Capaian RJAK (Rata-Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga)/ TFR tahun 2019 s/d 2021

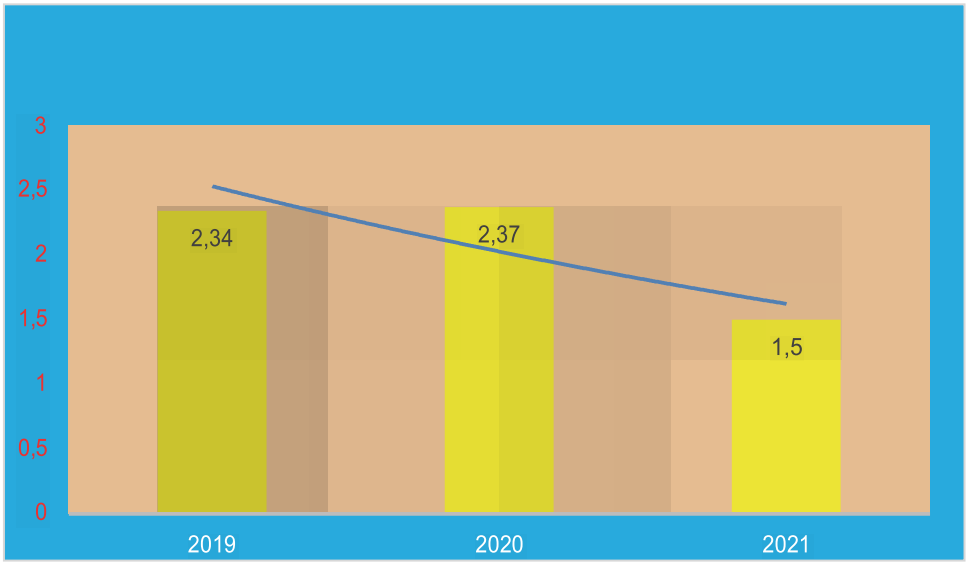

Gambar 3.7

Grafik Trand Realisasi Capaian Nilai LKjIP tahun 2019 s/d Tahun 2020

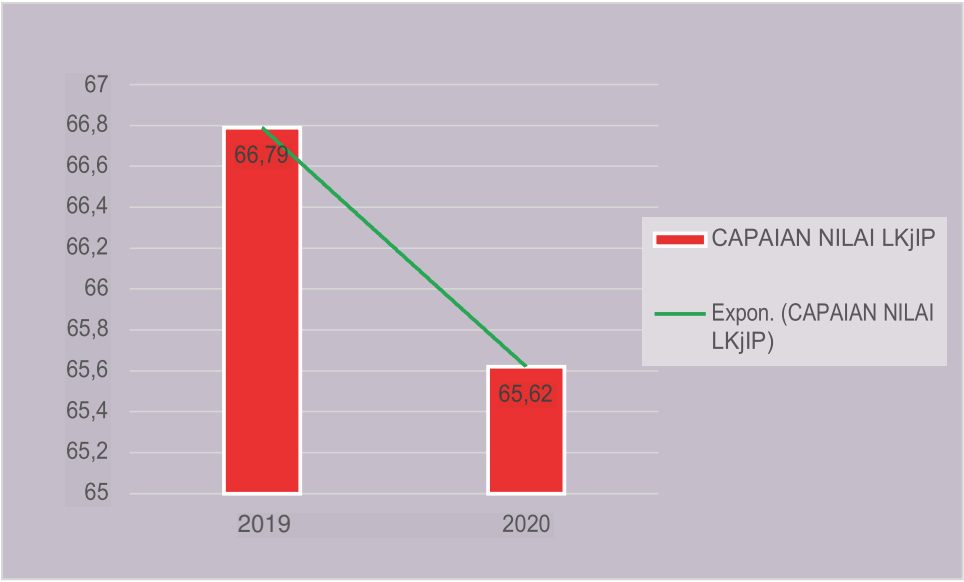

Dari gambar 3.6 diatas diperoleh gambaran bahwa realisasi capaian rata -rata jumlah anak dalam keluarga /TFR di Kota Serang dari tahun 2019 s/d tahun 2021 ini mengalami penurunan. Ini adalah trand yang positif, karena dengan adanya penurunan capaian RJAK/TFR berarti tingkat kelahiran di Kota Serang menurun, Dengan menurunnya tingkat kelahiran maka pengendalian penduduk melalui Pelayanan KB, Advokasi /KIE dan Pelayanan KB, Pembentukan kelompok PIK-R, Pelaksanaan penyuluhan di Kampung KB memberikan hasil yang cukup signifikan (outcome yang positif). Sementara itu berdasarkan gambar 3.7 kita bisa mengetahui bahwa capaian nilai LKjIP DP3AKB tahun 2019 s/d mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor SDM, Sumber Daya Sarana & Prasarana, Penganggaran, dan yang paling besar pengaruhnya adalah karena kita sedang mengalami kondisi Pandemi Covid 19. Namun meskipun demikian kami berharap ada peningakatan capaian nilai di tahun 2021, seiring dengan peningkatan kinerja seperti yang digambarkan pada tabel 3.1 diatas.

b) Perbandingan realisasi tahun ini dengan target renstra

Selain dengan membandingkan capaian realisasi dengan tahun sebelumnya pengukuran keberhasilan capaian IKU DP3AKB tahun 2021 juga dibandingkan dengan target yang ada di Restra DP3AKB 2018-2023 seperti yang tercantum pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 Dengan Target Renstra 2018-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	KET
1	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perekonomian dan politik	Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	100%	100%	
		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina	100%	100%	
		Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	69%	65%	
2	Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan hak anak	Rasio KDRT	0.0046	0,0044	
		Persentase Perlindungan Perempuan dan Hak Anak	100%	100%	
3	Terlaksananya kependudukan dan Keluarga Berencana	Tingkat kelahiran Rata-Rata/RJAK	2,34	1.50	
4	Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	66		Realisasi Capaian masih kosong karena nilai LKjIP diperoleh setelah di reviu oleh Inspektorat Kota Serang

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat diketahui bahwa target yang tercantum dalam IKU sama dengan target yang ada di renstra, dimana capaian Realisasi IKU DP3AKB tahun 2021 sebagian (50%) sudah mencapai target rensrtra dan sebagian lagi(50%) dibawah target rentra.

c) Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan Dalam Capaian IKU DP3AKB Tahun 2021 Serta alternatif Solusi pengukuran kinerja

Setelah melakukan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama DP3AKB Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya (2019 & 2020), maka kami memandang perlu melakukan analisa terhadap akar penyebab masalah kenapa terjadi penurunan realisasi capaian dan kenapa realisasi capaian tidak mencapai target sesuai yang diharapkan. Sekaigus mencari alternatif solusi pengukuran kinerjanya, supaya realisasi capaian kinerja ditahun mendatang menjadi lebih baik lagi. Adapun identifikasi penyebab masalah keberhasilan dan kegagalan dalam realisasi capaian target IKU DP3AKB Tahun 2021 dan solusi alternati pengukuran kinerjanya sebagaimana tergambar pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif Solusi Realisasi Capaian IKU DP3AKB Kota Serang Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI
1	Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	a. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di Kota Serang b. Meningkatnya pengetahuan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat c. Meningkatnya peran serta aktif lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan		
2	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbina	100%	100%	100%	a. Meningkatnya pengetahuan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat b. Meningkatnya peran serta aktif lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan msyarakat c. Meningkatkatnya kinerja Bidang PUG PP dalam Program Pemberdayaan Perempuan/masy.		

3	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	69%	65%	94.20%		Masih kurangnya peran serta aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Rutin dan kontinyu terhadap LPM dan organisasi kemasyarakatan lainnya
4	Rasio KDRT	0.0046	0.0044	95.65%		Meningkatnya kesadaran Masyarakat untuk melaporkan setiap kasus kekerasan, adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga sebagai dampak Pandemi Covid 19, dan Kurang adanya komunikasi intern dam keluarga	Pembinaan ketahanan keluarga melalui pembinaan dan pembentukan PUSPAGA
5	Persentase Perlindungan Perempuan dan Hak Anak	100%	100%	100%	Meningkatnya kinerja UPTD PPA dan P2TP2A dalam memberikan perlindunnganan, penanganan, dan pelayanan terhadap kasus-kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak		
6	Tingkat kelahiran Rata-Rata/RJAK	2,34	1.50	64.10%	Menurunnya angka kelahiran	Terkendalanya pelayanan KB karena pandemi Covid-19	Implementasi layanan KB dan pembinaan kesertaan KB

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang berjumlah 29 Orang PNS serta personil operator yang membantu dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang yang berstatus Tenaga Kerja Lepas/ Non PNS berjumlah 35 Orang

e) Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Serang Tahun 2021 telah melaksanakan 11 (sebelas) program yang tercantum dalam penetapan kinerja dengan 1 (satu) program yang bersifat non urusan dan urusan wajib yang bukan pelayanan dasar berjumlah 10 (sepuluh) program.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 13.953.545.705, - dengan realisasi sebesar Rp. 12.480.598.944, - sehingga tingkat capaian target realisasi keuangan sebesar 89,44%, dengan rincian :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.953.752.936, - dengan realisasi sebesar Rp. 4.721.837.949,- sehingga tingkat capaian target realisasi keuangan 95,32%. Digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, dan belanja honorarium.
2. Belanja Barang Dan Jasa (untuk kegiatan) sebesar Rp.8.687.058.208, - dengan realisasi sebesar Rp. 7.460.021.495, - sehingga tingkat capaian target realisasi keuangan 85,88%. Digunakan untuk kegiatan bintek, sosialisasi, pelatihan dan lainnya.
3. Belanja Modal sebesar Rp.312.734.561,- dengan realisasi sebesar Rp.298.739.500,- sehingga tingkat capaian target realisasi keuangan 95,52%. Digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor, Perangkat layanan Brodban Internet berbasis Satelit, Belanja kendaraan Bermotor Roda Dua, Belanja Personal Computer dan Printer.

Total sisa anggaran sebesar Rp. 1.472.946.761,- *(Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)* tidak terserap.

Tabel 3.5
Komposisi Belanja Dinas Pemberdayaan Perempun, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	4.953.752.936,-	4..721.837.949,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	8.687.058.208,-	7.460.021.495,-
3.	Belanja Modal	312.734.561,-	298.739.500,-
Jumlah		**13.953.545.705,-**	**12.480.598.944**

Sumber : DP3AKB Kota Serang, Tahun 2021

Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Serapan Anggaran DP3AKB Kota Serang Tahun 2021 Berdasarkan Proram dan Kegiatan

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Posentase Capaian
(1)	(2)	(3)		
	BELANJA	**13.953.545.705,00**	**12.480.598.944,00**	**89,44%**
	BELANJA PEGAWAI	4.953.752.936,00	4.721.837.949,00	**95,32 %**
	BELANJA BARANG DAN JASA	8.687.058.208,00	7.460.021.495,00	**85,88 %**
	BELANJA MODAL	312.734.561,00	298.739.500	**95,52 %**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**6.371.088.274,00**	**5.975.951.784,00**	**93,80%**
.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185.150.000,00	142.623.000,00	77,03%
2	Administrsi Keuangan Perangkat Daerah	4.959.035.936,00	4.732.250.949,00	95,43%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.412.272,00	234.916.000,00	98,53%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.005.561,00	122.615.500,00	84,56%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.740.000,00	333.162.435,00	79,56%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.544.505,00	379.183.900,00	96,35%
II	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**306.763.089,00**	**237.355.930,00**	**77,37%**
8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	306.763.089,00	237.355.930,00	77,37%
III	**Program Perlindungan Perempuan**	**222.930.000,00**	**179.108.310,00**	**80,34%**
9	Pencegahan Kekerasan terhadap PerempuanLingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.090.000,00	54.590.000,	99,09%
10	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	167.840.000,00	124.518.310,00	74,19%
IV	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**105.339.500,00**	**102.189.500,00**	**97,01%**

11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota	105.339.500,00	102.189.500,00	97,01%
V	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**103.450.000,00**	**95.631.000,00**	**92,44%**
12	Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.450.000,00	95.631.000,00	92,44%
VI	**Program Pemenuhan Hak Anak**	**146.699.601,00**	**112.514.550,00**	**76,70%**
13	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	146.699.601,00	112.514.550,00	76,70%
VII	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**364.964.500,00**	**182.475.660,00**	**50,00%**
14	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303.015.000,00	130.226.160,00	42,98%
15	Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/	61.949.500,00	52.249.500,00	84,34%
VIII	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**1.383.617.192,00**	**1.289.187.250,00**	**93,18%**
16	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum	1.383.617.192,00	1.280.187.250,00	93,18%
IX	**Program Pengendalian Penduduk**	95.195.239,00	92.198.600,00	96,85%
17	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	22.730.239,00	20.723.600,00	91,17%
18	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72.465.000,00	71.475.000,00	98,63%
X	**Program Keluarga Berencana**	**3.811.022.310,00**	**3.248.415.360,00**	85,24%
19	Pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	674.408.250,00	615.580.031,00	91,28%
20	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	482.797.500,00	480.527.500,00	99,53%
21	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.161.472.560,00	1.783.754.829,00	82,52%

22	Pemberdayaan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	492.344.000,00	368.553.000,00	74,86%
XI	**Program Pemberdayaan Dan Peningk Keluarga Sejahtera**	**1.042.476.000,00**	**965.571.000,00**	**92,62%**
23	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahan dan Kesejahteraan Keluarga	1.042.476.000,00	965.571.000,00	92,62%

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, dapat diketahui bahwa masih ada kegiatan yang capaian nrealisasi anggarannya masih dibawah 90 %. Adapun rincian penyebab masalah / permasalahan tidak tercapainya target realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Kegiatan Dengan Reaslisasi Serapan Anggaran Dibawah 90%
Dan Penyebab/Permasalahannya

NO	NAMA KEGIATAN	PENYEBAB/ PERMASALAAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SPPD Luar Daerah tidak terserap karena undangan dari OPD pelaksana terbatas, anggaran tidak bisa dialihkan ke kegiatan lain karena tidak ada anggaran perubahan
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terjadi Efisiensi Harga
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjadi efisiensi Harga
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	? Terkendala adanya kebijakan Pemerintah tentang PPKM sehingga berdampak pada kegiatan yang kurang maksimal, karena terbatasnya kegiatan yang mengumpulkan masyarakat

		? Tidak adanya kegiatan perjalanan dan penginapan di luar daerah sebagai dampak pandemic Covid 19 ? Anggaran tidak bisa dialihkan ke kegiatan lain karena tidak ada perubahan anggaran
5	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	? Tidak semua kasus yang ditangani melaksanakan rawat jalan dan rawat inap ? Tidak semua kasus yang ditangani memerlukan terapi medis ? Tidak semua kasus yang ditangani memerlukan konsultasi psikolog/advokat
6	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Efisiensi anggaran dari kegiatan Hari Anak Nasional, namun anggaran tidak bisa dialihkan ke kegiatan lain karena tidak ada perubahan anggaran
7	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	? Tidak semua kasus yang ditangani memerlukan terapi medis ? Tidak semua kasus yang ditangani memerlukan konsultasi psikolog/advokat
8	Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/	Tidak semua kasus yang ditangani melaksanakan rawat jalan dan rawat inap
9	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	? Terjadi efisiensi Harga ? Pelaksanaan kegiatan mundur, tidak sesuai rencana aksi, karena terhalang Pandemi Covid 19

10	Pemberdayaan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	? Adanya Himbauan PPKM, Dimana terjadi pembatasan protokol kesehatan dengan 5M ? Pelaksanaan kegiatan mundur, tidak sesuai rencana aksi, karena terhalang Pandemi Covid 19

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2021

A. Tindak Lanjut Hasil Reviu LKjIP 2020

Berdasarkan hasil reviu Inspektorat terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2021 diperoleh rekomendasi sebagai berikut :

1. Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja melalui website resmi atau media yang dapat diakses oleh publik/masyarakat
2. Dalam Perjanjian Kinerja agar jenjang esselon IV merumuskan sasaran dan indikator kinerja, bukan sasaran atau indikator kegiatan. Indikator kinerja harus menggambarkan outcome serta menggu nakan indikator kinerja yang relevan dan memenuhi indikator kinerja yang baik
3. Membuat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja
4. Memanfaatkan teknologi Informasidalam pengukuran capaian kinerja, sehingga capaian atau progress kinerja bisa diidentifikasi secara tepat dan cepat.
5. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/tribulanan/semesteran)
6. Agar dilakukan pemantauan rencana aksi secara bulanan, tribulanan, semesteran, maupun tahunan dan pemantauan rencana aksi harus dituangkan dalam Laporan Kinerja
7. Evaluasi Rencana aksi agar dilakukan secara berkala sebagai pengendali kinerja.
8. Memanfaatkan hasil capaian kinerja sebagai dasar pemberian reword & punishment mulai dari esselon IV keatas sehingga dapat dibedakan pejabat/pegawai yang mencapai target kinerja dengan yang tidak mencapai target kinerja dan lain-lain
9. Menyajikan data terkait hasil Reviu Indikator Utama secara berkala dalam laporan kinerja

10. Menyajikan pembandingan data capaian kinerja yang memadai dalam laporan Kinerja antara target dan realisasi, realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengahsecara jelas dan detail.
11. Menyajikan informasi yang lengkap dan detail tentang analisis effisiensi penggunaan sumber daya dalam pemcapaian tujuan dan sasaran dan effisiensi yang telah dilakukan serta besaran effisiensi yang bterjadi harus dikuantifikasikan
12. Melakukan penyempurnaan terhadap isi materi materi Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi terkait sumber-sumber atau basis data yang dipercaya (kompeten) serta dasar penghitungan yang valid mengenai capaian kinerja sebagaimana formulasi yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan beberapa upaya tindak lanjut sebagai mana terlihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Upaya Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Reviu Laporan Kinerja (LKjIP)
Tahun 2020

NO	REKOMENDASI HASIL REVIU	UPAYA TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja melalui website resmi atau media yang dapat diakses oleh publik/masyarakat	a. Menunjuk operator Rabeg untuk sekaligus menjadi operator website resmi DP3AKB b. Mengupload Renstra Perubahan, PK, IKU, dan Laporan	Effisensi tenaga operator , karena adanya keterbatasan tenaga/operator website

		Kinerja dalam website resmi	
2	Dalam Perjanjian Kinerja agar jenjang esselon IV merumuskan sasaran dan indikator kinerja, bukan sasaran atau indikator kegiatan. Indikator kinerja harus menggambarkan outcome serta menggunakan indikator kinerja yang relevan dan memenuhi indikator kinerja yang baik	Melakukan perbaikan dalamrumusan indikator sasaran dan indikator kinerja dalam PK 2021	PK 2021 & PK Perubahan 2021 terlampir
3	Membuat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja	Membuat SOP pengumpulan data kinerja	SOP tentang Pengumpulan Data Kinerja terlampir
4	Memanfaatkan teknologi Informasi dalam pengukuran capaian kinerja, sehingga capaian atau progress kinerja bisa diidentifikasi secara tepat dan cepat.	Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi program yang ada dalam pengukuran kinerja	Aplikasi simponi, Aplikasi SIGA, Aplikasi Morena, Aplikasi Jelita, Aplikasi SIRIKA
5	Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/tribulanan/semesteran)	Melakukan pengumpulan dan pengukuran kinerja secara tribulanan, melakukan evaluasi atas rencana aksi secara semesteran	? Laporan Pengukuran Kinerja Tribulanan terlampir? ? Laporan Evaluasi Rencana Aksi semesteran terlampir?

6	Agar dilakukan pemantauan rencana aksi secara bulanan, tribulanan, semesteran, maupun tahunan dan pemantauan rencana aksi harus dituangkan dalam Laporan Kinerja	Melakukan pemantauan rencana aksi secara tribulanan dan semesteran	Laporan Evaluasi Rencana Aksi semesteran terlampir
7	Evaluasi Rencana aksi agar dilakukan secara berkala sebagai pengendali kinerja	Melaksanakan evaluasi rencana aksi secara semesteran	Laporan Evaluasi Rencana Aksi semesteran terlampir
8	Memanfaatkan hasil capaian kinerja sebagai dasar pemberian reword & punishment mulai dari esselon IV keatas sehingga dapat dibedakan pejabat/pegawai yang mencapai target kinerja dengan yang tidak mencapai target kinerja dan lain-lain	Memberikan reword kepada kinerja bidang dengan capaian realisasi tertinggi dan reword p ada kinerja bidang dengan respon terbaik	? Pemberian reword dan punisment dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan situasi dan kondisi ? Adokumentasi pemberian reword terlampir.
9	Menyajikan data terkait hasil Reviu Indikator Utama secara berkala dalam laporan kinerja	Menyajikan data hasil reviu Indikator Utama dalam Laporan Kinerja 2021	Disajikan dalam BAB III Laporan Kinerja

10	Menyajikan pembandingan data capaian kinerja yang memadai dalam laporan Kinerja antara target dan realisasi, realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya dan realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengahsecara jelas dan detail.	Menyajikan pembandingan data capaian kinerja yang memadai dalam laporan Kinerja 2021	Disajikan dalam BAB III Laporan Kinerja
11	Menyajikan informasi yang lengkap dan detail tentang analisis effisiensi penggunaan sumber daya dalam pemcapaian tujuan dan sasaran dan effisiensi yang telah dilakukan serta besaran effisiensi yang bterjadi harus dikuantifikasikan	Menyajikan informasi yang lengkap dan detail tentang analisis effisiensi penggunaan sumber daya dalam pemcapaian tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja 2021	Disajikan dalam BAB III Laporan Kinerja

12	Melakukan penyempurnaan terhadap isi materi materi Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi terkait sumber-sumber atau basis data yang dipercaya (kompeten) serta dasar penghitungan yang valid mengenai capaian kinerja sebagaimana formulasi yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama	Menyusun Laporan Kinerja ta hun 2021 dengan semaksimal mungkin disesuaikan dengan kekuatan sumber daya yang ada.	Dokumen Laporan Kinerja 2021 tersusun.

Upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil reviu seperti dalam tabel 5.1 diatas, dilakukan semaksial mungkin sesuai dengan kekuatan sumber daya yang ada di DP3AKB dengan harapan ada perbaikan Laporan Kinerja ke arah yang lebih baik, dan menjadi motivasi untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang telah dapat dilaksanakan dengan time schedule dan hasil (outcome) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Kota Serang dan Dana Alokasi Khusus, baik kegiatan yang bersif at rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip -prinsip penganggaran yang efektif dan efisien.

Dari evaluasi kinerja dan analisis yang tercantum diatas, tampak bahwa Satuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan K eluarga Berencana Kota Serang dalam kurun waktu tahun 2021 telah melaksanakan tugasnnya dengan tingkat keberhasilan mencapai 66,79% . Dengan tolak ukur yang terukur ini dapat dikatakan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak d an Keluarga Berencana Kota Serang memperoleh kredit point ***Baik***. dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Serang tahun 2020.

Dan dari segi anggaran tahun 2021 plafon dana yang dianggarkan adalah Rp.13.953.545.705,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.480.598.944, - atau sebesar 89,44% dari dana yang disediakan sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.1.472.946.761,- tidak terserap. Dana yang tidak terserap ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a. Effisiensi Dana DAK Fisik
b. Narsum intern, karena penyerapannya hanya 50% dari yang dianggarkan
c. Perjalanan Dinas Luar daerah karena situasi dan kondisi Pandemi Covid 19
d. Keterlambatan pelaksanaan SIPD, sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan tidak sesuai rencana aksi awal

Mutu hasil kinerja ini merupakan cambuk bagi pelaksanaan kinerja di tahun mendatang, mengingat angka kelahiran semakin tinggi sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan tingkat pelayanan terhadap masyarakat terkait pelayanan KB. Diharapkan dengan evaluasi kinerja dan analisis kinerja ini menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana semakin lebih prima melayani masyarakat Kota Serang.

B. Saran

Untuk lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana Kota Serang. Upaya-upaya yang dilakukan agar pelaksanaan lebih baik di tahun mendatang adalah dalam bentuk :

1. Melaksanakan pelayanan KB secara continue dan menyeluruh melalui safari KB di setiap Kecamatan se-Kota Serang
2. Melaksanakan penyuluhan dan KIE reprodukasi pada remaja dan PUS
3. Melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh kelurahan se- Kota Serang

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana Kota Serang Tahun 2021 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mohon saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

Tabel 3.1
Pencapaian Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Keterangan
	Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan			**NILAI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**					
		Meningkatnya Akuntanbilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan pada Lingkup Perangkat Daerah		Capaian hasil evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0-100)	Skala	66	64,89	98,32	Realisasi capaian dibawah target, hal ini disebabkan karena target terlalu tinggi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Persen	100	100	100	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	10	100	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, IKU OPD Tahun 2021, PK OPD Tahun 2021	Dokumen	4	4	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD Tahun 2022	Dokumen	1	1	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD Tahun 2021	Dokumen	1	1	100	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD Tahun 2022	Dokumen	1	1	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD Tahun 2021	Dokumen	1	1	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah evaluasi renja (LPPD OPD Tahun 2020, LAKIP OPD Tahun 2020)	Dokumen	2	2	100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS dan Tunjangan PNS	Bulan	12	12	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	100	

1			Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Dokumen	2	2	100
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Ketersediaan dokumen aset barang milik daerah**	Dokumen	1	1	100
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen aset barang milik daerah	Dokumen	1	1	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum PD**	Persen	100	100	100
			Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulanpenyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor	Bulan	12	12	100
			Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah bulan kebutuhan peralatanrumah tangga	Bulan	12	12	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan pegawai harian	Bulan	12	12	100
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Bulan	12	12	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan	Bulan	12	12	100
			Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Bulan	12	12	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase tingkat ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	Persen	100	100	100
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor (AC split)	Unit	2	2	100
				Komputer PC	Unit	1	1	100
				Laptop	Unit	2	2	100
				Meja Kerja	Unit	2	2	100
				Printer	Unit	3	3	100
				Sewa gedung kantor UPT PPA	Unit	1	1	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	Persen	100	100	100
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat dan jumlah materai	Bulan	12	12	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan kebutuhan telepon, internet dan listrik	Bulan	12	12	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah**	Persen	100	100	100
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor	Bulan	12	12	100

			Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	100	
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak			**CAPAIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**					
2		Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan hak anak		Rasio KDRT	Rasio	0.0046	0.0044	95,65	
				Persentase perlindungan perempuan dan hak anak	Persen	100	100	100,00	Realisasi capaian diatas target, karena semua korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak terlindungi (mendapat pelayanan dan penanganan)
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan**	Persen	30	100	333	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PemberdayaanPerempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	persen	30	100	333	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga PenyediaLayanan PemberdayaanPerempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan kapasitas pemberdayaan perempuan DWP	Peserta	50	50	100	
				Jumlah peserta pembinaan kapasitas pemberdayaan perempuan GOW	Organisasi	34	34	100	
				Jumlah peserta hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan	Orang	75	75	100	
				Jumlah peserta pelatihan Dharma Wanita Persatuan	Peserta	50	50	100	
				Jumlah peserta seminar Dharma Wanita Persatun	Peserta	80	80	100	
			Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang di bina melalui program P2WKSS	Kelurahan	2	2	100	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Cakupan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak**	Persen	100	100	100	
			PencegahanKekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	persen	100	100	100	
			Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanKebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penanganan kasus	persen	100	100	100	
			Penyediaan LayananRujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi**	persen	100	100	100	

			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan pengaduan perempuan korban kekerasan	persen	100	84	83,7	Realisasi capaian dibawah target, hal ini disebabkan karena tidak semua kasus yang ditangani melaksanakan rawat jalan dan rawat inap
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pengaduan korban TPPO	persen	100	60	59,97	Realisasi capaian dibawah target, hal ini disebabkan karena: 1) Tidak semua kasus yang ditangani melaksanakan rawat jalan dan rawat inap 2). Tidak semua kasus yang ditangani memerlukan terapi medis 3) Tidak semua kasus yang ditangani memerlukan konsultasi psikolog/advokat
3			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Capaian peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dari hak anak**	Persen	100	64,8	64,8	Realisasi capaian dibawah target , hal ini disebabkan karena belum semua keluarga melaksanakan kesetaraan gender dan memenuhi hak anak.
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	Persen	97	64,8	66,80	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan pengurus PUSPAGA	Kecamatan	1	1	100	
				Jumlah Kecamatan pengurus GSI	Kecamatan	1	1	100	
				Jumlah Kecamatan pengurus P2TP2A	Kecamatan	1	1	100	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Terpilah Gender dan anak	Persen	100	100	100	
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian ketersediaan data terpilah sistem informasi gender dan anak**	Persen	100	100	100	
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data terpilah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Laporan	1	1	100	
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan IPG dan IDG	Laporan	1	1	100	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase pemenuhan hak anak**	Persen	100	100	100	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian hak-hak anak di Kota Serang	Persen	84	100	119,047619	
4			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak tingkat Kota Serang dan Kelurahan yang dibentuk	Forum anak	3	3	100	
				Jumlah anak pada Peringtan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Serang	anak	100	100	100	

			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Cakupan Pelayanan Perlindungan Hak Anak**	Persen	100	100	100	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**	Persen	100	100	100	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus	Kasus	30	43	143,33	Realisasi capaian diatas target, hal ini disebabkan karena kasus yang ditangani pada tahun 2021 ada 43 kasus jauh diatas target (30 kasus)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penanganan kasus	Persen	100	100	100	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peenguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak**	Persen	66	66	100	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarahan pembentukan pengurus PATBM	Kelurahan	10	10	100	
				Penguatan kelembagaan PATBM	Kecamatan	1	1	100	
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat			**INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)**					
				INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)					
		Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perekonomian dan politik		Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	Persen	100	100	100,00	Realisasi capaian diatas target, hal ini disebabkan karena semua lembaga pemberdayaan masyarakat telah tebina dan ikut serta berpartisipasi dalam program pemberdayaan perempuan
				Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat terbina	Persen	100	100	100,00	
				Persentase lembaga masyarakat yang berprestasi	Persen	69	65	94,20	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Capaian LPM kategori aktif	Persen	100	100	100	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	Persen	100	100	100	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelompok karang taruna yang terbina	Kelompok	67	67	100	
				Jumlah LPM yang terbina	Kelompok	74	74	100	
				Jumlah kader posyandu yang terbina	Kader	330	330	100	
				Jumlah penilaian Lomba Kampung Resik lan Aman	RT	402	402	100	

		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang terbentuk	Kelompok usaha	29	29	100	
			Jumlah peserta bintek pengemasan produk UP2K	Orang	150	100	66,67	Realisasi dibawah target, hai ini disebabkan karena ada himbauan PPKM dari Pemerintah dimana ada pembatasan dalam jumlah peserta
		Fasilitasi Pemerintah Desadalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta bintek investor dan siswa	Orang	40	40	100	
			Jumlah peserta bintek pengurus dan anggota posyantek	Orang	70	70	100	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok pembinaan PKK	Kelompok	74	74	100	
			Jumlah peserta bina wilayah PKK	Peserta	412	412	100	
			Jumlah peserta kegiatan 10 program pokok PKK	Peserta	150	150	100	
			Jumlah peserta penilaian Hari Kesatuan Gerak PKK	Peserta	150	150	100	
Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK					
	Terkendalinya kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga		Tingkat kelahiran Rata-Rata	Poin	2,34	1,5	64,10	Realisasi dibawah target, hai ini disebabkan karena tingkat kelahiran di Kota serang menurun.
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Cakupan data keluarga yang akurat**	Persen	83	83	100	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Persentase data keluarga yang akurat**	Persen	83	83	100	
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah peserta sosialisasi pen[illegible] kependudukan ke sekolah/masyarajat	Orang	[illegible]	[illegible]	100	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pelaporandan informasi (updating data)**	Persen	83	90	108	
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta bimtek F/II/KB di Faskes Pemerintah dan Swasta	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			Jumlah laporan F/II/KB di Faskes	Faskes	64	64	100	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Promosi KIE-KB	%	75	100	133	Realisasi capaian diatas target, karena semua kecamatan mendapat kegiatan promosi KIE KB
			Capaian pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB	%	73	100	136,99	Realisasi capaian diatas target karena semua PLKB dan Kader KB melaksanakan pergerakan program KB/KKBPK
			Capaian PPM peserta KB	%	68	75,75	111,40	Realisasi capaian diatas target, hal ini disebabkan karena peserta KB aktif meningkat
		Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Terlaksananya penyuluhan program bangga kencana**	%	70	70	100	
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta penyuluhan program KKBPK kepada Majelis Taklim Agama dan Tokoh Masyaraka	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tersampaikannya informasi te[illegible] Program Bangga Kencana me[illegible] radio dan leaflet	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terfasilitasinya operasional balai penyuluhan KB	Kecamatan	6	6	100	
Pendayagunaan TenagaPenyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB**	%	73	90	123	
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kader PPKBD yang dibuatkan laporanbulanan Rek.Kel.F/I/Dal/15 dalam program KKBPK	Kader	67	67	100	
	Jumlah laporan rekap program KKBPK	Dokumen	4	4	100	
Penggerakan KaderInstitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terbina kader Sub PPKBD Tingkat Kota Serang (567 orang Sub PPKBD)	Orang	567	567	100	
	Tersediany data R/I/PUS/15 Tingkat Kelurahan	Dok	8	8		
Pengendalian danPendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan PelayananKB diDaerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya capaian PPM peserta KB**	%	68	73,00	107	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi dari gudang kota ke fasilitas kesehatan KB	Faskes	90	90	100	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terfasilitasinya penggerakan dan pelayanan KB MKJP	Akseptor	1.076	927	86,15	Realisasi capaian dibawahtarget, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan mundur, tidak sesuai rencana aksi sebagai dampak pandemicovid 19 dan akseptor KB lebih banyak memilih ber- KB dengan IUD dan Implant dibanding MOW
	Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor IUD/Implant	Akseptor	600	517	86,17	
	Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor MOW	Akseptor	5	4	80,00	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	Unit/Paket	110	110	100	
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah bulan pelayanan KB bergerak melalui muyan	Bulan	12	12	100	
Pemberdayaan danPeningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	%	68	75	110	
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan danP embinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah akseptor pelayanan KB pada Momentum TMKK, HKG PKK KB dan kerjasama lintas sektor dan mitra kerja	Akseptor	350	350	100	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah kegiatan pertemuan kelompok kerja di kampung KB	Kegiatan	4	3	75	Realisasi capaian dibawah target, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan mundur, tidak sesuai rencana aksi sebagai dampak pandemi covid 19
Pelaksanaan dan PengelolaanProgram KKBPK di Kampung KB	Terfasilitasinya operasional balai penyuluhan KB	Kecamatan	6	6	100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA (KS)	Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif	%	76	76	100	Capaian target 100% karena semua kelompok kegiatan KB aktif dalam kegiatan KB
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Terlaksananya kelompok kegiatan yang aktif**	%	76	76	100	

			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok PIK-R yang terbentuk	Kelompok	6	6	100	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah KIE Kit program KKBPK	Paket	20	20	100	
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kader poktan BKB yang dibina	Kelompok	94	70	74,47	Realisasi capaian dibawah target, hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan mundur, tidak sesuai rencana aksi sebagai dampak pandemi covid 19
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKB	Kelompok	94	94	100,00	Realisasi capaian 100% karena semua kelopok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS mendapat biaya operasional
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKL	Kelompok	48	48	100,00	
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKR	Kelompok	46	46	100,00	
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan UPPKS	Kelompok	20	20	100,00	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah calon pengantin yang mendapat pembinaan kespro dan stunting	Pasangan	1410	1410	100	
				Jumlah ibu dan keluarga yang mendapa edukasi pengasuhan 1000 HPK	Orang	2140	2140	100	

Tabel 3.2

Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan		**NILAI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**											
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	**Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)**					66,79		65,62				
			POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan**	**Persen**			**100**	**6.252.836.053**	**100**	**5.089.842.075**	**100**	**5.975.951.784**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Dok**			**10**	**258.993.600**	**10**	**164.776.400**	**10**	**142.623.000**	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah, IKU OPD, PK OPD dan Profil OPD	Dok			4	108.710.000	4	47.298.400	4	102.723.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah dokumen RKA -SKPD	Dok			1	10.574.400	1	12.076.500	1	15.600.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Dok			1	10.574.400	1	5.536.500	1	3.490.000	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA -SKPD	Dok			1	10.574.400	1	12.571.500	1	3.405.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Dok			1	10.574.400	1	5.536.500	1	5.080.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah evaluasi renja (LPPD OPD, LAKIP OPD)	Dok			2	107.986.000	2	81.757.000	2	12.325.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah**	**Persen**			**100**	**4.843.298.644**	**100**	**4.034.296.266**	**100**	**4.732.250.949**	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS	Gaji PNS	Bulan			12	4.823.638.644	12	4.020.721.266	12	4.658.517.949	
				Tunjangan PNS	Bulan			12		12		12		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dok			1	9.660.000	1	6.540.000	1	44.910.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran/Triwulanan	Dok			2	10.000.000	2	7.035.000	2	28.823.000	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Ketersediaan dokumen aset barang milik daerah**	Dok			**1**	**47.000.000**	**1**	**39.990.000**	**1**	**31.200.000**	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen aset barang milik daerah	Dok			1	47.000.000	1	39.990.000	1	31.200.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum PD**	**Persen**			**100**	**406.533.740**	**100**	**311.550.859**	**100**	**234.916.000**	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan			12	15.000.000	12	22.000.000	12	6.175.400	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan			12	64.000.000	12	39.000.000	12	45.333.500	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan kebutuhan peralatan rumah tangga	Bulan			12	18.800.000	12	17.560.000	12	15.571.100	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan pegawai harian	Bulan			12	35.000.000	12	34.245.159	12	30.480.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Bulan			12	34.950.000	12	30.300.000	12	28.950.900	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan	Bulan			12	14.000.000	12	15.000.000	12	9.048.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Bulan			12	224.783.740	12	153.445.700	12	99.357.100	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase tingkat ketersediaan barang milk daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**			**100**	**152.450.000**	**100**	**-**	**100**	**122.615.500**	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor (AC split)	Unit			2	152.450.000	-	-	2	122.615.500	
				Komputer PC	Unit			3		-		1		
				Laptop	Unit			3		-		3		
				Meja Kerja	Unit			0		-		2		
				Printer	Unit			5		-		3		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**Persen**			**100**	**347.560.069**	**100**	**340.878.550**	**100**	**333.162.435**	
			Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat dan jumlah materai	Bulan			12	25.000.000	12	24.000.000	12	8.800.000	
			Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan kebutuhan telepon, internet dan listrik	Bulan			12	96.793.809	12	56.000.000	12	79.562.435	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	Bulan			12	225.766.260	12	260.878.550	12	244.800.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persen**			**100**	**197.000.000**	**100**	**198.350.000**	**100**	**379.183.900**	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan			12	107.000.000	12	115.000.000	12	351.021.900	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor	Bulan			12	35.000.000	12	31.000.000	12	19.090.000	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan			12	55.000.000	12	52.350.000	12	9.072.000	
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak			**CAPAIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**										
		Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan Hak		**Rasio KDRT**	Persen			0,56		0,0047		0,0044		
				Persentase Perlindungan perempuan dan Hak anak	Persen			100		100		100		
			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan**	**Persen**				**695.686.700**	**-**	**288.281.800**	**100**	**237.355.930**	**-**
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah**	**Persen**			**50**	**350.908.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Workshop kegiatan Gender analysIs Pathway (GAP) dan Gender Budger Statement (GBS)	Persen									
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data terpilah gender dan anak	Laporan									
				Jumlah data IPG dan IDG	Laporan									
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perda, Perwal dan SK Pengarusutamaan Gender	Dok									
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG bagi OPD se Kota Serang	Orang			95	350.908.825					
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**%**				**344.777.875**		**288.281.800**	**100**	**237.355.930**	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan kapasitas pemberdayaan perempuan DWP	Peserta				173.125.000		145.000.000	50	85.866.180	
				Jumlah peserta pembinaan kapasitas pemberdayaan perempuan GOW	Organisasi							34		
				Jumlah peserta hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan	Orang							75		
				Jumlah peserta pelatihan Dharma Wanita Persatuan	Peserta							50		
				Jumlah peserta seminar Dharma Wanita Persatun	Peserta							80		

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang di bina melalui program P2WKSS	Kelurahan				171.652.875		143.281.800	2	151.489.750	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Cakupan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak**	**Persen**			**100**	**235.138.939**	**100**	**156.196.776**	**100**	**179.108.310**	
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**'Capaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**~~Persen~~**			**100**	**117.569.471**	**100**	**78.098.389**	**100**	**54.590.000**	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pada Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Oran g)	Keg									
				Jumlah Pembentukan Satgas TPPO Kota Serang	Satgas TPPO									
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penanganan kasus	Persen							100	54.590.000	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Persen			**100**	**117.569.471**	**100**	**78.098.389**			
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi**	**Persen**			**95**	**117.569.468**	**98**	**78.098.387**	**100**	**124.518.310**	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya layanan pengaduan perempuan korban kekerasan	Persen			100	117.569.468	100	78.098.387		84.190.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pengaduan korban TPPO	Persen							59.97	40.328.310	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Capaian peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dari hak anak**	**Persen**			**100**	**117.569.468**	**100**	**78.098.387**	**100**	**102.189.500**	-

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga**	**Persen**			**90**	**117.569.468**	**95**	**78.098.387**	**65**	**102.189.500**	-
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan pengurus PUSPAGA	Kecamatan			1	117.569.468	2	78.098.387	1	102.189.500	
				Jumlah Kecamatan pengurus GSI	Kecamatan			1		1		1		
				Jumlah Kecamatan pengurus P2TP2A	Kecamatan			1		2		1		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak**	**Persen**			**100**	**178.996.500**	**100**	**103.405.000**	**100**	**95.631.000**	-
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**Capaian ketersediaan data terpilah sistem informasi gender dan anak**	**Persen**		-	**100**	**178.996.500**	**100**	**103.405.000**	**100**	**95.631.000**	-
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data terpilah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Laporan			1	100.000.000	1	65.400.000	1	52.950.000	
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan IPG dan IDG	Laporan			1	78.996.500	1	38.005.000	1	42.681.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase pemenuhan hak anak**	**Persen**			**100**	**348.792.600**	**100**	**143.662.500**	**100**	**112.514.550**	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Capaian hak-hak anak di Kota Serang**	**Persen**		0	**80**	**348792600**	**83**	**143662500**	**100**	**112514550**	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak tingkat Kota Serang dan Kelurahan yang dibentuk	Persen			4	348.792.600	3	143.662.500	3	112.514.550	
				Jumlah anak pada Peringtan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Serang	Anak			150		100		100		
				Pemilihan Duta Anak Kota Serang	Orang			0		100		0		
				Kongres Anak Nasional	Orang			0		-		0		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Cakupan Pelayanan Perlindungan Hak Anak**	Persen		-	**100**	**117.569.468**	**100**	**78.098.387**	**100**	**182.475.660**	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi**	Persen		0		**0**		**0**	**100**	**130226160**	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus	Kasus							30	30.308.360	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penanganan kasus	Persen							100	99.917.800	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian perlindungan terhadap anak**	**Persen**		-		**117.569.468**		**78.098.387**	**66**	**52.249.500**	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan pembentukan pengurus PATBM	Kelurahan			14	117.569.468	14	78.098.387	10	52.249.500	
				Jumlah kegiatan pelatihan Perlindungan Anak Kebutuhan Khusus	Keg			0		-		0		
				Penguatan Kelembagaan PATBM	Kecamatan			0		-		1		
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat			**INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)**										
				INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)										
		Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perkonomian dan politik		Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan				100		100		100		
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terbina	**Persen**			100		100		100		
				Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	**Persen**			10		0		65		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Capaian LPM Kategori Aktif**	**Persen**			**100**	**5.452.817.500**	**100**	**1.434.380.000**	**100**	**1.289.187.250**	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**Persen**		0	**95**	**5.452.817.500**	**100**	**1.434.380.000**	**100**	**1.289.187.250**	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah kelompok karang taruna yang terbina	Kelompok			0	4.959.245.500	-	1.314.380.000	67	1.044.046.750	
				Jumlah LPM yang terbina	Kelompok			67		67		74		
				Jumlah kader posyandu yang terbina	Kader			37509		3.250		330		

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
			Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah penilaian Lomba Kampung Resik lan Aman	RT			0		402		402		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Eknomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang terbentuk	Kelompok usaha				-			29	59.554.500	
				Jumlah peserta bintek pengemasan produk UP2K	Orang							100		
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta bintek investor dan siswa	Orang			0	368.072.000		-	40	43.515.500	
				Jumlah peserta bintek pengurus dan anggota posyantek	Orang			525				70		
				Jumlah peserta gelar TTG tingkat Provinsi dan Nasional	Orang			25				0		
				Jumlh peserta penilaian TTG tingkat Kota	Klmpk			0				0		
				Jumlah peserta penilaian TTG tingkat Provinsi	Klmpk			0				0		
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok pembinaan PKK	Kelompok			74	125.500.000	74	120.000.000	74	142.070.500	
				Jumlah peserta bina wilayah PKK	Peserta			320		-		412		
				Jumlah peserta jambore PKK tingkat Kota	Peserta			51		-		0		
				Jumlah peserta kegiatan 10 program pokok PKK	Peserta			0		-		150		
				Jumlah peserta penilaian Hari Kesatuan GerakP KK	Peserta			0		250		150		
	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk			LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK										
		Terlaksananya Kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan keluarga		Tingkat Kelahiran Rata -Rata /RJAK				2,34		2,37		1,50		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Cakupan data keluarga yang akurat**	**Persen**			**80**	**434.458.000**	**82**	**173.694.111**	**83**	**92.198.600**	
			Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Persentase data keluarga yang akurat**	**Persen**				**121.649.750**	**-**	**37.200.000**	**83**	**20.723.600**	
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan ke sekolah/masyarakat	Orang				121.649.750		37.200.000	99	20.723.600	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya pelaporandan informasi (updating data)**	**Persen**				**312.808.250**	**-**	**136.494.111**	**83**	**71.475.000**	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta bimtek F/II/KB di Faskes Pemerintah dan Swasta	Faskes				312.808.250		136.494.111	64	71.475.000	
				Jumlah laporan F/II/KB di Faskes	Faskes							64		

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Cakupan Promosi KIE -KB**	**Persen**		**0**	**68**	**3.898.875.492**	**70**	**3.116.743.430**	**100**	**3.248.415.360**	
				Capaian pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB	**Persen**			**67**		**70**		**100**		
				Capaian PPM peserta KB	**Persen**			**66**		**67**		**75,75**		
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Terlaksananya Penyuluhan Program Bangga Kencana**	**Persen**		0	70	1061961750	70	316343200	70	615580031	
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta penyuluhan program KKBPK kepada Majelis Taklim, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Orang			540	246.142.000	320	60.000.000	180	79.056.250	
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tersampaikannya informasi tentang Program Bangga Kencana melalui cetak, radio dan leaflet	Kali Tayang			6	448.379.750	6	26.343.200	34	133.298.500	
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media MasaCetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersampaikannya program KKBPK	Kali			2	40.000.000	2	30.000.000			
			Pelaksanaan Mekanisme Operasonal Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya KIE Program Bangga Kencana	Peserta			200	327.440.000	2.200	200.000.000			
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terfasilitasinya operasional balai penyuluhan KB	Kecamatan			0		-		6	403.225.281	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Persentase pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB**	**Persen**		**0**		**971.664.500**		**653.062.500**	**90**	**480.527.500**	
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kader PPKBD yang dibuatkan laporan bulanan Rek.Kel.F/I/Dal/15 dalam program KKBPK	Kader			67	496.764.500	67	176.062.500	67	164.147.500	
				Jumlah laporan rekap program KKBPK	Dokumen			1		1		4		
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terbina kader Sub PPKBD Tingkat Kota Serang (567 orang Sub PPKBD)	Orang			500	474.900.000	804	477.000.000	567	316.380.000	
				Tersediany data R/I/PUS/15 Tingkat Kelurahan	Dok			1		1		8		
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya capaian PPM peserta KB**	**Persen**		**-**		**1.341.619.242**		**1.555.482.730**	**73**	**1.783.754.829**	
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi dari gudang kota ke fasilitas kesehatan KB	Faskes			96	177.005.421	96	220.705.871	90	140.700.000	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terfasilitasinya penggerakan dan pelayanan KB MKJP	Akseptor			290	177.005.421	1.000	190.705.870	927	796.990.400	
				Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor IUD/Implant	Akseptor							517		
				Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor MOW	Akseptor							4		
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor IUD/Implant	Akseptor			400	147.048.200	600	136.275.889			
				Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor IUD/Implant	Akseptor									
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	Unit				693.512.000		939.830.100	110	826.064.429	
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah bulan pelayanan KB bergerak melalui muyan	Bulan			12	147.048.200	12	67.965.000	12	20.000.000	
				Terfasilitasinya alokon di faskes KB	Faskes			64		64				
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	**Persen**				**523.630.000**		**591.855.000**	**75**	**368.553.000**	
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah akseptor pelayanan KB pada Momentum TMKK, HKG PKK KB dan kerjasama lintas sektor dan mitra kerja	Akseptor			320	214.290.000	330	210.230.000	350	92.820.000	
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah kegiatan pertemuan kelompok kerja di kampung KB	Kegiatan			6	214.290.000	6	50.535.000	3	55.735.000	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terfasilitasinya operasional balai penyuluhan KB	Kecamatan			6	95.050.000	6	331.090.000	6	219.998.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif**	**Persen**			**72**	**334.989.000**	**75**	**286.480.000**	**76**	**965.571.000**	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Terlaksananya kelompok kegiatan yang aktif**	**Persen**			**72**	**334.989.000**	**75**	**286.480.000**	**76**	**965.571.000**	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK -R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan PendapatanKeluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok PIK -R yang terbentuk	Kelompok			0	-	4	11.670.000	6	12.862.000	
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasionl kelompok PIK -R	Kelompok			0		-		0		

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2018		2019		2020		2021		Keterangan
						Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	Kinerja	Pagu (Rp)	
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK -R dan Pemberdayaan Ekonomi Kelurga/UPPKS)	Jumlah KIE Kit	Paket			6	137.379.000	-	-	20	245.300.000	
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok kader poktan BKB yang di bina	Kelompok			92	26.230.000	92	99.805.000	70	14.274.000	
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK -R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKB	Kelompok			92	171.380.000	92	175.005.000	77	68.810.000	
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKL	Kelompok			44		44		40		
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKR	Kelompok			46		46		38		
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan UPPKS	Kelompok			41		41		17		
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembinaan kespro dan stunting bagi calon pengantin	Pasangan			0	-	-	-	1410	624.325.000	
				Edukasi pengasuhan 1000 HPK bagi ibu dan keluarga	Orang			0		-		2140		
JUMLAH TOTAL							-		**18.067.729.720**		**10.948.882.466**		**12.480.598.944**	

Tabel 3.3
Pencapaian Realisasi Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Presentase Capaian (%)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan		NILAI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	Skala		85	87	66		66,79	65,62			78,58	75,43	
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak		CAPAIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK													
		Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan Hak anak	Rasio KDRT	Rasio		80	83	0,0046		0,56	0,0047	0,0044		0,70	0,01	95,65
			Persentase Perlindungan perempuan dan Hak anak	Persen		60	80	100		100	100	100		167	125	100
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat		INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)													
			INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)													

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				Capaian Kinerja				Presentase Capaian (%)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perkonomian dan politik	Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	Persen		30	50	100		100	100	100		333	200	100
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terbina	Persen		30	50	100		100	100	100		333	200	100
			Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	Persen		30	50	69		10	0	65		33	-	94,20
	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK													
		Terlaksananya Kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Tingkat Kelahiran Rata -Rata	Poin		2,47	2,34	2,34		2,34	2,37	1,50		94,74	101,28	64,10

Tabel 3.4
Pencapaian Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
	Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.371.088.274**	**5.975.951.784**	93,80	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**185.150.000**	**142.623.000**	77,03	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.538.000	102.723.000	82,48	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	22.600.000	15.600.000	69,03	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	4.875.000	3.490.000	71,59	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	6.000.000	3.405.000	56,75	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.987.000	5.080.000	84,85	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.150.000	12.325.000	58,27	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.959.035.936**	**4.732.250.949**	95,43	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.880.432.936	4.658.517.949	95,45	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.555.000	44.910.000	92,49	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.048.000	28.823.000	95,92	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah	**31.200.000**	**31.200.000**	100,00	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.200.000	31.200.000	100,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**238.412.272**	**234.916.000**	98,53	
			Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.204.488	6.175.400	99,53	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.528.488	45.333.500	99,57	
			Penyediaan Peralatan RumahTangga	15.584.262	15.571.100	99,92	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.480.000	30.480.000	100,00	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.671.050	28.950.900	97,57	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	9.048.984	9.048.000	99,99	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.895.000	99.357.100	97,51	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Keterangan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**145.005.561**	**122.615.500**	84,56	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.005.561	122.615.500	84,56	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**418.740.000**	**333.162.435**	79,56	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.800.000	8.800.000	100,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.000.000	79.562.435	54,12	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.940.000	244.800.000	93,10	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	**393.544.505**	**379.183.900**	96,35	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.382.505	351.021.900	96,07	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.090.000	19.090.000	100,00	
			Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.072.000	9.072.000	100,00	
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	**Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan Hak anak**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**306.763.089**	**237.355.930**	77,37	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**306.763.089**	**237.355.930**	77,37	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga PenyediaLayanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	112.867.478	85.866.180	76,08	
			Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	193.895.611	151.489.750	78,13	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**222.930.000**	**179.108.310**	80,34	
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**55.090.000**	**54.590.000**	99,09	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.090.000	54.590.000	99,09	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**167.840.000**	**124.518.310**	74,19	
			Penyediaan Layanan PengaduanMasyarakat bagi PerempuanKorban Kekerasan KewenanganKabupaten/Kota	100.590.000	84.190.000	83,70	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Keterangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.250.000	40.328.310	59,97	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**105.339.500**	**102.189.500**	**97,01**	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**105.339.500**	**102.189.500**	**97,01**	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.339.500	102.189.500	97,01	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER	**103.450.000**	**95.631.000**	**92,44**	
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**103.450.000**	**95.631.000**	92,44	
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	53.450.000	52.950.000	99,06	
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data diKewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	42.681.000	85,36	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**146.699.601**	**112.514.550**	**76,70**	
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**146.699.601**	**112.514.550**	**76,70**	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	146.699.601	112.514.550	76,70	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**364.964.500**	**182.475.660**	**50,00**	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**303.015.000**	**130.226.160**	**42,98**	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.840.000	30.308.360	72,44	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	261.175.000	99.917.800	38,26	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**61.949.500**	**52.249.500**	84,34	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Keterangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.949.500	52.249.500	84,34	
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perkonomian dan politik	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**1.383.617.192**	**1.289.187.250**	93,18	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerakdi Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1.383.617.192**	**1.289.187.250**	**93,18**	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.085.738.192	1.044.046.750	96,16	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	70.854.500	59.554.500	84,05	
			Fasilitasi Pemerintah Desadalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	46.765.500	43.515.500	93,05	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	180.259.000	142.070.500	78,81	
	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Terlaksananya Kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan keluarga	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**95.195.239**	**92.198.600**	**96,85**	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**22.730.239**	**20.723.600**	91,17	
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	22.730.239	20.723.600	91,17	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**72.465.000**	**71.475.000**	98,63	
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	72.465.000	71.475.000	98,63	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**3.811.022.310**	**3.248.415.360**	85,24	
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**674.408.250**	**615.580.031**	91,28	
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.076.250	79.056.250	98,73	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Keterangan
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	140.156.000	133.298.500	95,11	
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	454.176.000	403.225.281	88,78	
			Pendayagunaan Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**482.797.500**	**480.527.500**	**99,53**	
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	165.997.500	164.147.500	98,89	
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	316.800.000	316.380.000	99,87	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB diDaerah Kabupaten/Kota	**2.161.472.560**	**1.783.754.829**	**82,52**	
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	154.432.000	140.700.000	91,11	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	925.654.560	796.990.400	86,10	
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.054.089.000	826.064.429	78,37	
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	27.297.000	20.000.000	73,27	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**492.344.000**	**368.553.000**	74,86	
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan danP embinaan Kesertaan Ber-KB	100.075.000	92.820.000	92,75	
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	75.085.000	55.735.000	74,23	
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	317.184.000	219.998.000	69,36	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA (KS)	**1.042.476.000**	**965.571.000**	92,62	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**1.042.476.000**	**965.571.000**	92,62	
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja(BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) BinaKeluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	14.662.000	12.862.000	87,72	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Keterangan
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	296.500.000	245.300.000	82,73	
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	19.224.000	14.274.000	74,25	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	83.690.000	68.810.000	82,22	
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	628.400.000	624.325.000	99,35	
TOTAL				**13.953.545.705**	**12.480.598.944**	**89,44**	

Tabel 3.5
Pencapaian Realisasi Serapan Anggaran Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Anggaran (Rp)				Capaian Anggaran (Rp)				Presentase Capaian Anggaran (%)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan		NILAI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			**1.502.000.000**	**1.102.772.800**	**6.371.088.274**		**1.428.197.409**	**1.069.120.809**	**5.975.951.784**		**95**	**97**	**94**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	CapaianHasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	Skala		1.502.000.000	1.102.772.800	6.371.088.274		1.428.197.409	1.069.120.809	5.975.951.784		95,09	96,95	93,80
	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak		CAPAIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			**1.110.000.000**	**587.169.000**	**943.383.601**		**998.066.975**	**559.461.050**	**671.919.020**		**90**	**95**	**71**
		Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan Hak anak	Rasio KDRT	Rasio		1.110.000.000	587.169.000	943.383.601		998.066.975	559.461.050	671.919.020		89,92	95,28	71,22
			Persentase Perlindungan perempuan dan Hak anak	Persen												
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat		INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)			**6.200.000.000**	**1.900.478.400**	**1.690.380.281**		**6.148.504.200**	**1.722.661.800**	**1.526.543.180**		**198**	**181**	**171**
			INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)													
		Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam perkonomian dan politik	Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	Persen		833.000.000	453.430.400	306.763.089		821.186.700	408.281.800	237.355.930		98,58	90,04	77,37
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terbina	Persen		5.367.000.000	1.447.048.000	1.383.617.192		5.327.317.500	1.314.380.000	1.289.187.250		99,26	90,83	93,18
			Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	Persen												

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Anggaran (Rp)				Capaian Anggaran (Rp)				Presentase Capaian Anggaran (%)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK			**5.005.654.000**	**3.812.684.700**	**4.948.693.549**	**-**	**4.670.322.492**	**3.576.917.541**	**4.306.184.960**	**-**	**93**	**94**	**87**
		Terlaksananya Kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Tingkat Kelahiran Rata-Rata /RJAK			5.005.654.000	3.812.684.700	4.948.693.549		4.670.322.492	3.576.917.541	4.306.184.960		93,30	93,82	87,02

RENCANA AKSI TAHUN 2021

SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB
								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan lingkup pemerintah daerah	Meningkatnya pengelolaan penunjang urusan pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstradan Renja Perangkat Daerah, IKU, PK dan Profil OPD	Dokumen	4	124.538.000													
			Terlaksananya Koordiinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	22.600.000													
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.875.000													
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.000.000													
			Terlaksananya Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.987.000													
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah evaluasi renja (LPPD OPD, LAKIP OPD	Dokumen	2	21.150.000													
		Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan PNS	Bulan	12	4.880.432.936													
			Terlaksananya Koordinasi dan enyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	48.555.000													
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Dokumen	2	30.048.000													
		Pengadaan BMD yang Berkualitas	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Unit	10	145.005.561													
		Peningkatan Kualitas Pemeliharaan BMD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barag Milik Daerah	Jumlah bulan jasa pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12	365.382.505													
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor	Bulan	12	19.090.000													

SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB
								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	Bulan	12	9.072.000													
		Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	6.204.488													
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan aat tulis kantor	Bulan	12	45.528.488													
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan kebutuhan peralatan rumah tangga	Bulan	12	15.584.262													
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulanpenyediaan makanan dan minuman rapat dan harian pegawai	Bulan	12	30.480.000													
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	29.671.050													
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	Bulan	12	9.048.984													
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Bulan	12	101.895.000													
		Peningkatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat dan jumlah materai	Bulan	12	8.800.000													
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan kebutuhan telepon, internet dan listrik	Bulan	12	147.000.000													
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	262.940.000													
Pelayanan yang terintegrasi pada perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan kapasitas pemberdayaan perempuan DWP	Kegiatan	1	112.867.478													
				Jumlah kegiatan pembinaan kapasitas pemberdayaan perempuan GOW	Kegiatan	1														
Peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				Jumlah kegiatan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan	Kegiatan	1														

SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB
								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
		Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		Jumlah kegiatan pelatihan Dharma Wanita Persatuan	Kegiatan	2														
				Jumlah kegiatan seminar Dharma Wanita Persatun	Kegiatan	1														
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kegiatan P2WKSS yang di bina melalui program P2WKSS di Kelurahan	Kegiatan	2	193.895.611														
	PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan	1	55.090.000													
		Penyediaan LayananRujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Penyediaan LayananPengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuankorban kekerasan	Layanan Pengaduan	100	100.590.000													
			Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Layanan	100	67.250.000													
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah kegiatan PUSPAGA di Kecamatan	Kegiatan	1	105.339.500													
				Jumlah kegiatan GSI di Kecamatan	Kegiatan	1														
				Jumlah kegiatan P2TP2A di Kecamatan	Kegiatan	1														
	Peningkatan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tersedianya Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Penyediaan Data Gender dan Anak	Jumlah laporan data terpilah Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Laporan	1	53.450.000													
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	Jumlah laporan IPG dan IDG	Laporan	1	50.000.000													
	PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	Terlaksananya Advokasi Kebijkan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah kegiatan forum anak di tingkat Kota Serang dan Kelurahan	Kegiatan	3	146.699.601													
				Jumlah kegiatan Peringtan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Serang	Kegiatan	1														

SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB
								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah pengaduan perlindungan khusus anak	Kasus	30	41.840.000													
			Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kegiatan pendampingan kasus anak yang tertangani	Kegiatan	75	261.175.000													
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kegiatan pembentukan pengurus PATBM di Kelurahan	Kegiatan	10	61.949.500													
Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Hukum Adat	PENINGKATAN KUALITAS PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kegiatan karang taruna yang terbina	Kegiatan	1	1.085.738.192													
				Jumlah kegiatan LPM yang terbina	Kegiatan	1														
				Jumlah kegiatan posyandu yang terbina	Kegiatan	1														
				Jumlah kegiatanpenilaian Lomba Kampung Resik lan Aman	Kegiatan	3														
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Eknomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah kegiatan kelompok usaha ekonomi masyarakat yangterbentuk	Kegiatan	1	70.854.500													
				Jumlah kegiatan bintek pengemasan produk UP2K	Kegiatan	1														
			Fasilitasi PemerintahDesa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kegiatan bintek investor dan siswa	Kegiatan	1	46.765.500													
				Jumlah kegiatan bintek pengurus dan anggota posyantek	Kegiatan	1														
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok pembinaan PKK	Kegiatan	1	180.259.000													
				Jumlah peserta bina wilayah PKK	Kegiatan	6														
				Jumlah peserta jambore PKK tingkat Kota	Kegiatan	0														
				Jumlah peserta kegiatan 10 program pokok PKK	Kegiatan	1														

SASARAN STRATEGIS OPD	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	RENCANA PELAKSANAAN												PENANGGUNG JAWAB
								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
				Jumlah peserta penilaian Hari Kesatuan GerakP KK	Kegiatan	1			■					■						
Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui KB dan pemberdayaan keluarga sejahtera	Pengendalian Penduduk	Tersedianya Fasilitasi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan kependudukan ke sekolah /masyarakat	Kegiatan	2	22.730.239				■									
		Penyusunan Pemetaan Perkiran Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah kegiatan bimtek F/II/KB di Faskes Pemerintah dan Swasta	Kegiatan	12	72.465.000		■			■			■					
				Jumlah laporan F/II/KB di Faskes	Laporan	64														
	PENINGKATAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya Advokasi program KKBPK kepada stekholder dan mitra kerja	Jumlah kegiatan advokasi program KKBPK kepada stekholder dan mitra kerja	Kegiatan	2	80.076.250	■						■						
			Penyediaan dan distribusi sarana KIE Program KKBPK	Jumlah tayang informasi program bangga kencana	Kali Tayang	6	140.156.000				■									
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai KKBPK	Jumlah balai penyuluhan operasional KB yang terfasilitasi	Kegiatan	6	454.176.000				■									
		Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB	Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah laporan bulanan dalam program KKBPK	Laporan	12	165.997.500				■				■				■	
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kegiatan pembinaan kader sub PPKBD	Kegiatan	4	316.800.000				■									
		Pengendalian dan Penditribusian Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontasepsi dan sarana penunjang pelayanan KBke	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusi	Alkon		154.432.000				■									
			Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah akseptor menjadi akseptor IUD/Implant	Akseptor	837	925.654.560	■			■			■		■	■			
				Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor MOW	Akseptor	5														
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	Unit/Paket	121	1.054.089.000				■									
			Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Jumlah bulan pelayanan KB bergerak melalui muyan	Bulan	12	27.297.000	■			■			■			■			
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta	Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Jumlah akseptor pelayanan KB pada momentum TMKK, HKG, PKK KB dan Ikerjasama lintas sektor pada mitra kerja	Akseptor	350	100.075.000	■			■			■			■			

		Organisasi Kemasyarakatan	integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah kegiatan pertemuanpokja di kampung KB	Kegiatan	4	75.085.000															
			Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kebutuhan bulan operasional balaipenyuluhan KB	Bulan	6	317.184.000															
	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Konseling Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK yang terbentuk R	Kelompok	6	14.662.000															
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KIE Kit program KKBPK	Paket	10	296.500.000															
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kader poktan BKB yang di bina	Kelompok	94	19.224.000															
			Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKB	Kelompok	94	83.690.000															
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKL	Kelompok	48																
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKR	Kelompok	46																
				Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan UPPKS	Kelompok	20																
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pembinaan dan kespro kepada calon pengantIn	Kegiatan		628.400.000																
				Jumlah kegiatan edukasi pengasuhan 1000 HPK kepada ibu dan keluarga	Kegiatan																	

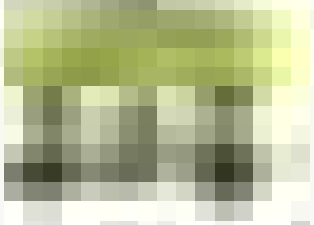

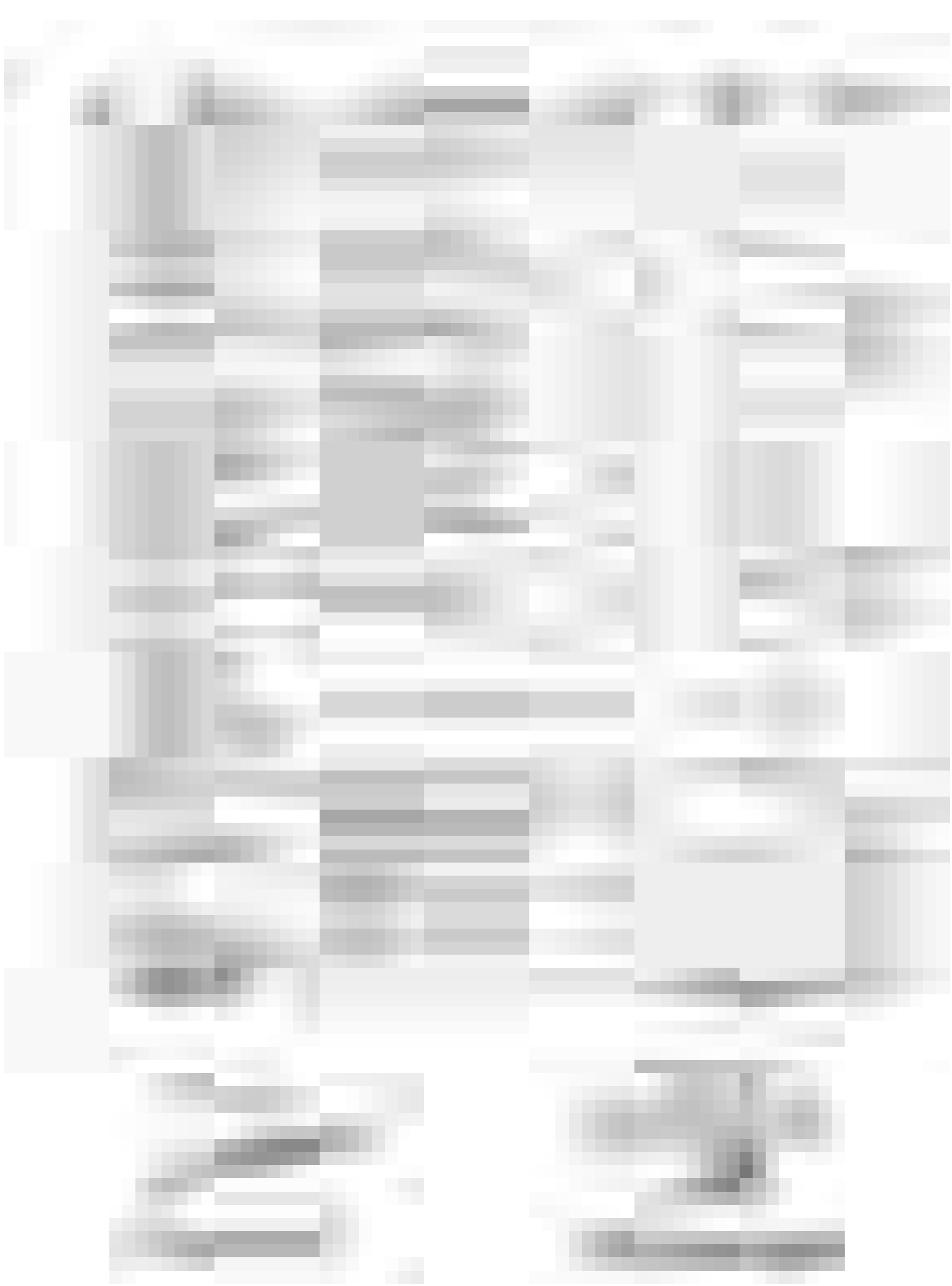

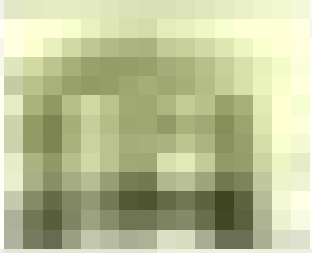

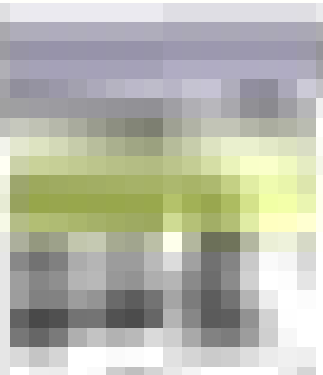

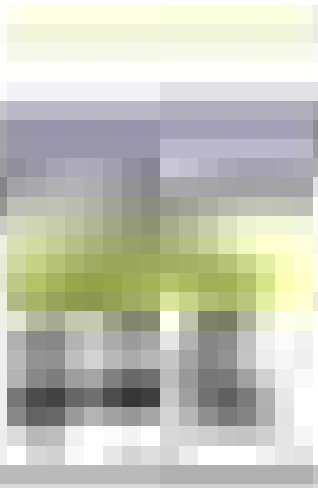

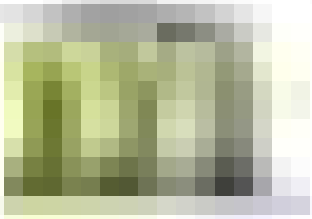

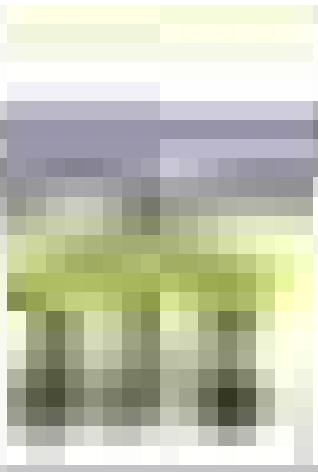

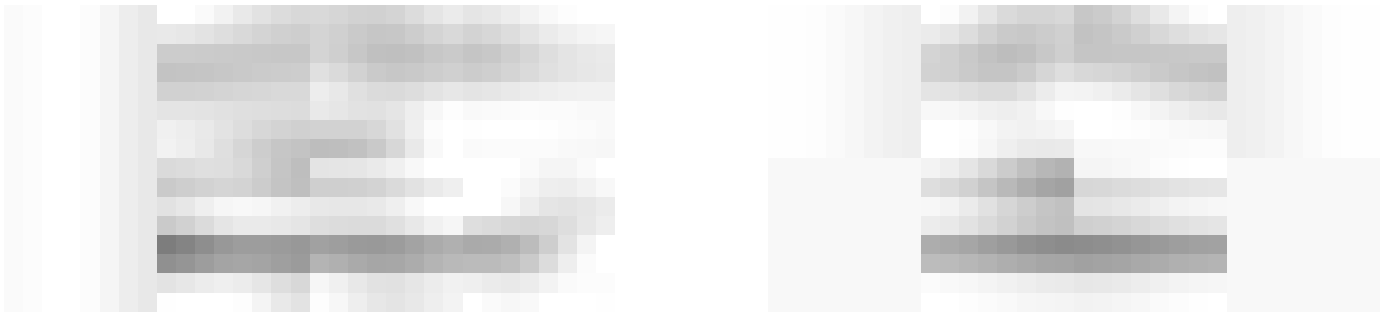

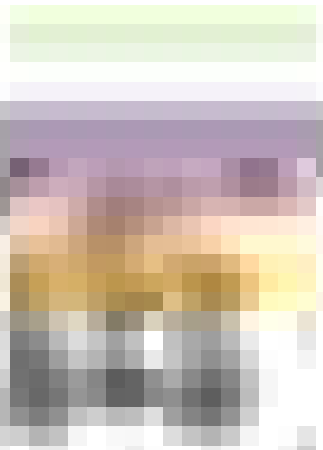

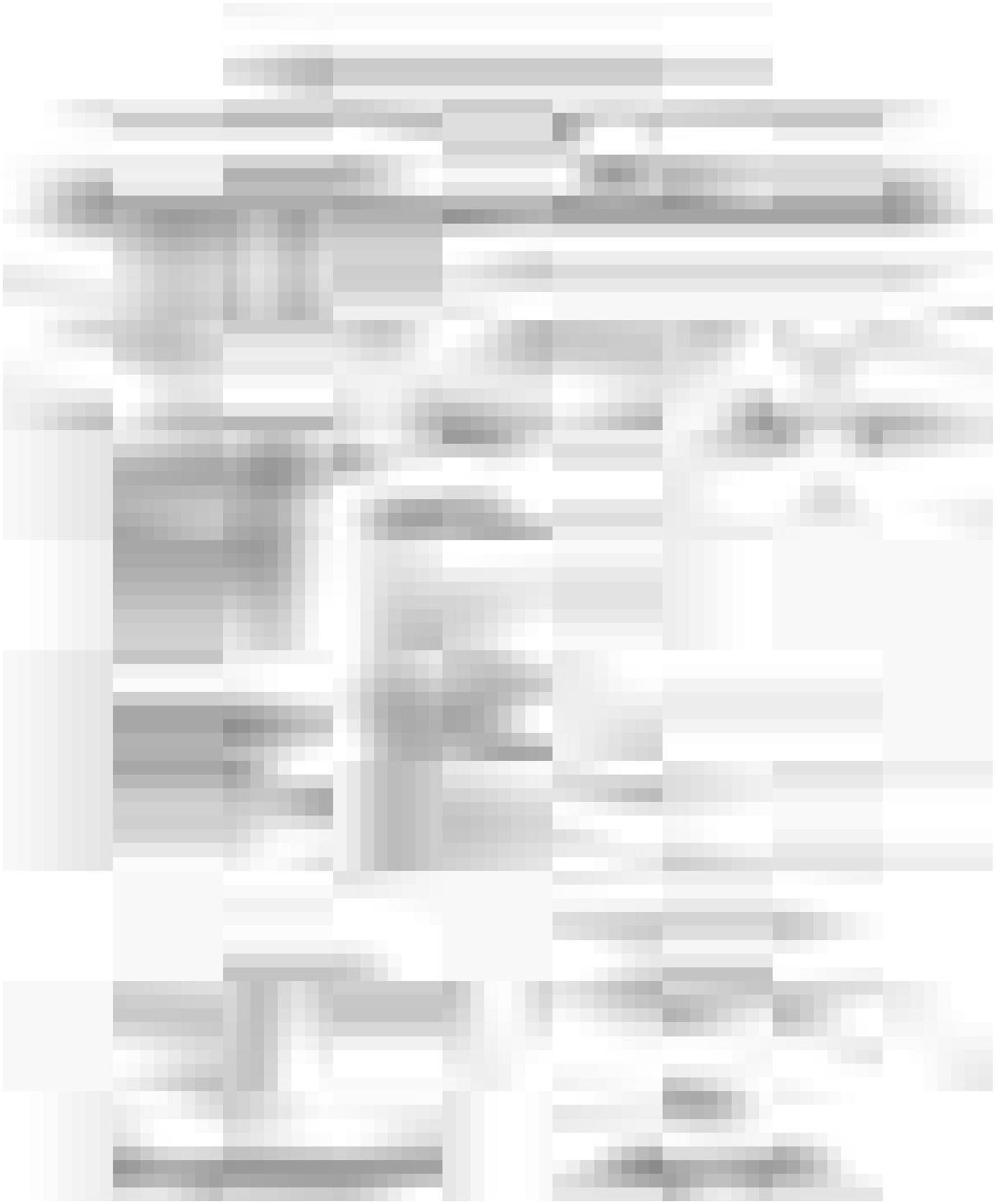

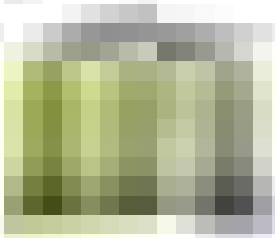

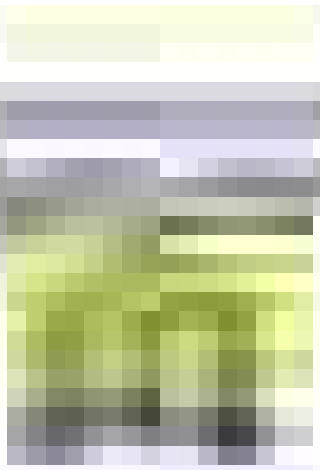

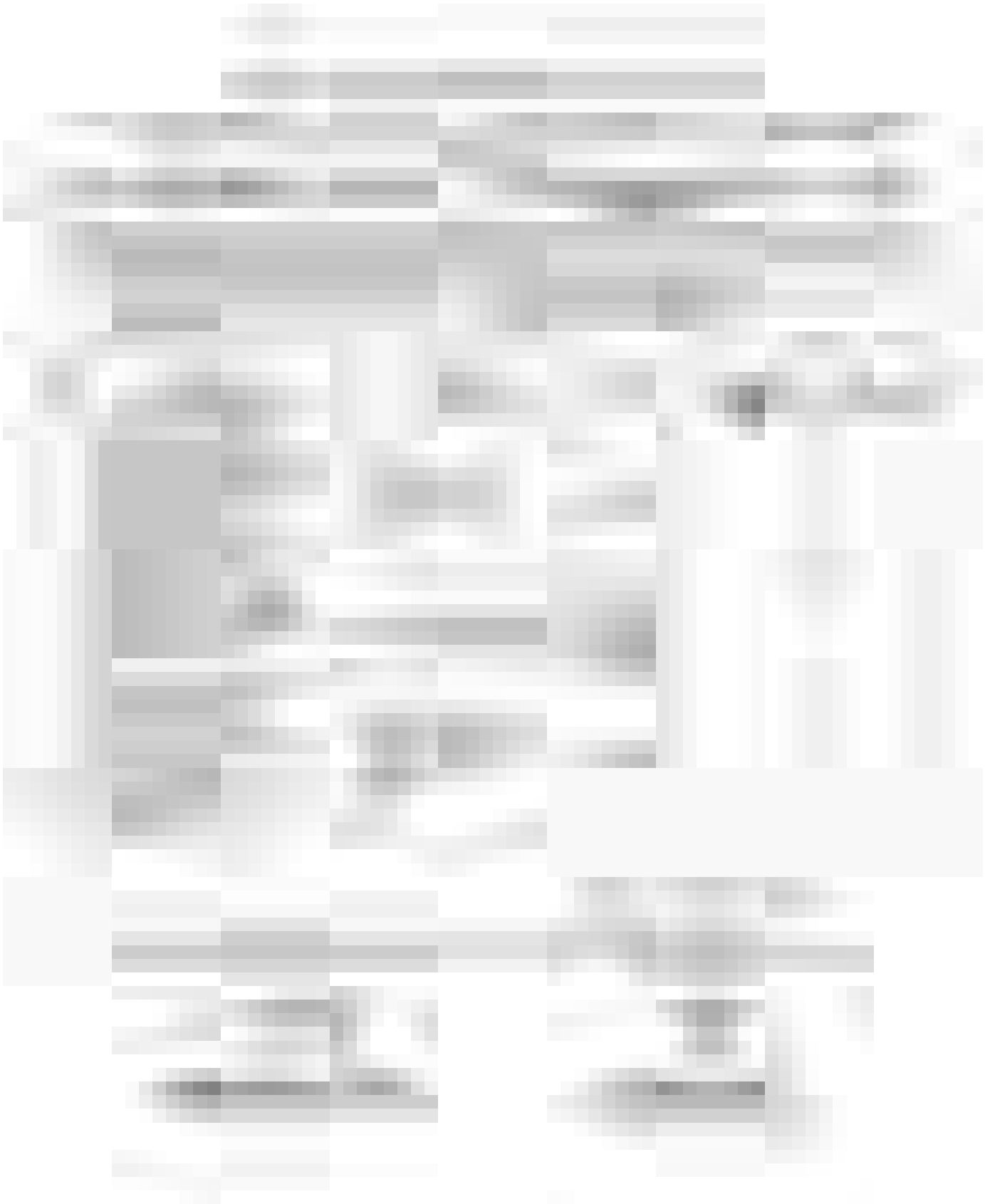

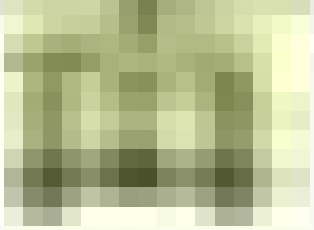

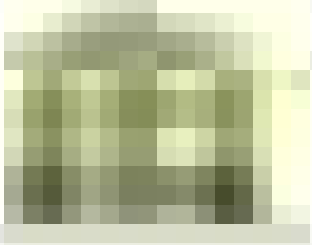

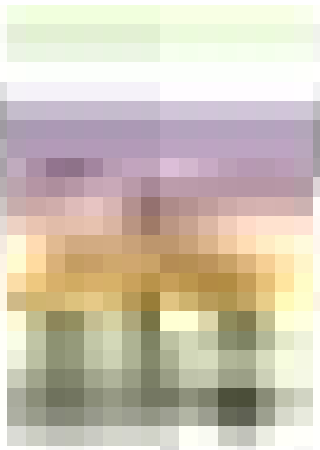

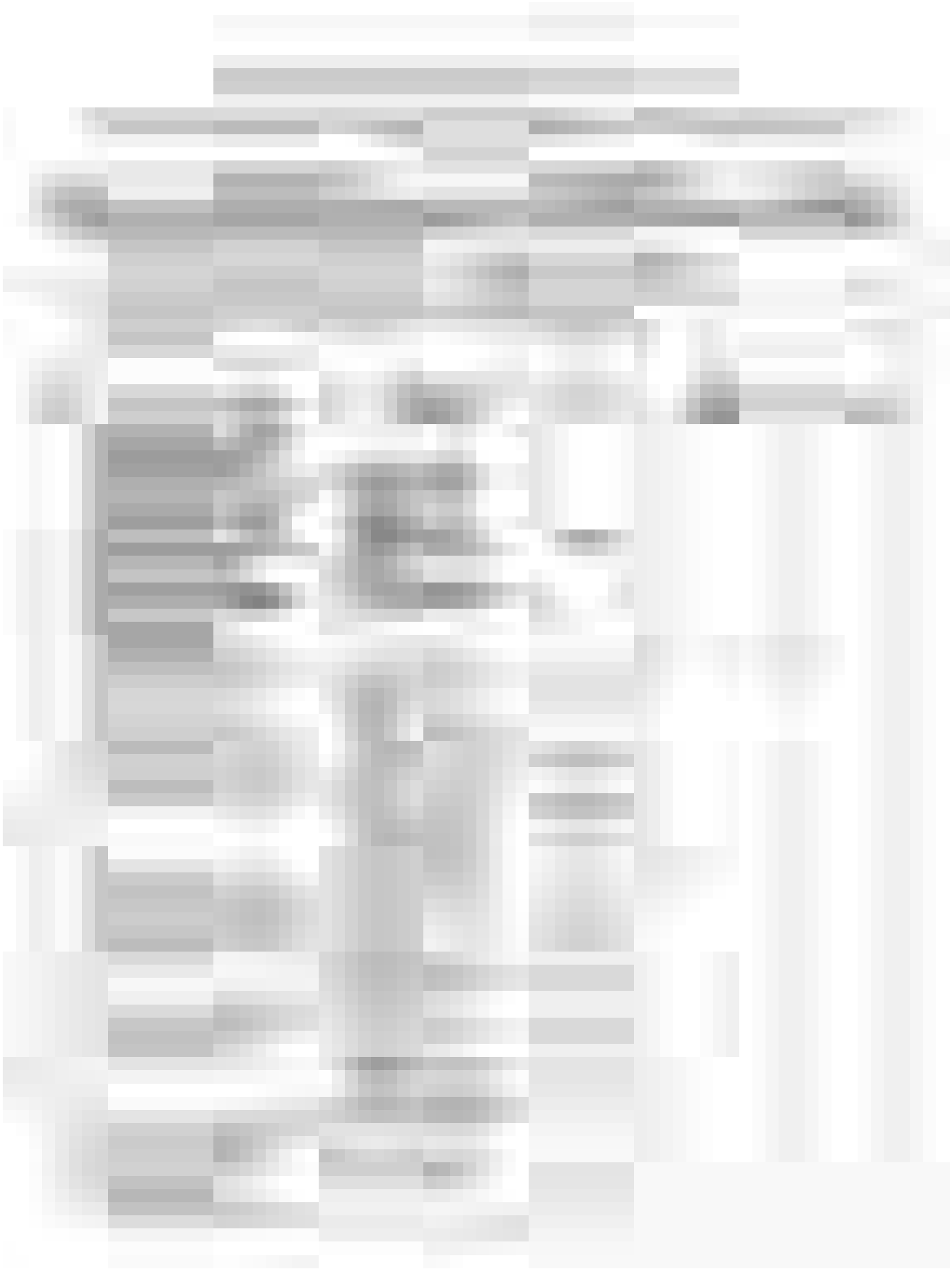

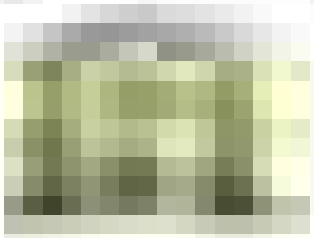

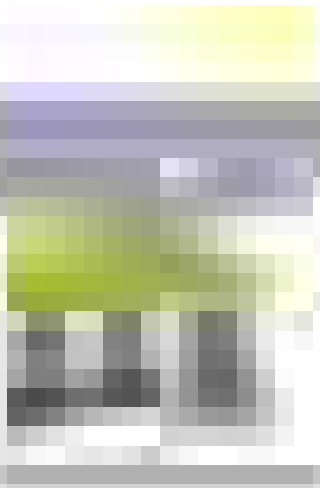

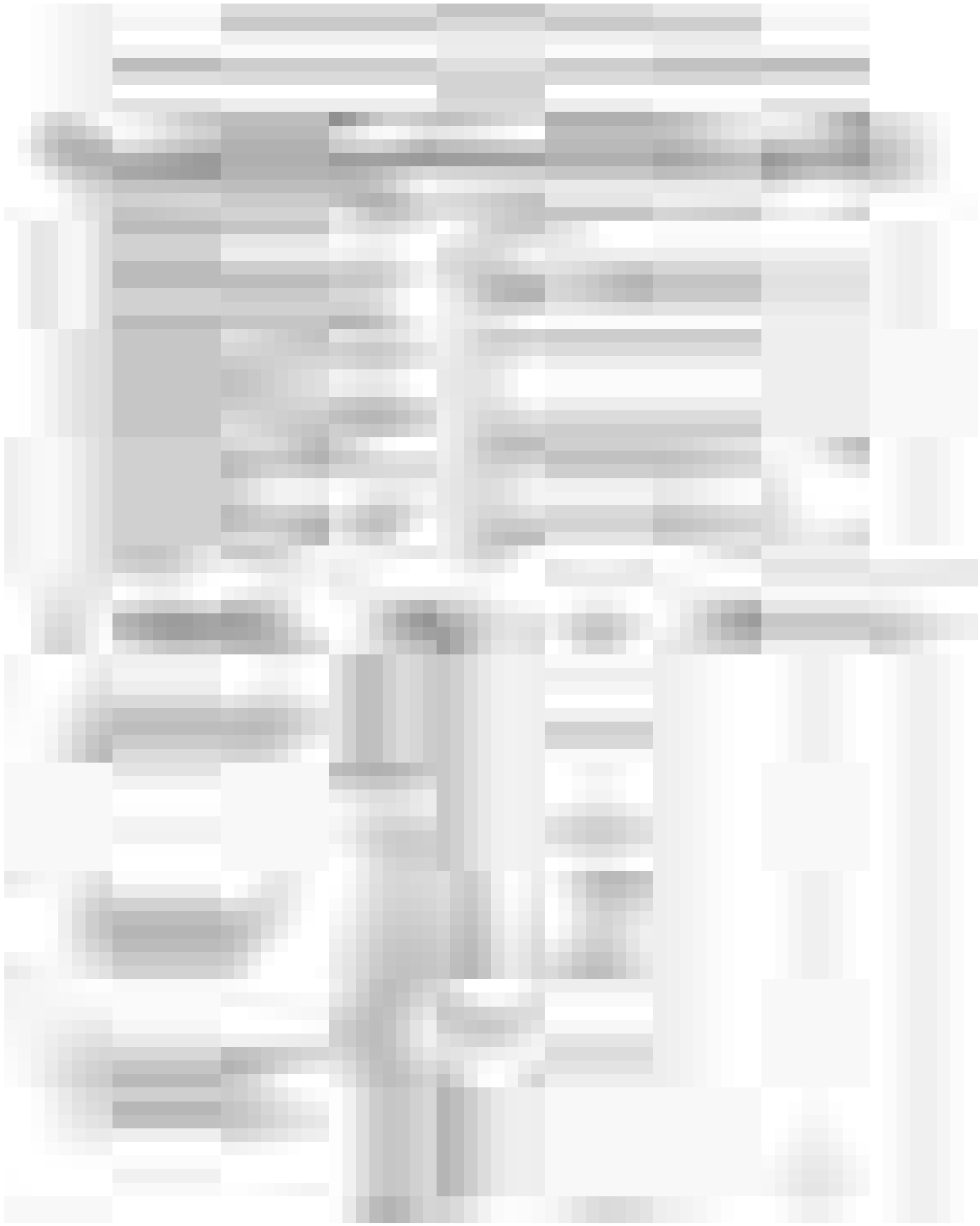

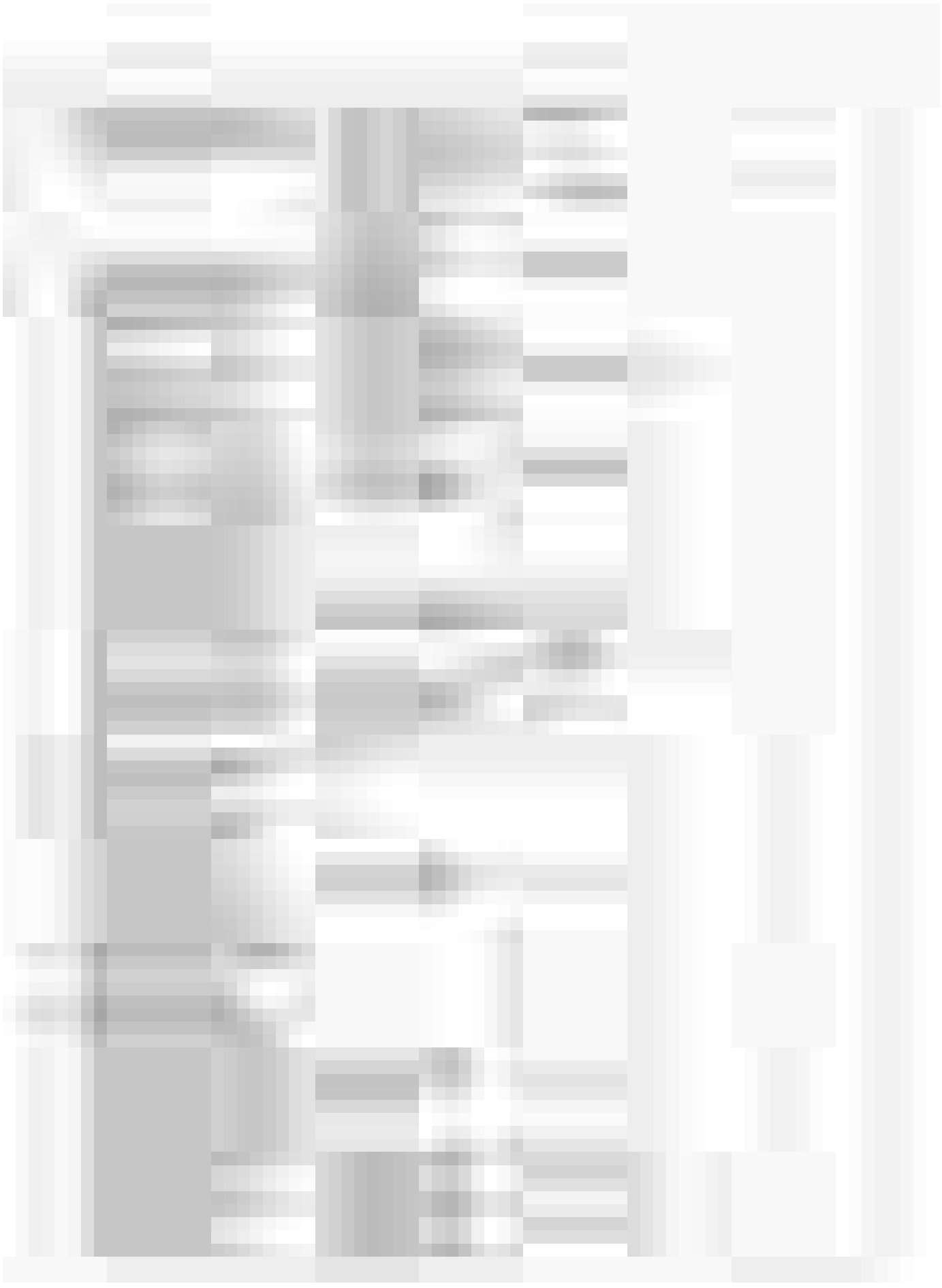

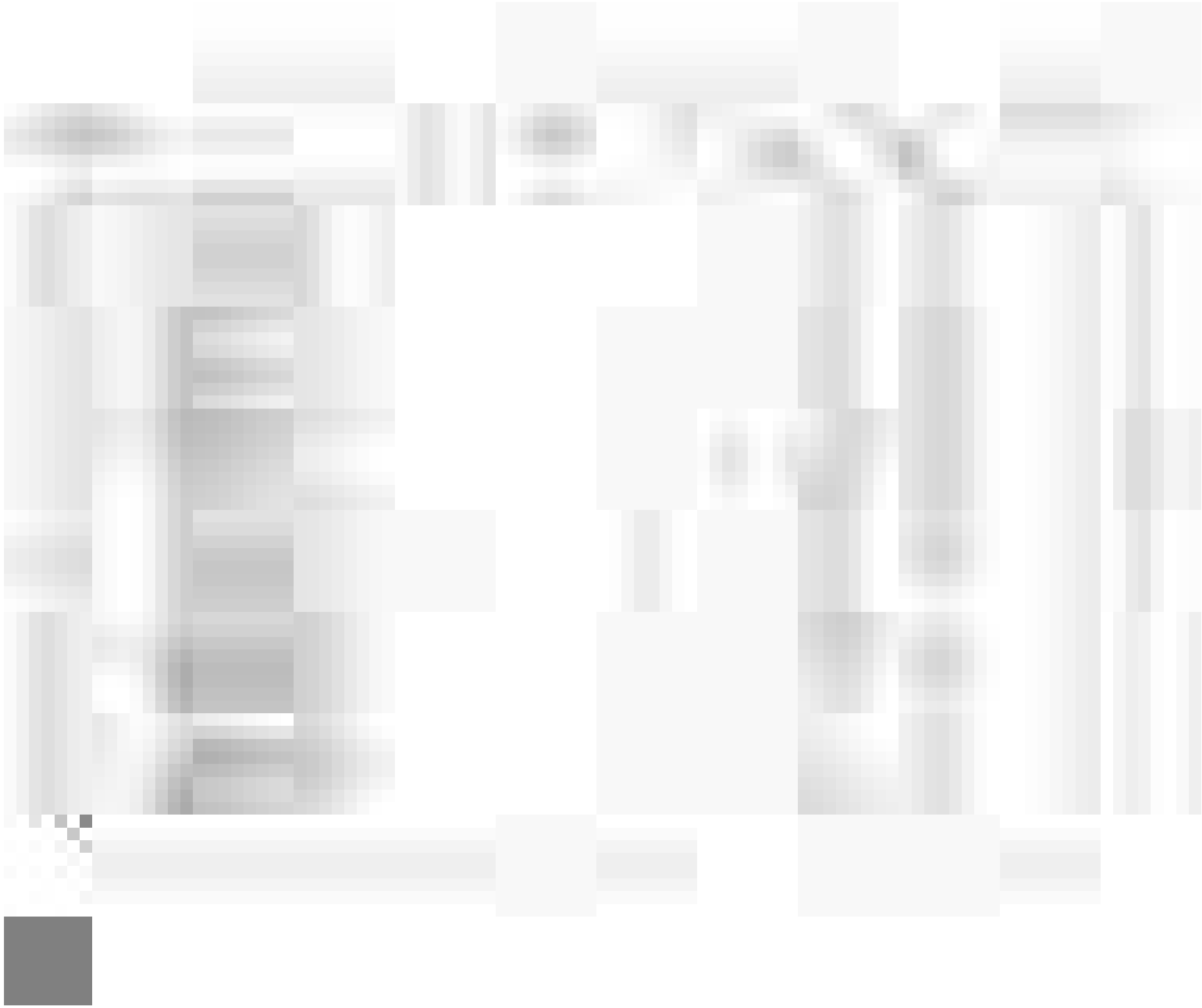

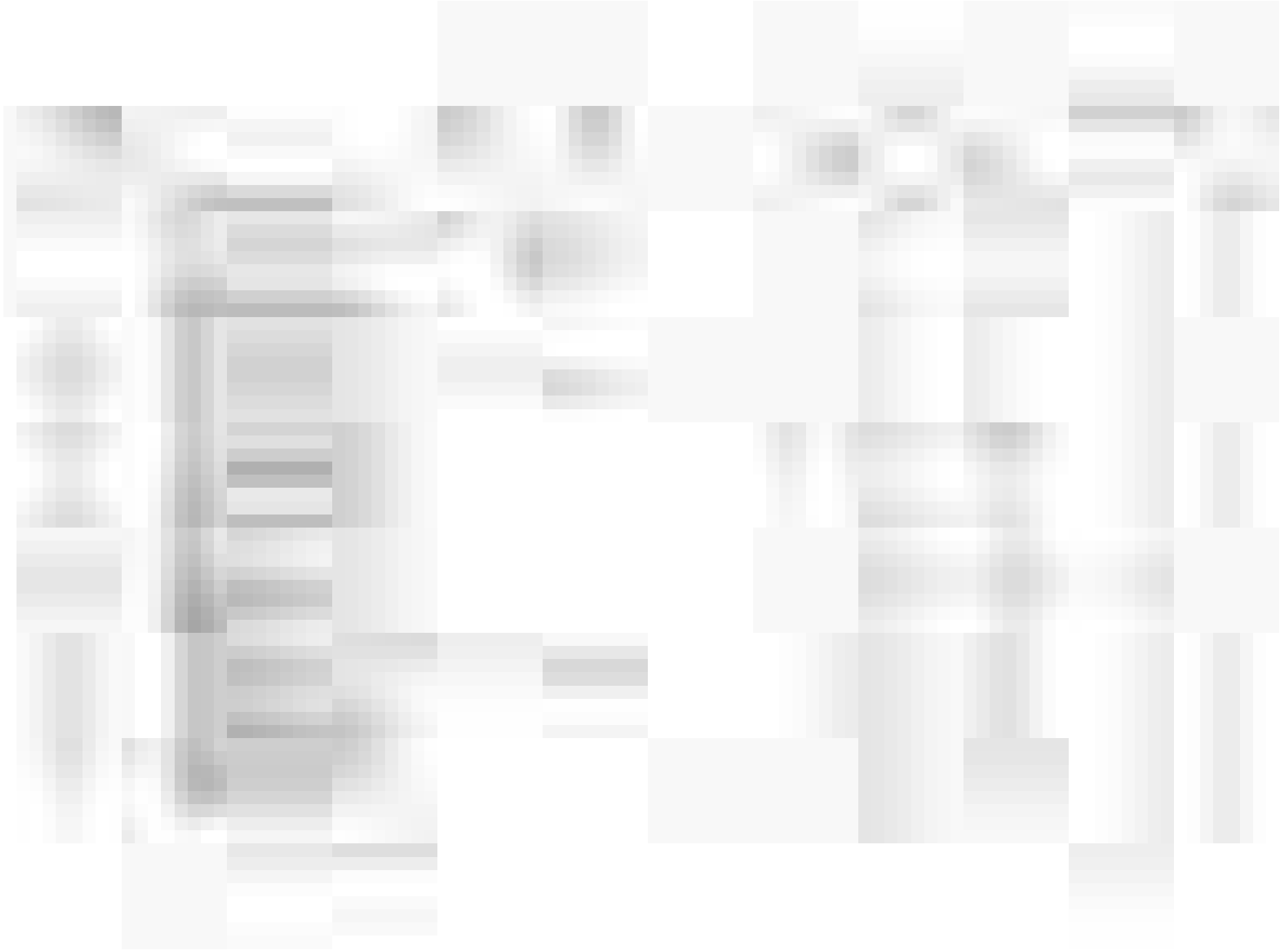

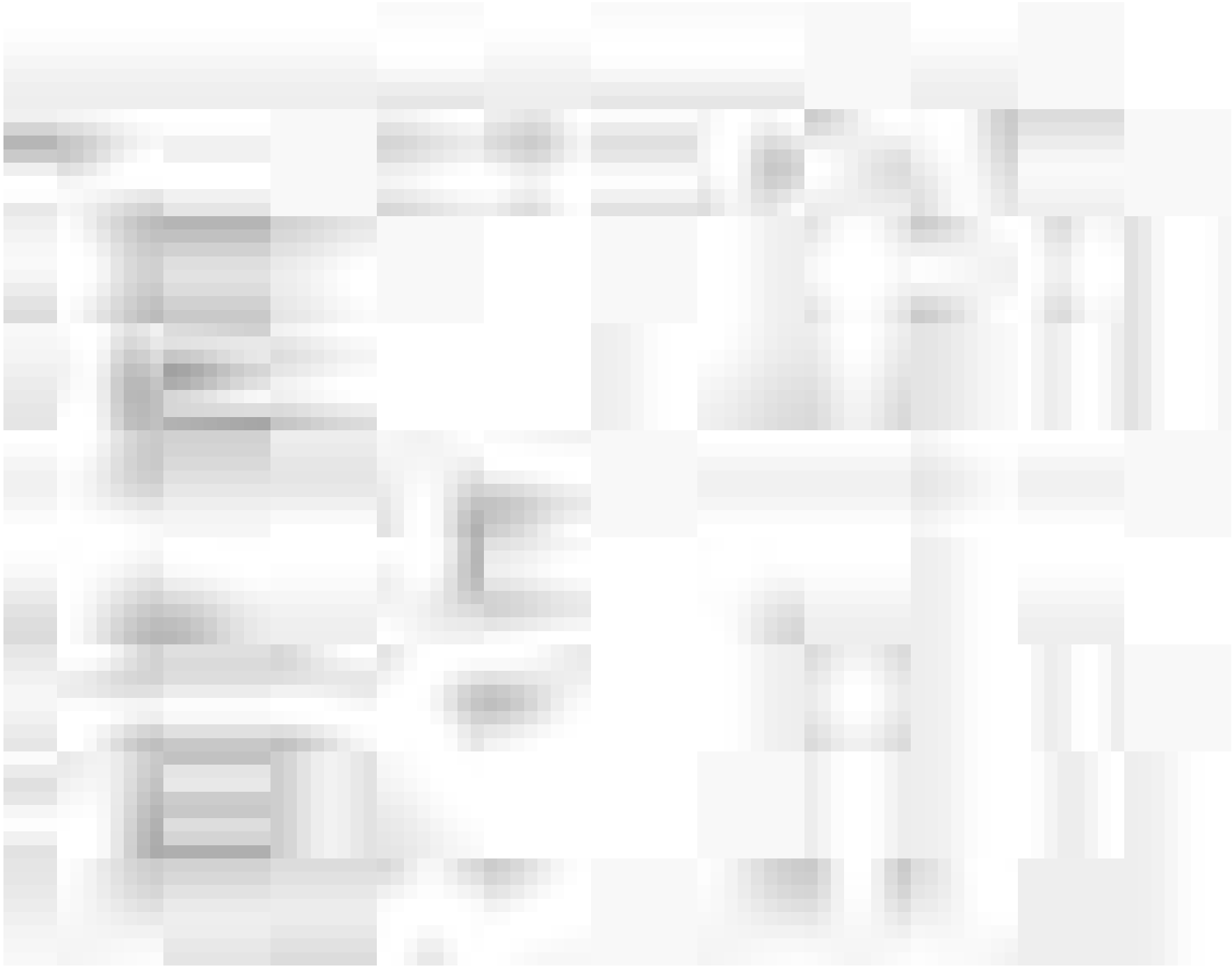

DOKUMNENTASI PELAYANAN KB

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

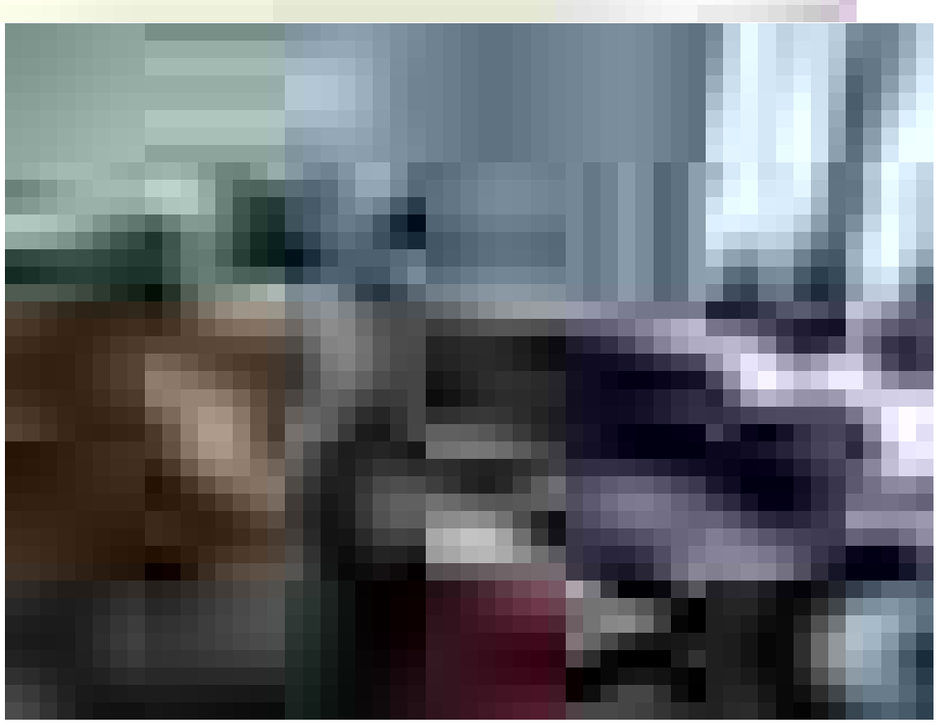

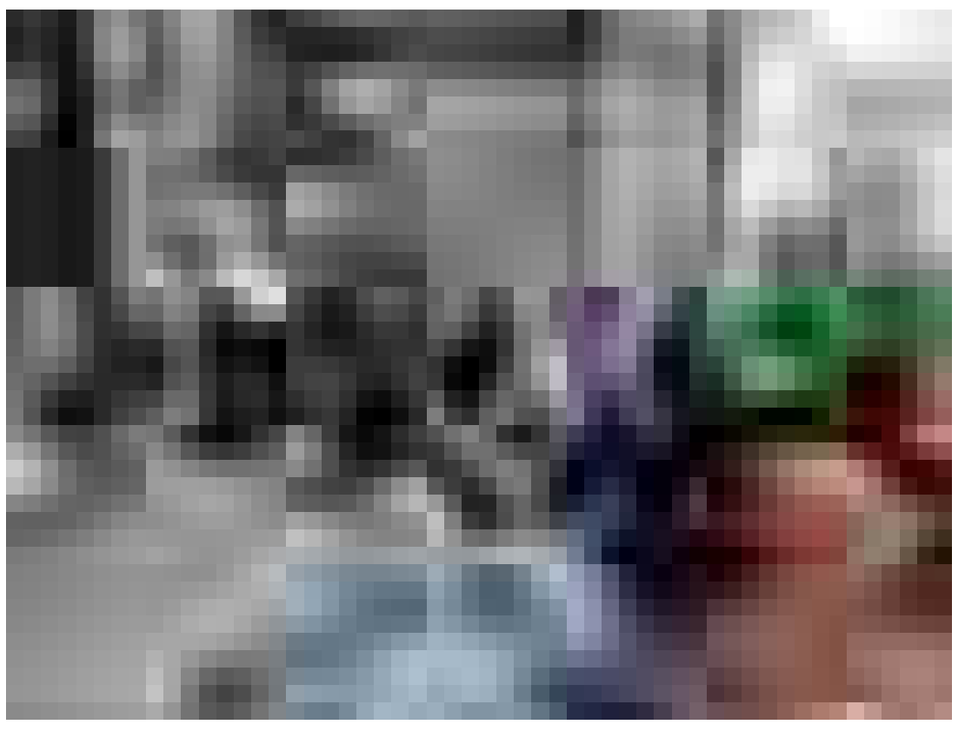

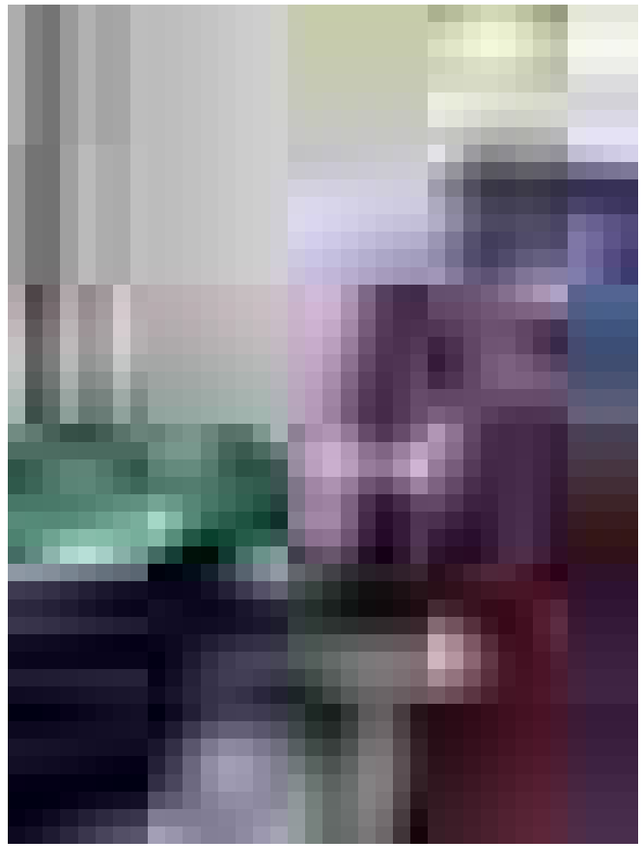

DOKUMENTASI PENANGANAN KASUS
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

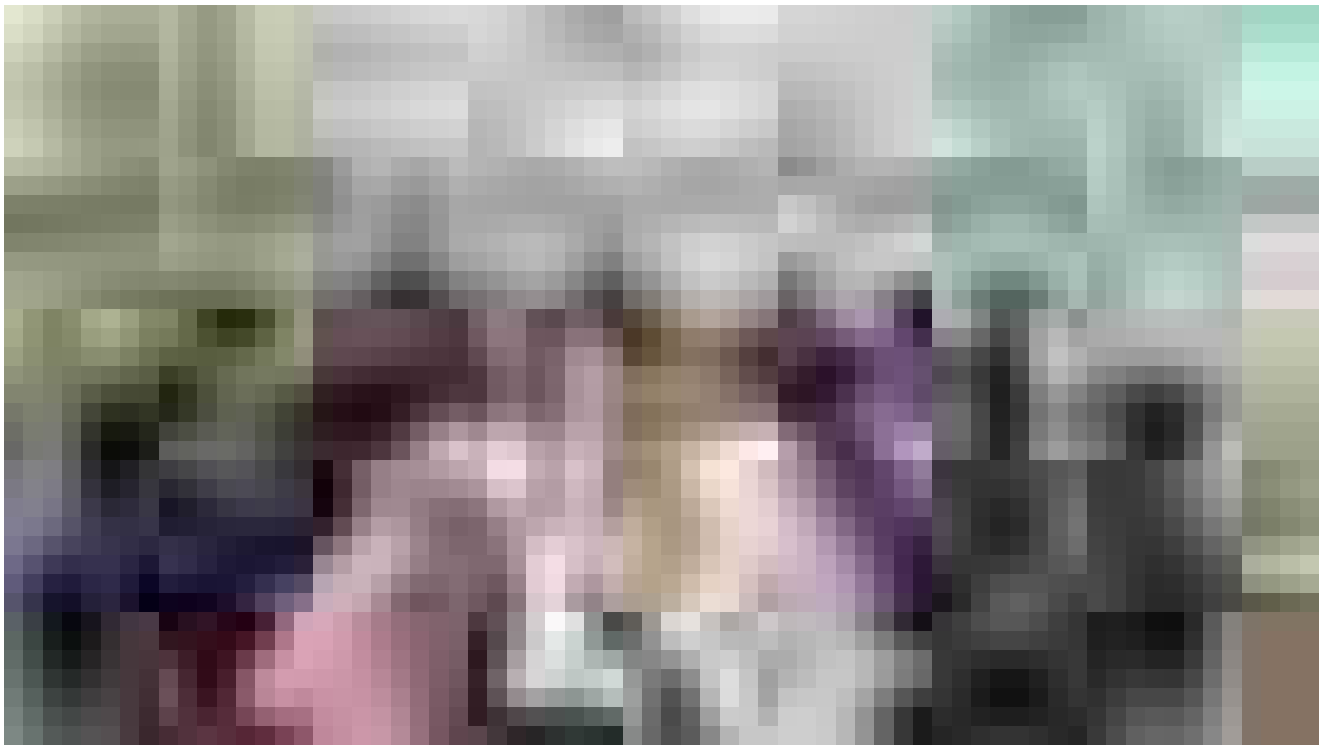

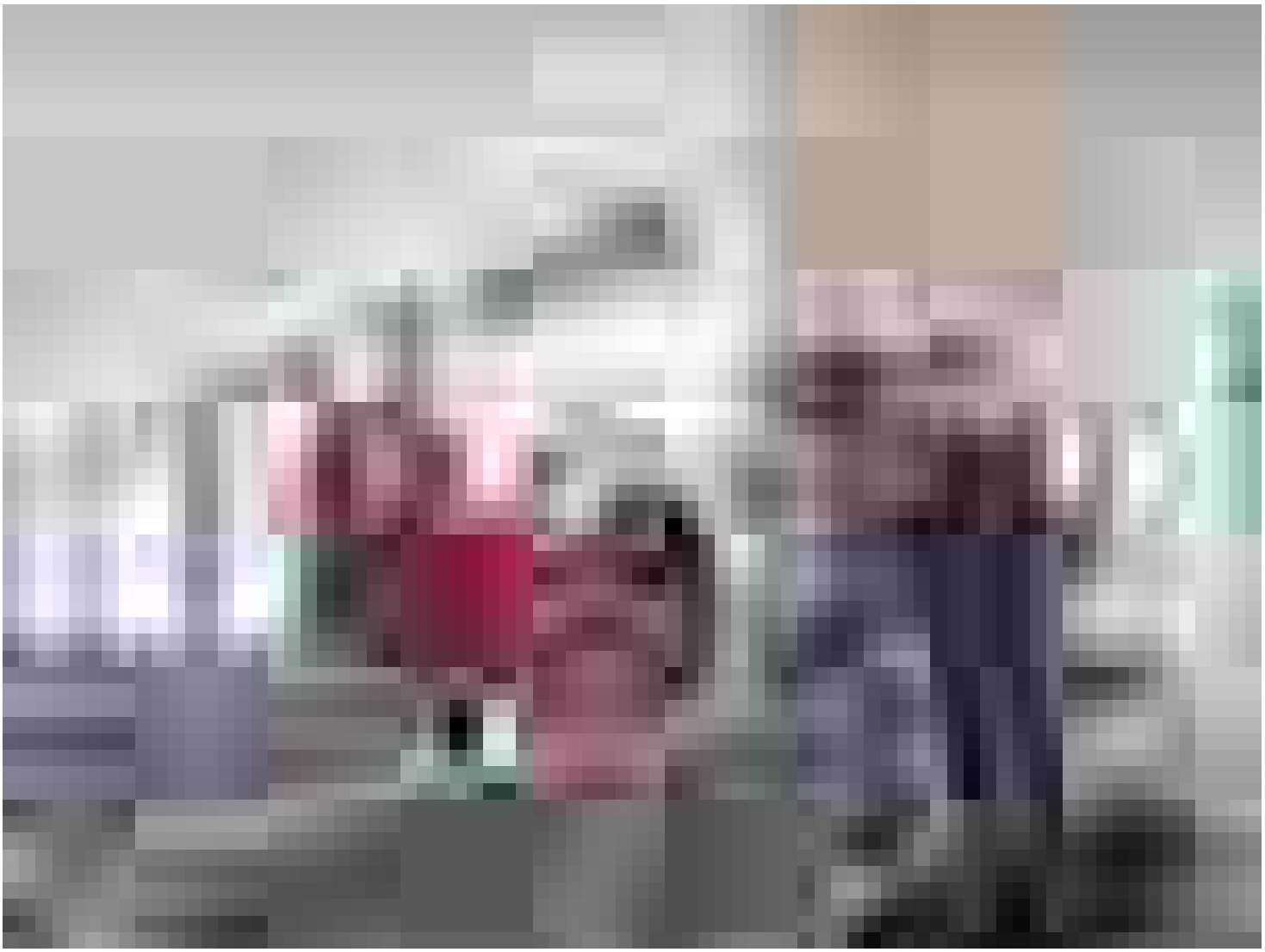

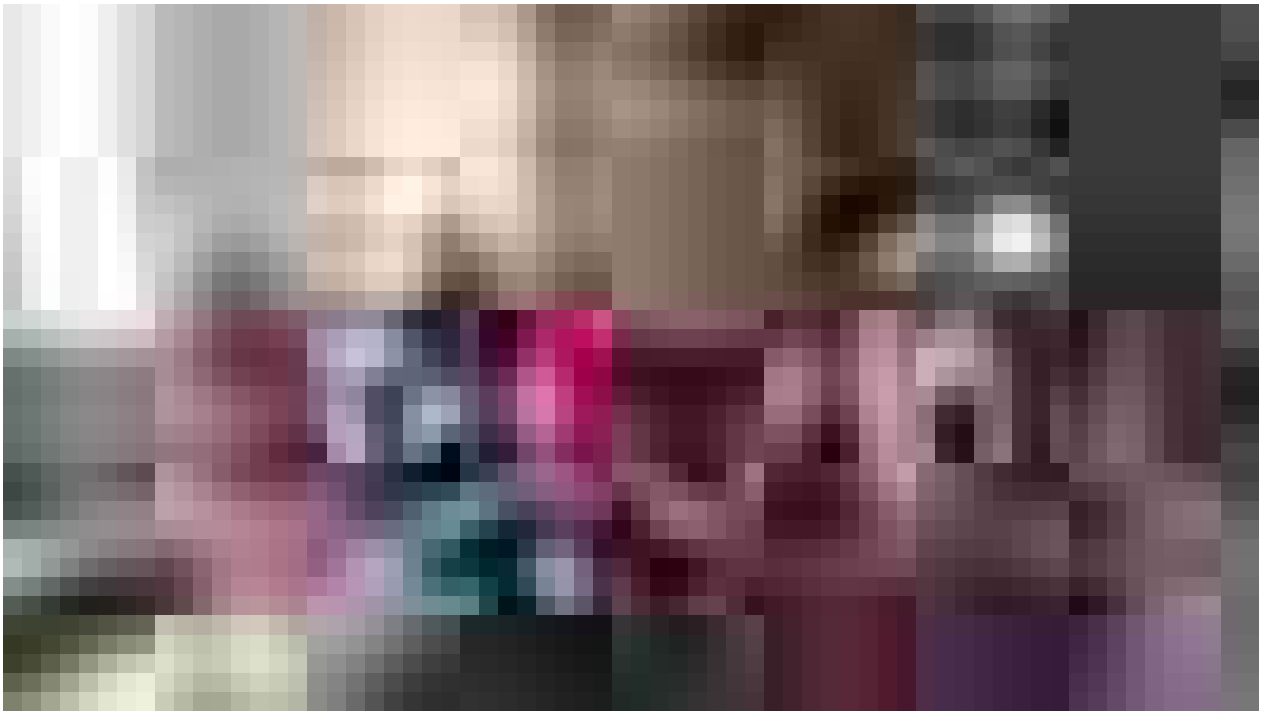

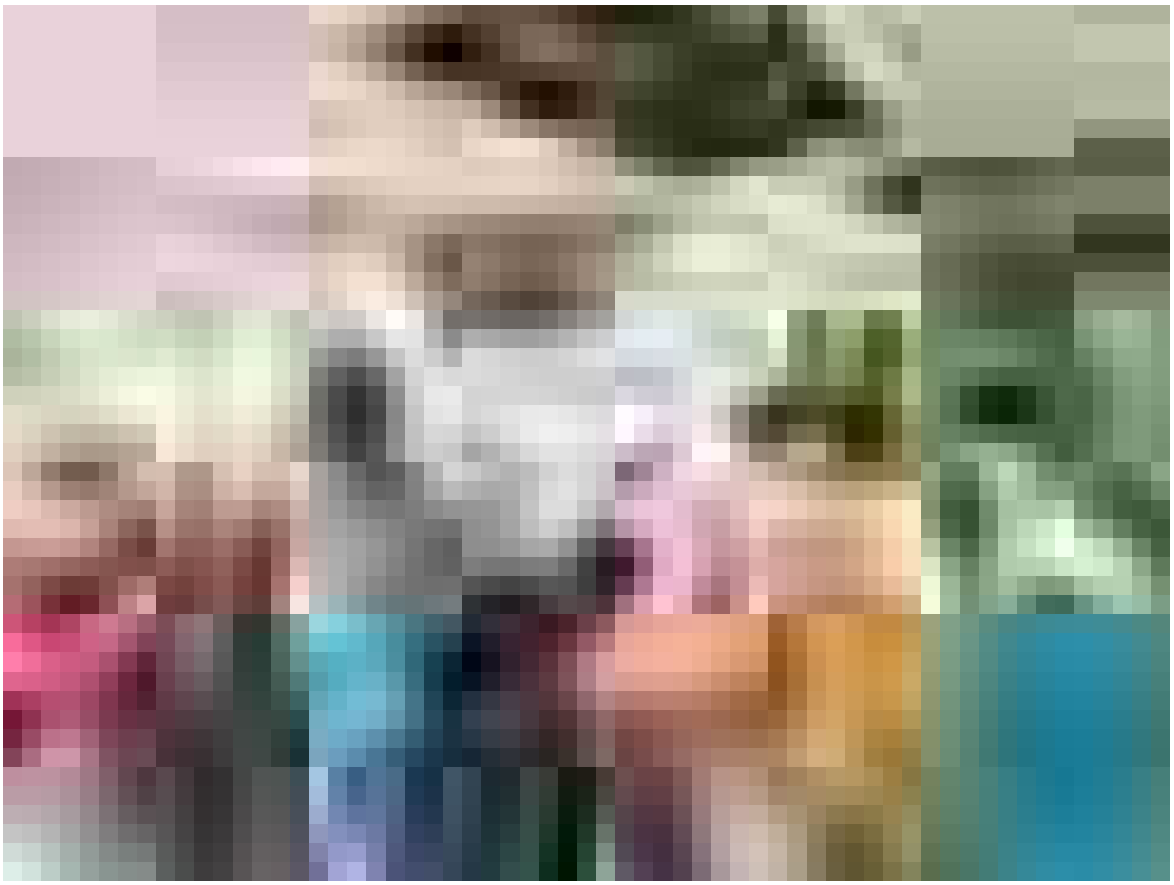

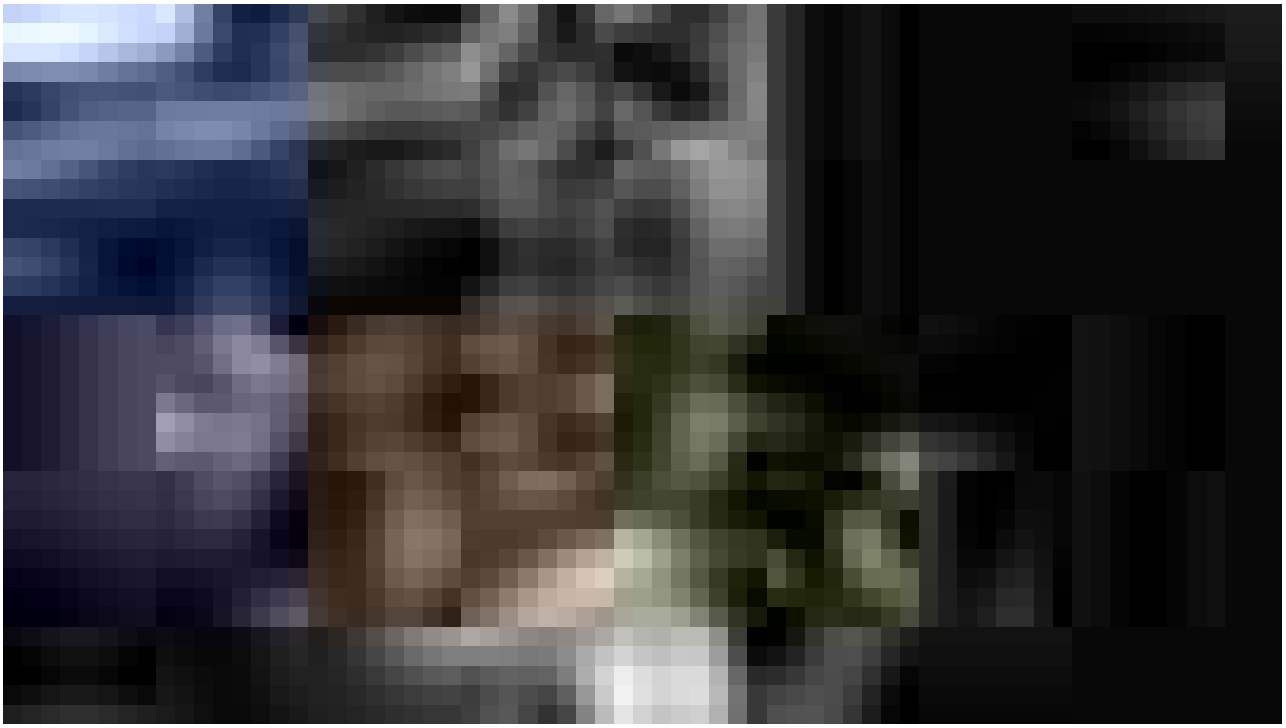

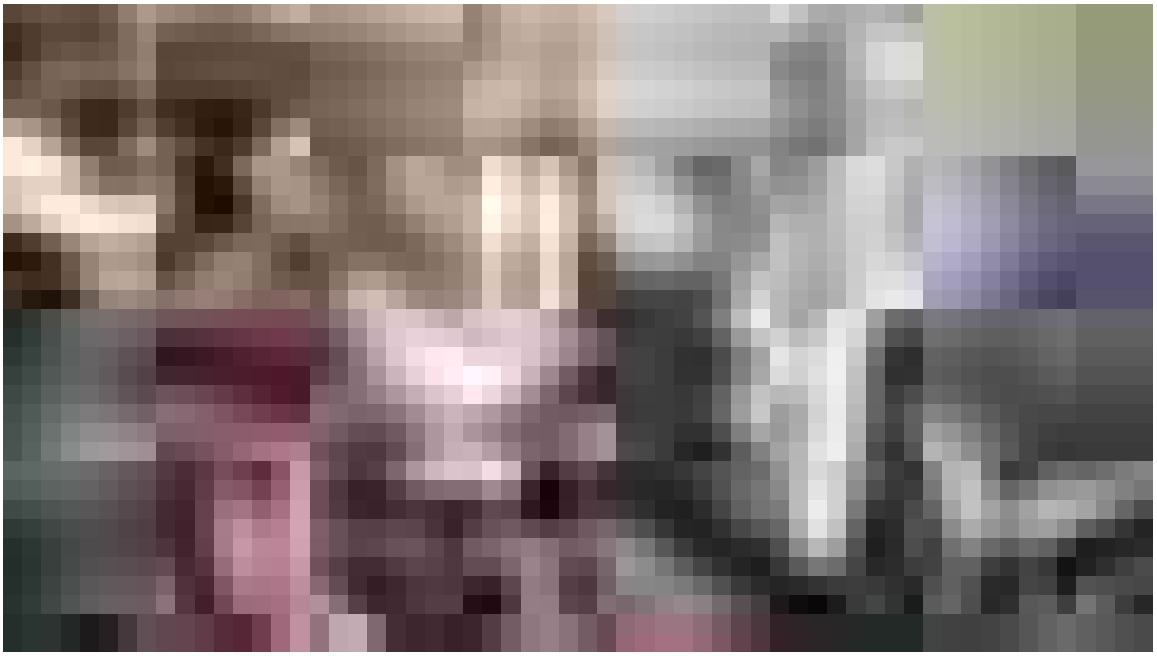

DOKUMENTASI KEGIATAN KAMPUNG RESIK LAN AMAN

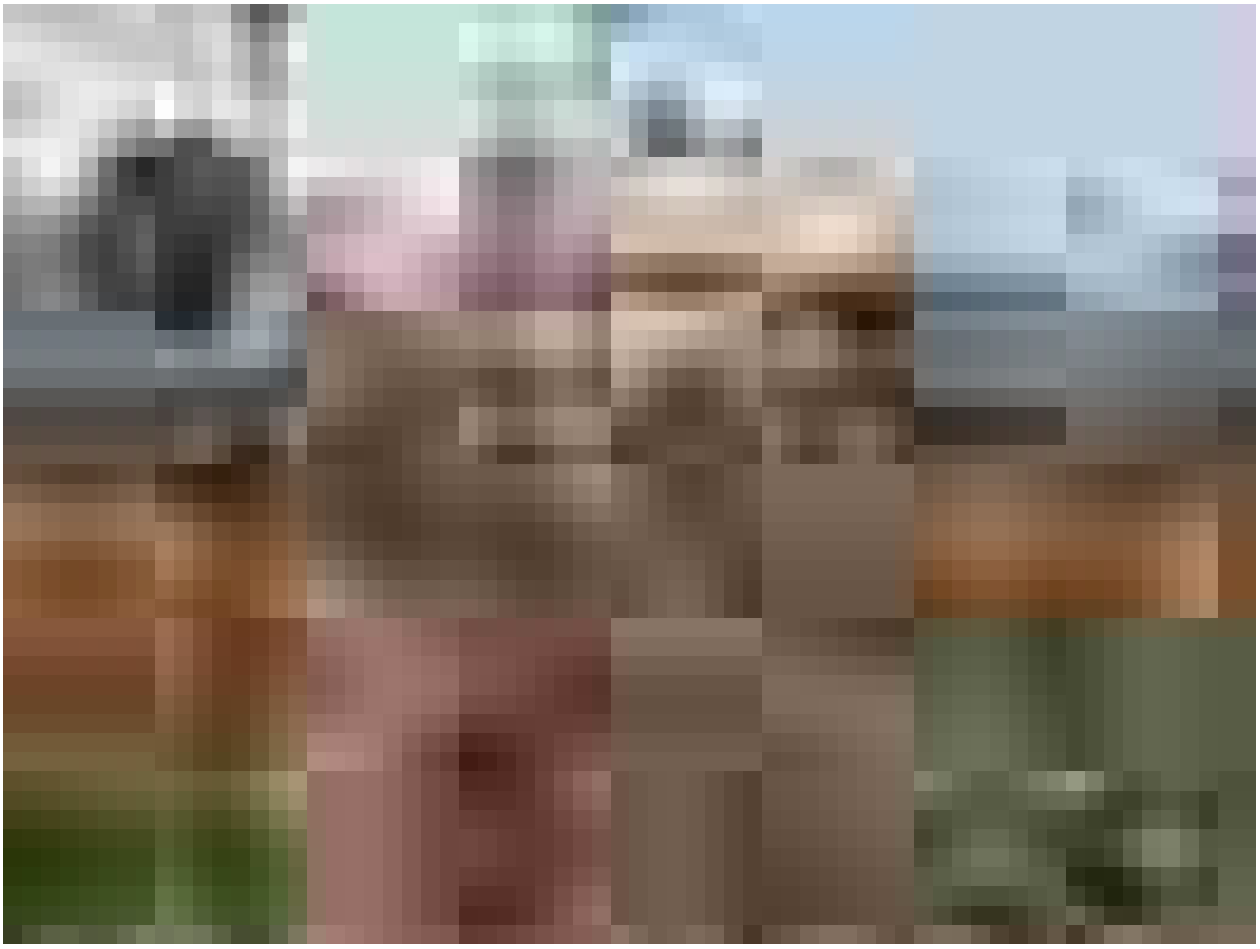

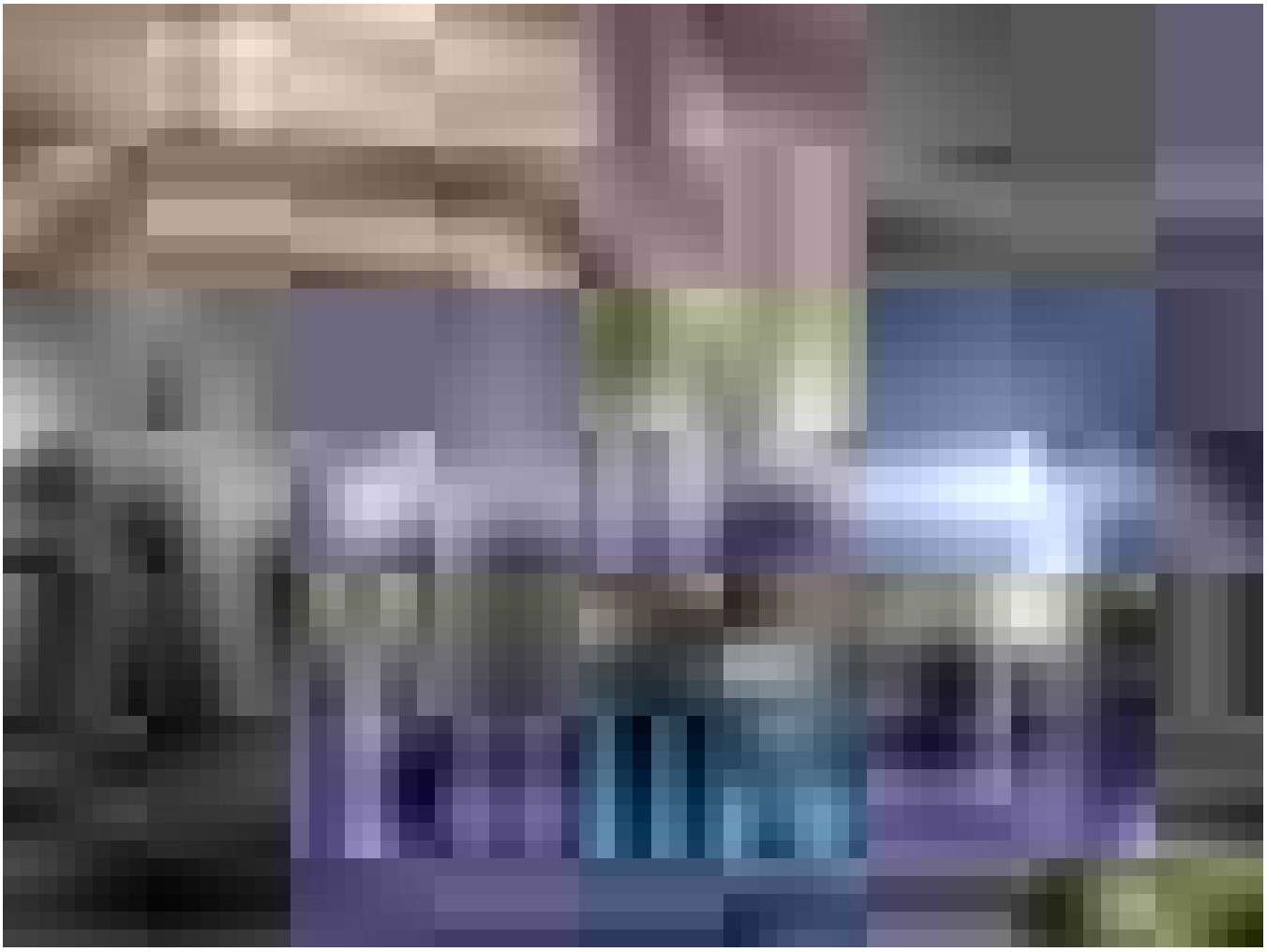

DOKUMENTASI KEGIATAN P2WKSS

BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

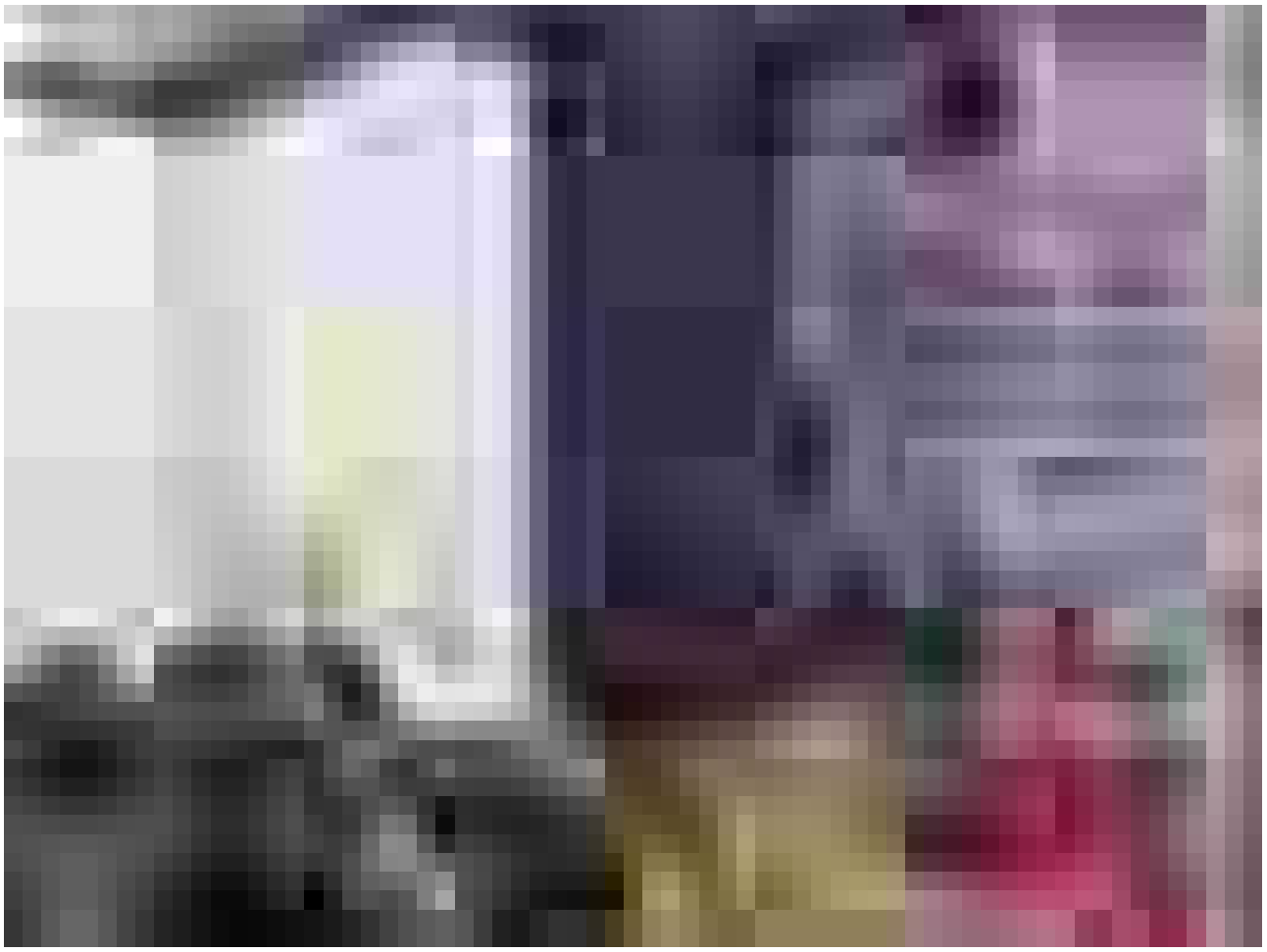

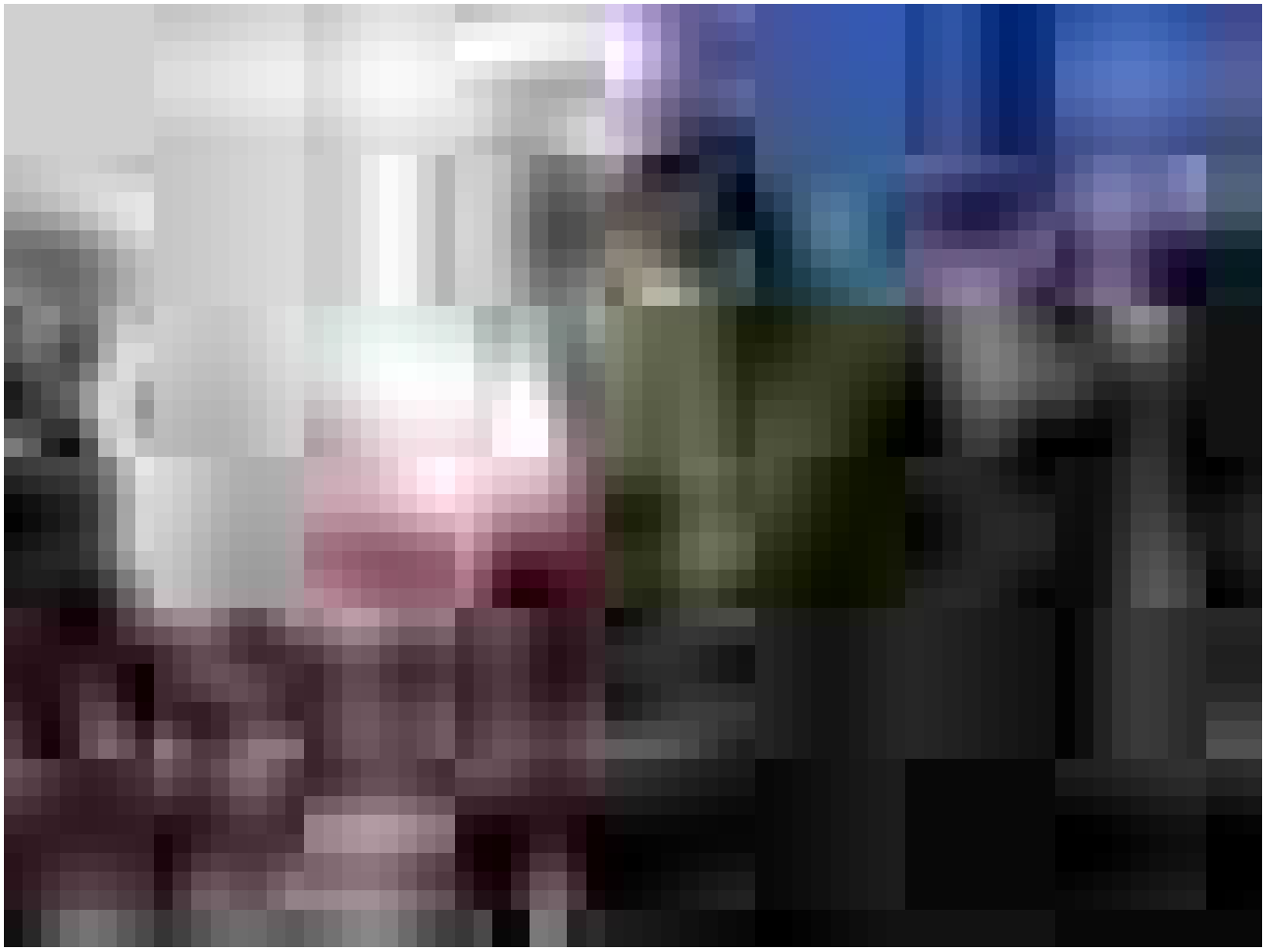

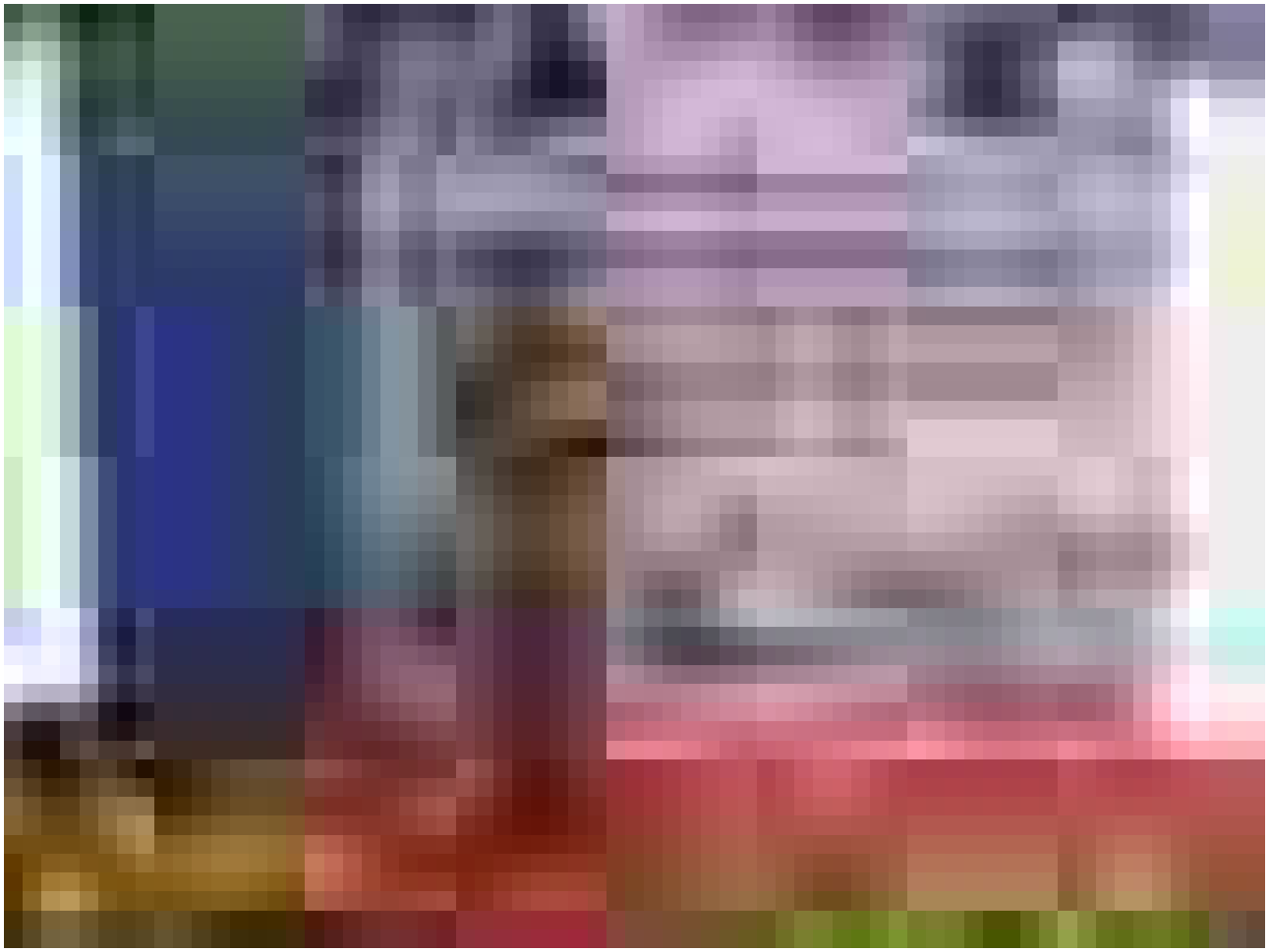

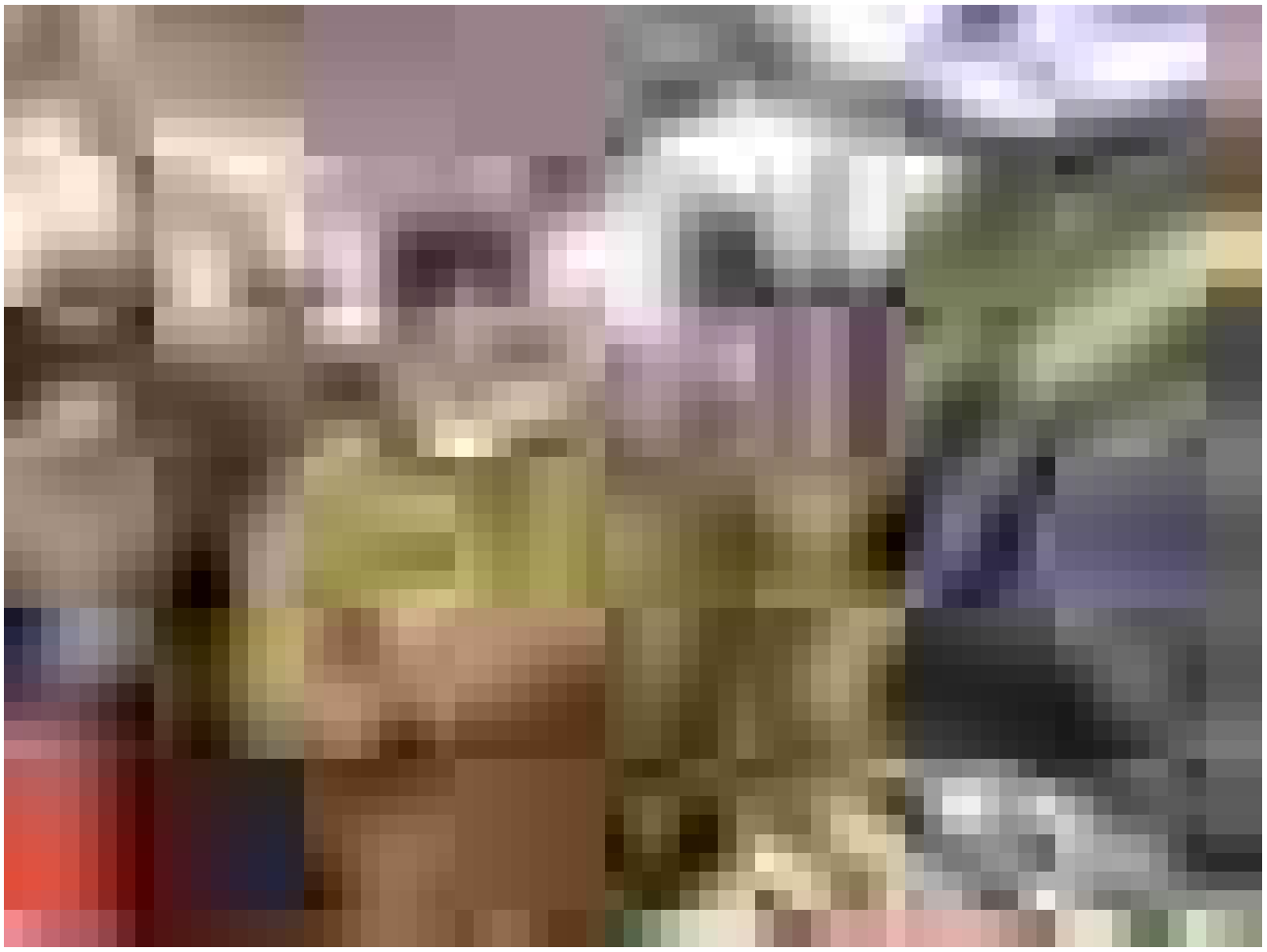

DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN KB
SERENTAK SEJUTA AKSEPTOR
BIDANG KELUARGA BERENCANA (KB)

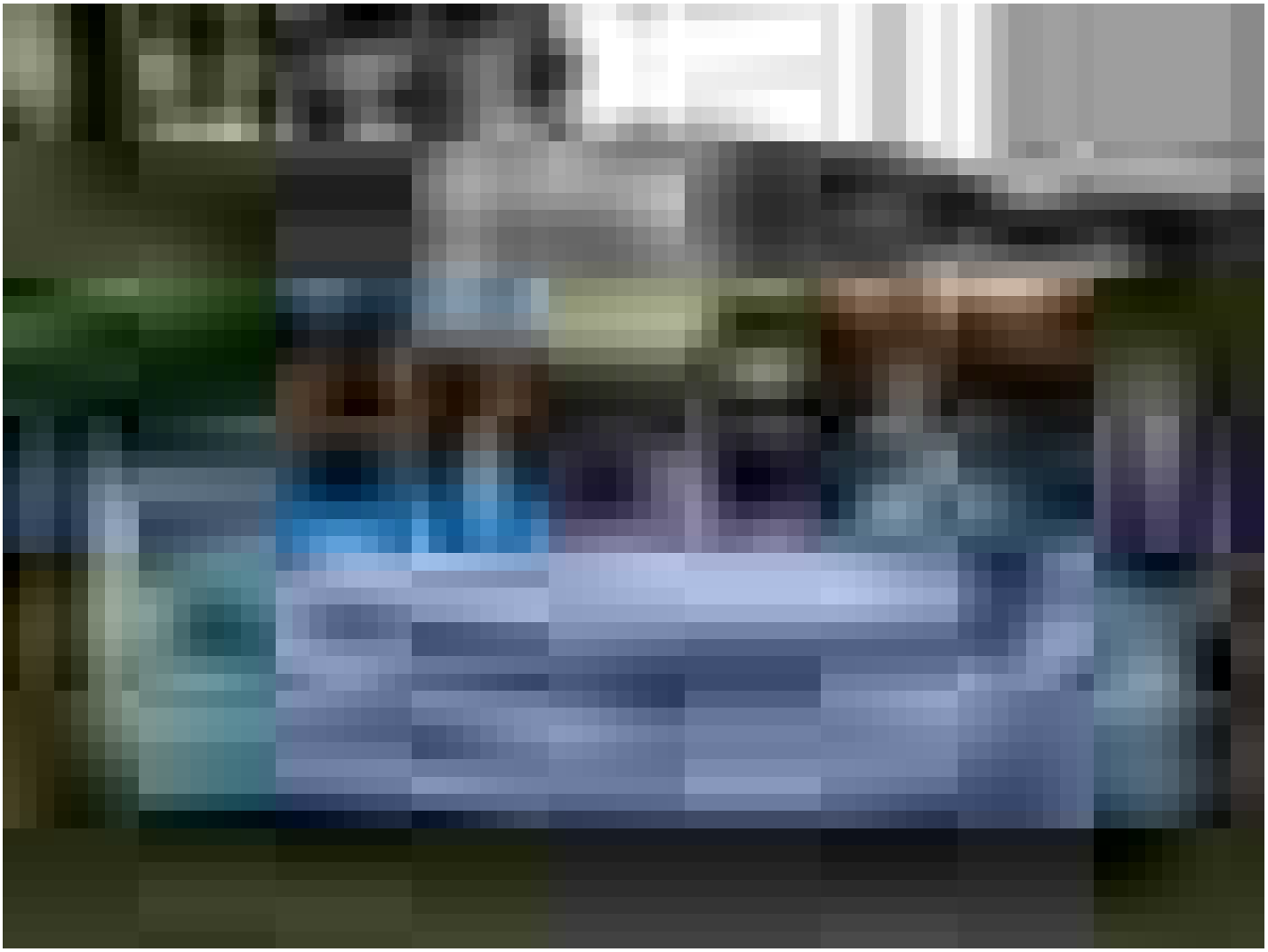

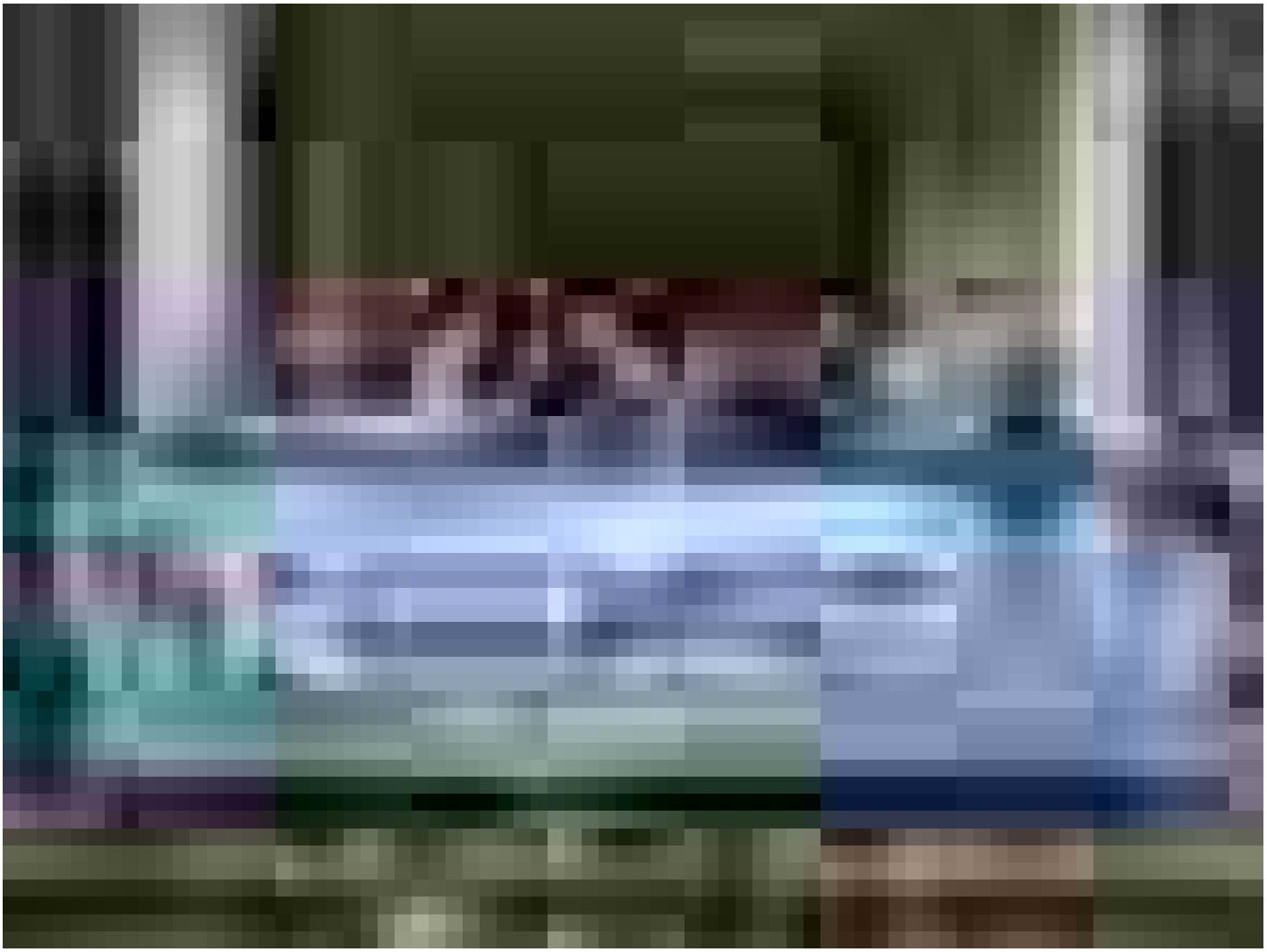

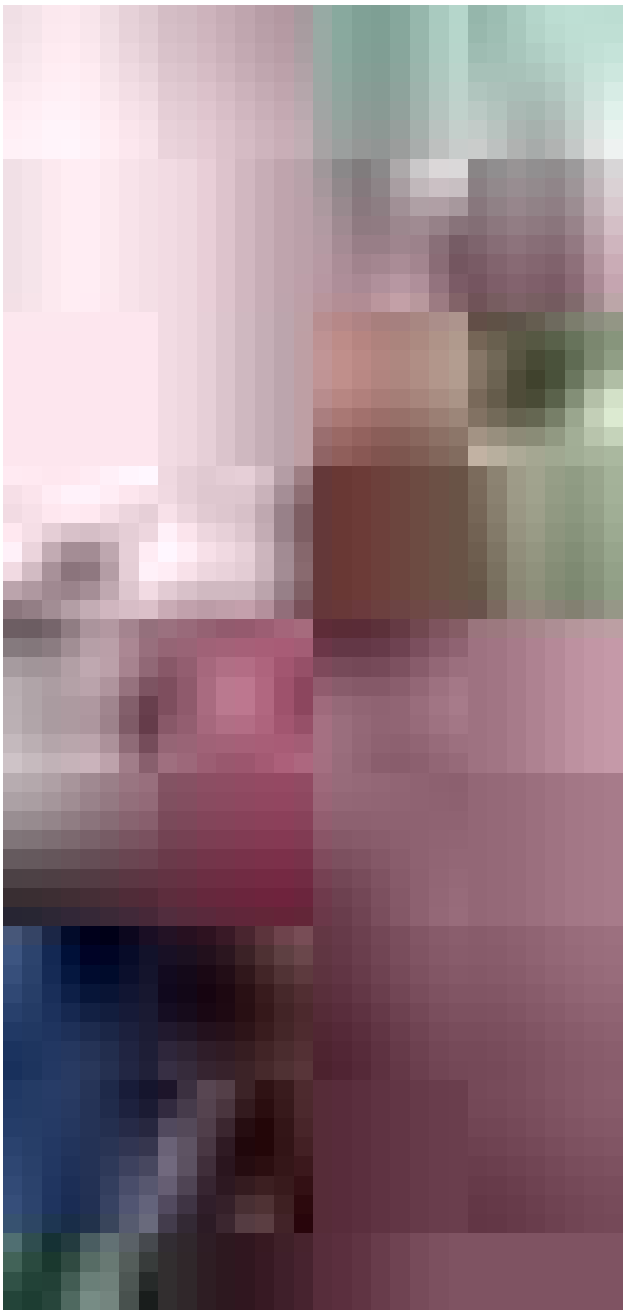

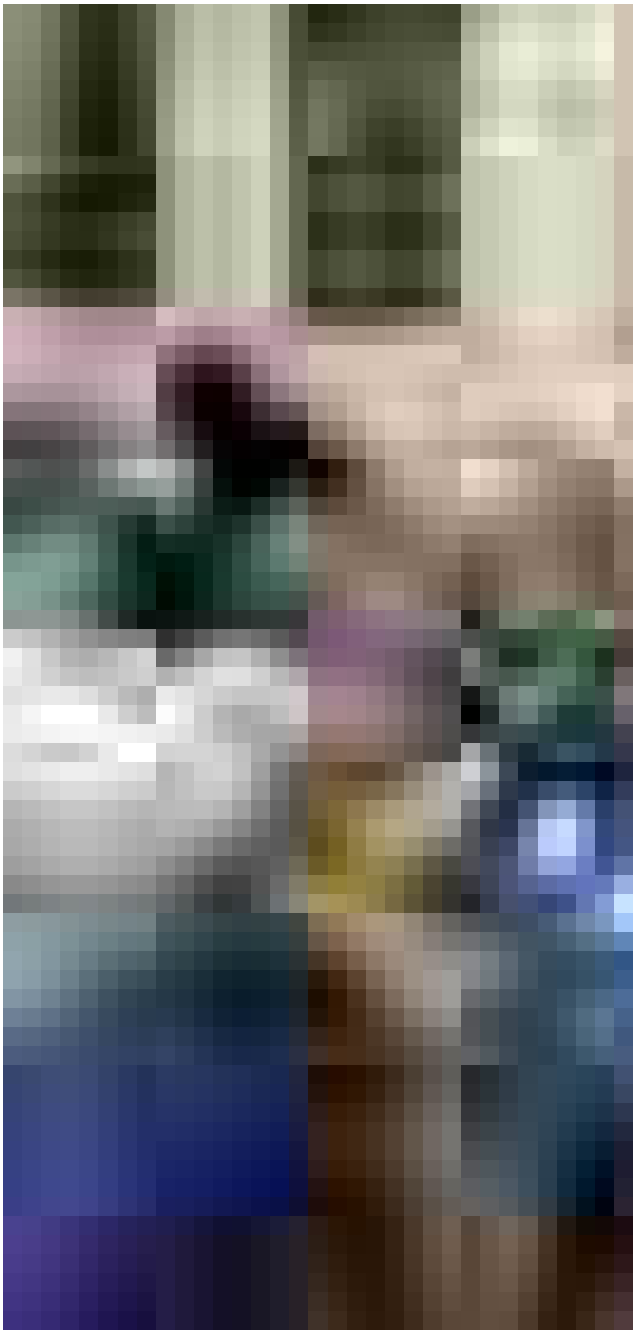

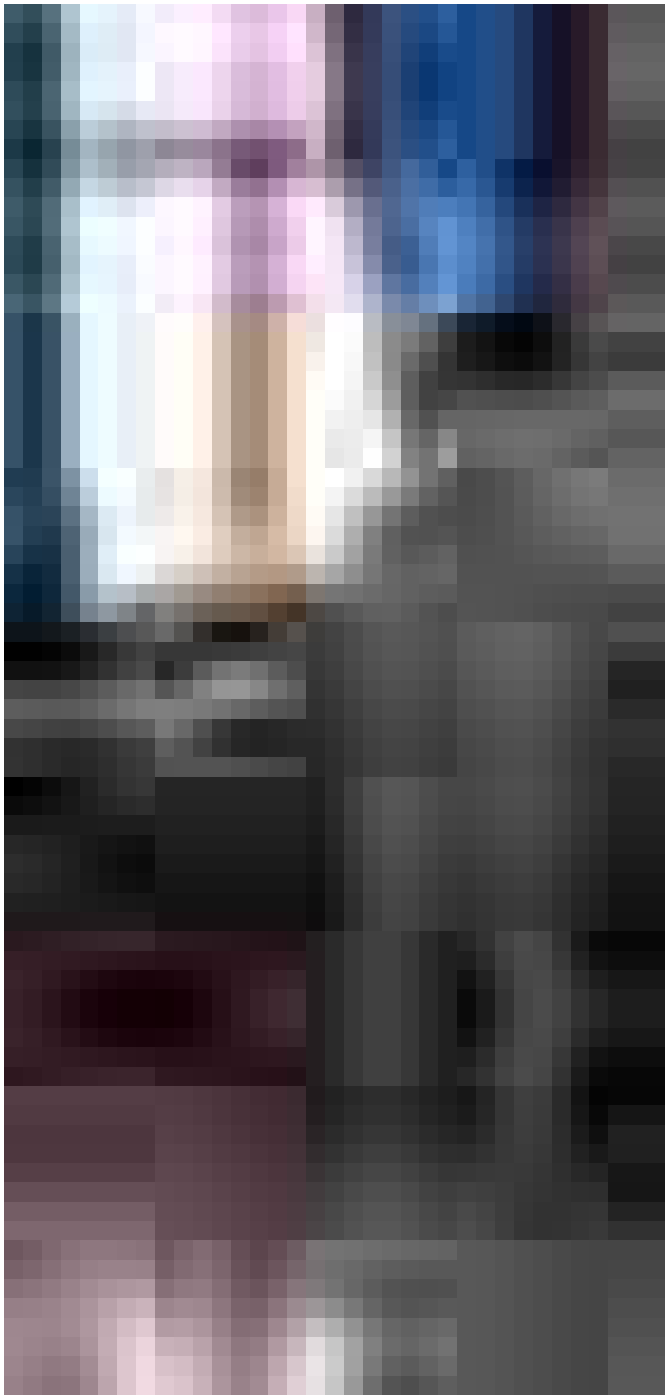

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBAGIAN HONOR PADA KADER PADA KEGIATAN INSTITUT MASYARAKAT PEDESAAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI

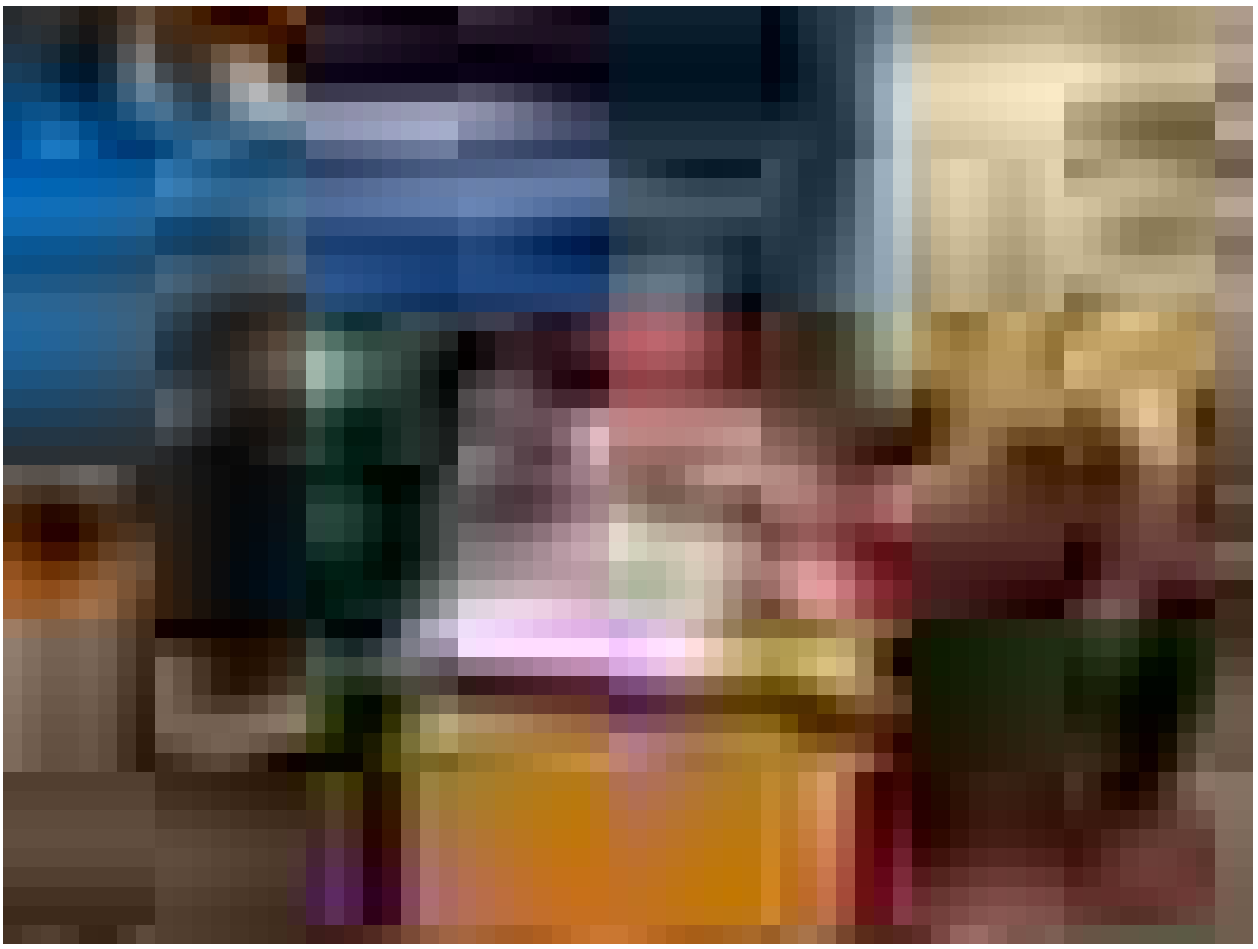

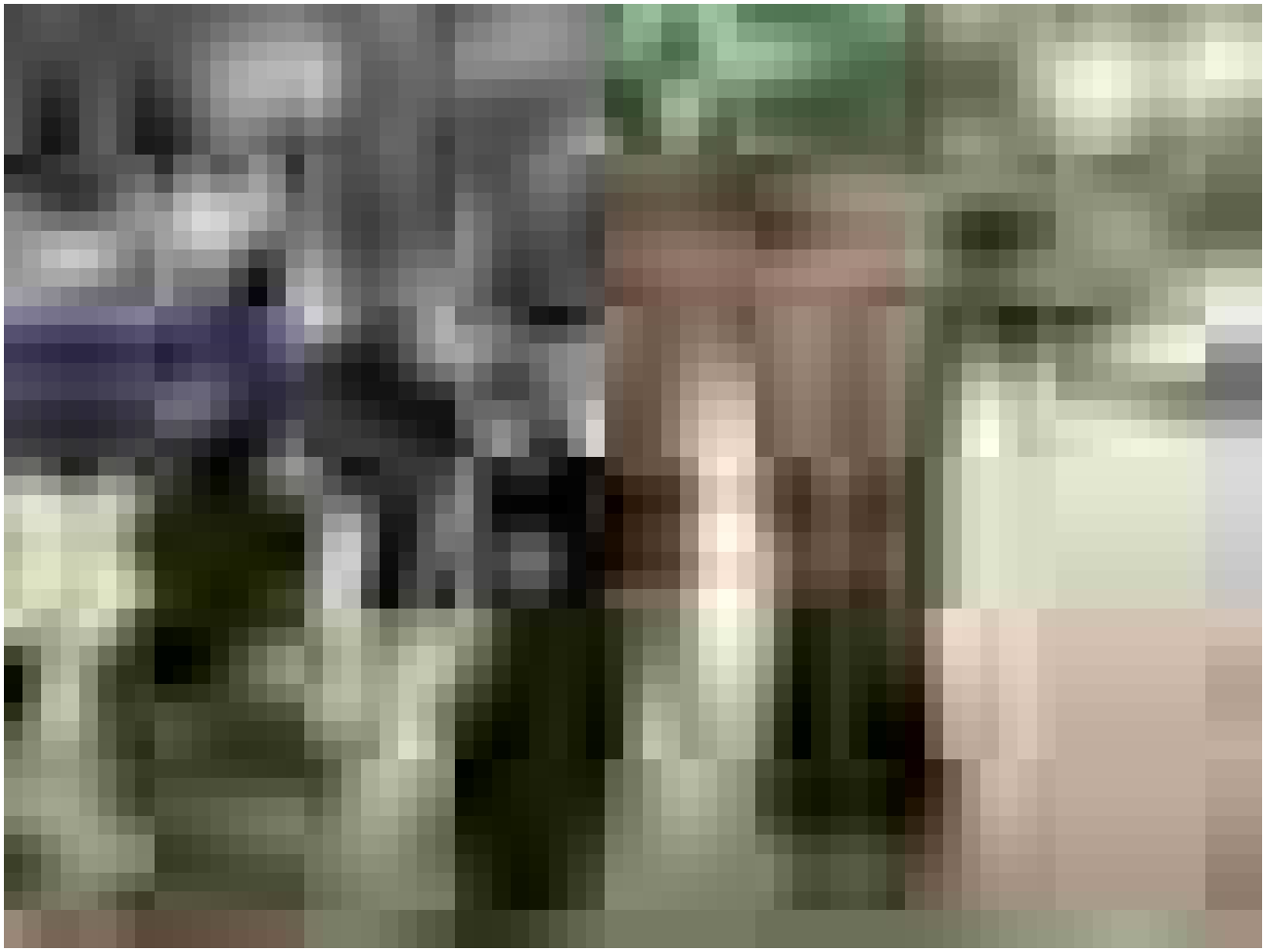

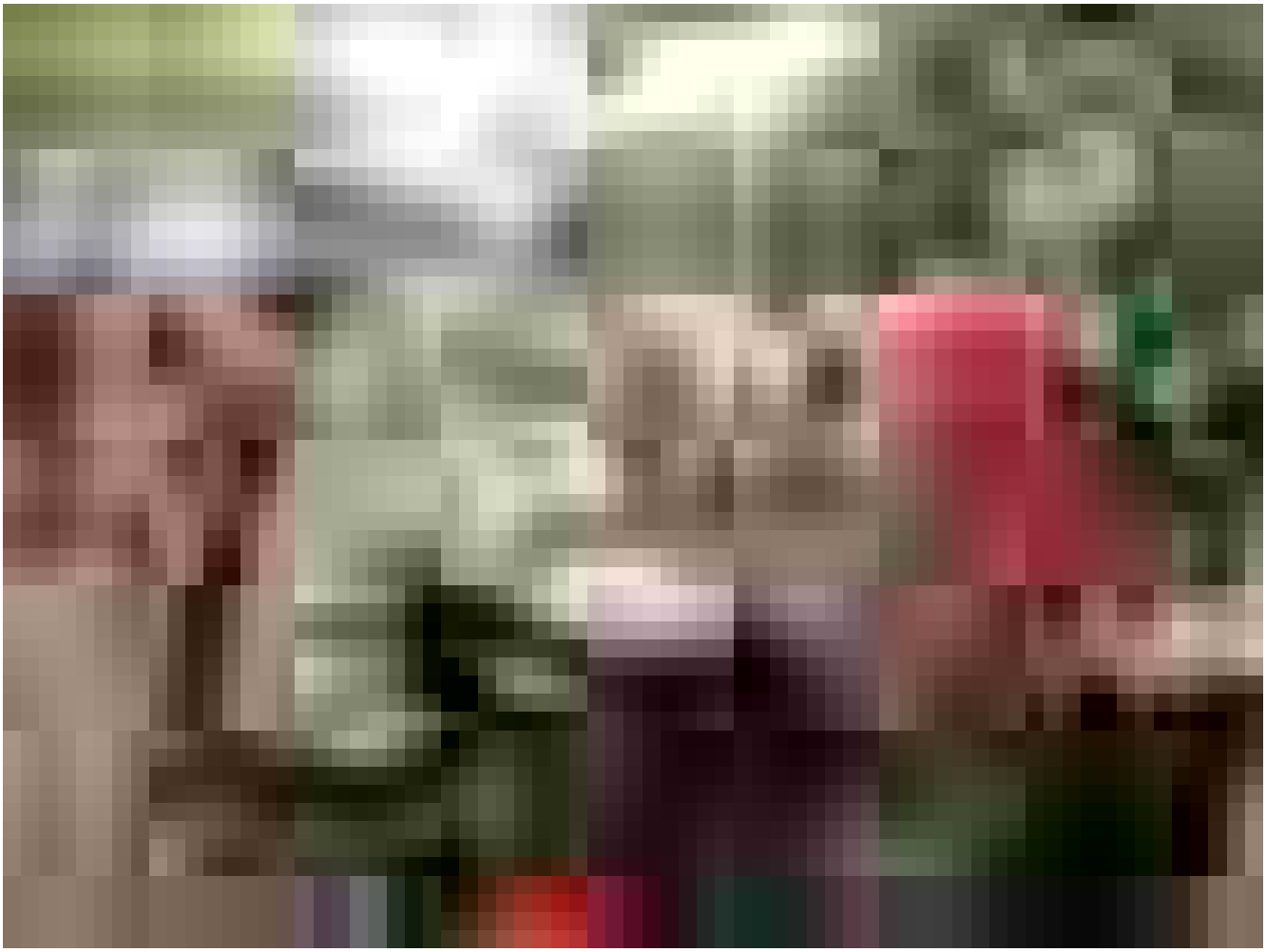

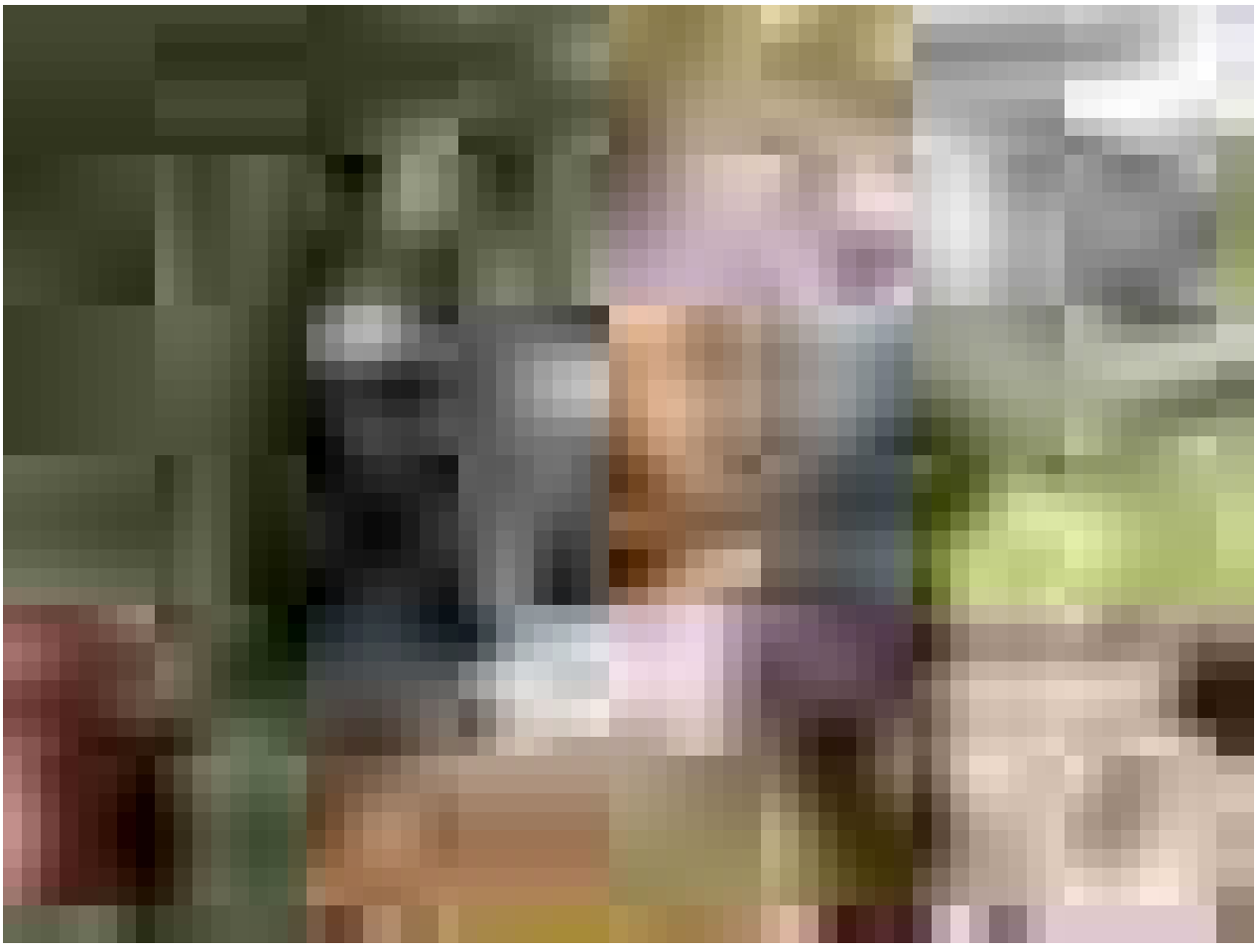

DOKUMENTASI KEGIATAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI

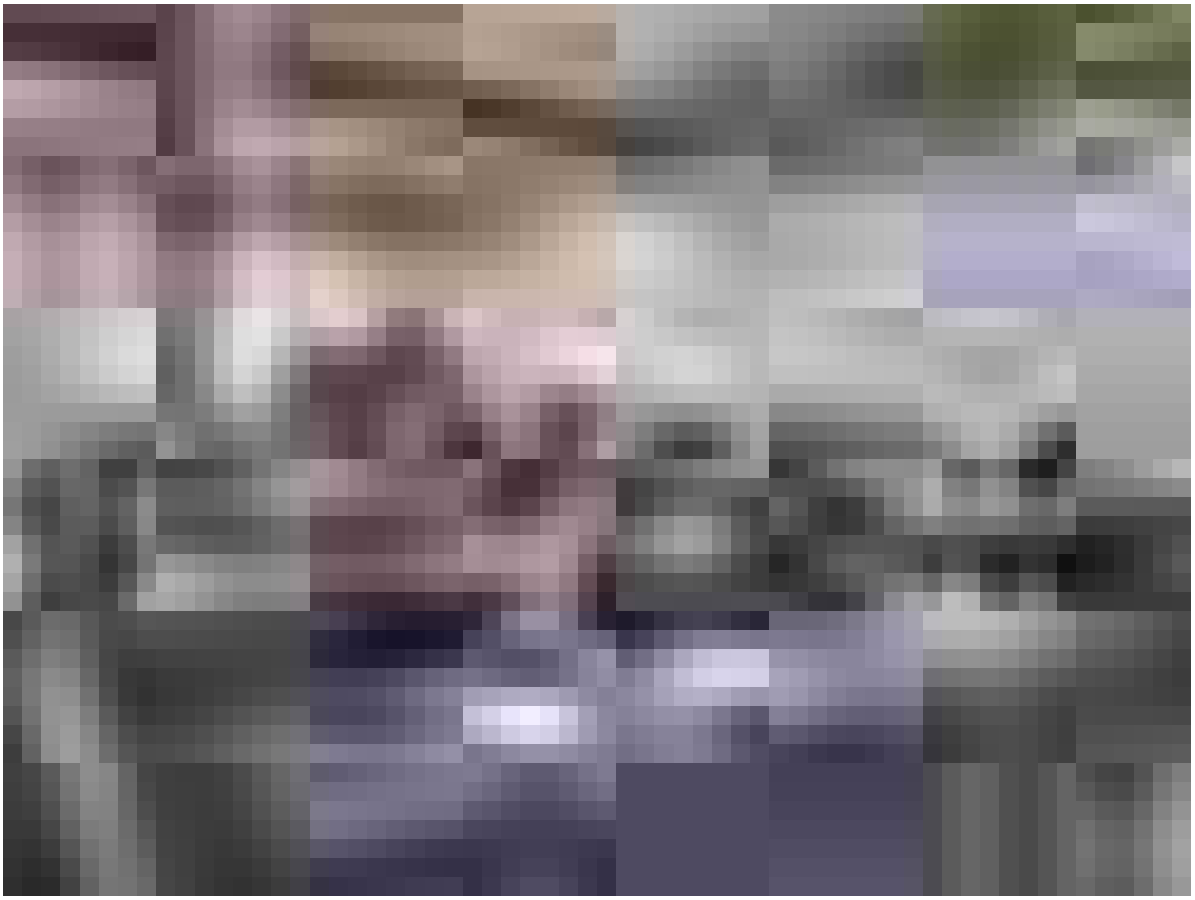

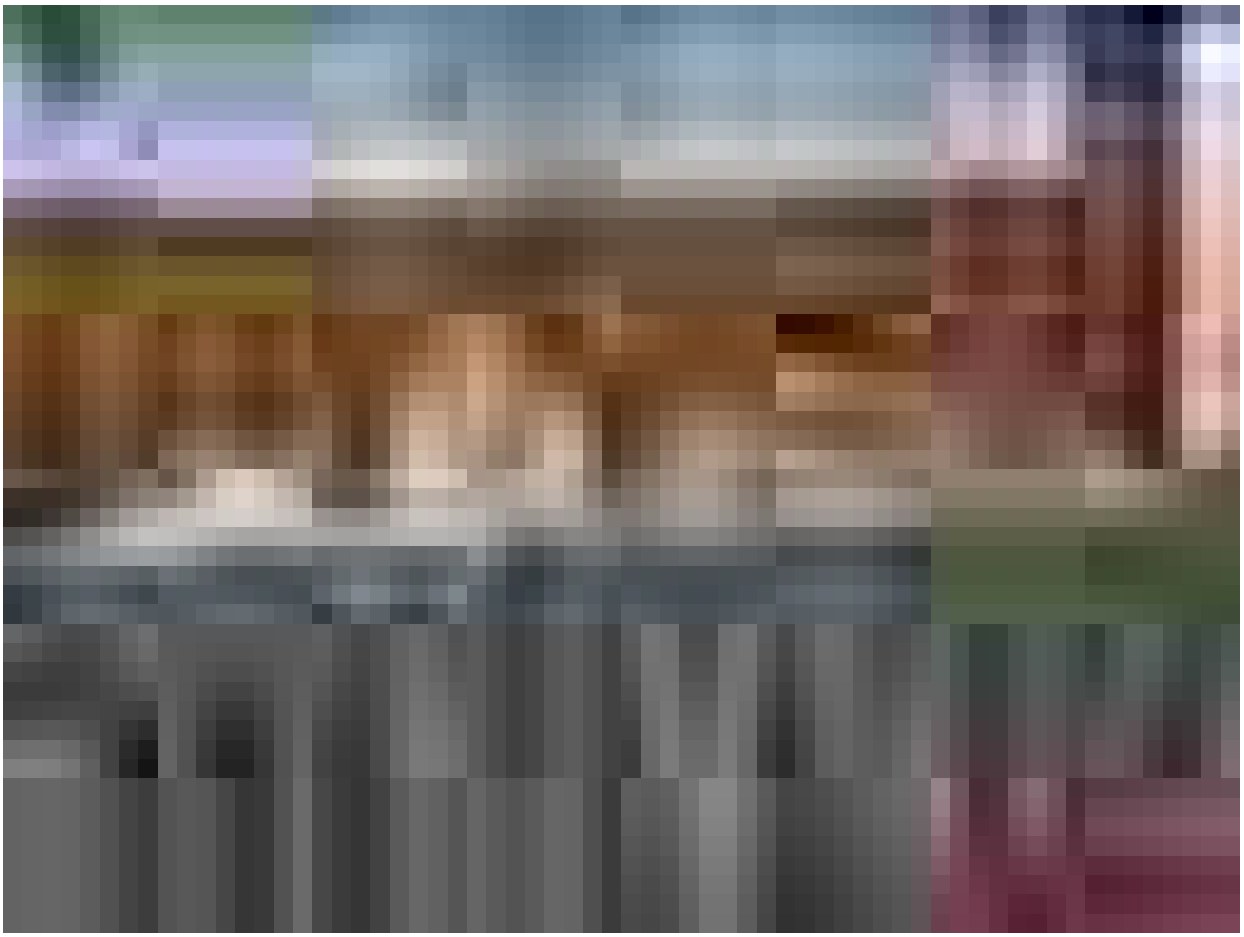

PEMERINTAH KOTA SERANG

I N S P E K T O R A T

Jl. Jendral Sudirman No. 5 Serang – Banten Telp. (0254) 207538 Fax. (0254) 207538

Serang, Februari 2022

Nomor : /INSP.LHE-700/II/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Evaluasi atas Laporan Hasil Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang
di -
SERANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP yang kami lakukan merupakan evaluasi SAKIP pada kategori Evaluasi Sederhana (*desk evaluation*), yaitu evaluasi yang dilakukan tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan Laporan Kinerja). Evaluasi ini meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja, misalnya : keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan.
2. Evaluasi SAKIP yang kami lakukan, merupakan evaluasi atas SAKIP tingkat unit kerja/ setingkat eselon II pada Perangkat Daerah Kota Serang, yang secara umum bertujuan, untuk :
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b. Menilai tingkat implementasi SAKIP pada perangkat daerah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP pada organisasi perangkat daerah;
   d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
3. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
   Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perangkat daerah tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokum en Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen terkait lainnya.
4. Hasil evaluasi yang dituangkan, dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang memperoleh nilai sebesar **64,89 (B = Baik).**

5. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Penilaian atas perencanaan kinerja dengan nilai 21 ,36 meliputi : Perencanaan Strategis 7,61 dan Perencanaan Kinerja Tahunan 13,75. Nilai tersebut merupakan nilai perencanaan kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 yang secara umum cukup baik, namun masih terdapat kelemahan, yaitu :

1) Dokumen Renstra yang terdiri dari 4 (empat) tujuan telah dilengkapi dengan indikator tujuan, namun untuk tujuan meningkatnya pemberdayaan perempuan dan masyarakat dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tidak dilengkapi dengan target keberhasilannya;
2) Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) belum dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Kota/OPD atau media la in yang memudahkan publik untuk mengakses;
3) Target – target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan belum menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran hanya berkisar pada realisasi penyerapan anggaran, belum kepada pembahasan realisasi kinerja dari target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan secara periodik (bulanan/ triwulanan/ semesteran);
4) Rencana aksi atas kinerja tahun 2021 telah dibuat pada dokumen Laporan Kinerja, namun hanya berupa jadwal pelaksanaan program, kegia tan dan sub kegiatan per bulan selama 1 (satu) tahun anggaran, tanpa dilengkapi dengan target keberhasilan dari target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan secara periodik (bulanan/ triwulanan/ semesteran);
5) Hasil monitoring belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, karena hasil monitoring baru sebatas notulensi rapat, namun tidak ditindaklanjuti dengan instruksi kepada pengampu program/kegiatan/sub kegiatan yang realisasinya kurang dari target agar secepatnya melakukan akselerasi untuk mencapai target kinerja sesuai rencana aksinya;

b. Pengukuran Kinerja

Penilaian atas Pengukuran kinerja dengan nilai 13,75 meliputi : Pemenuhan Pengukuran 3,44, Kualitas Pengukuran 7,19 dan Implementasi Pengukuran 3,13. Nilai pengukuran kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021 secara umum cukup baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1) Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Kota/perangkat daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses;
2) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan karena realisasi kinerja belum sepenuhnya didukung dengan validitas dan data pendukung yang memadai;
3) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi telah dilakukan secara berkala (triwulanan) untuk target kinerja sas aran, sedangkan untuk target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan tidak secara berkala namun langsung secara tahunan;

4) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja belum dapat diidentifikasikan secara lebih tepat dan cepat

5) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dimanfaatkan seluruhnya untuk dijadikan alat ukur pencapaian target jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen penganggaran atau perjanjian kinerja, serta tercapainya outcome program yang telah ditetapkan;

6) Hasil pengukuran capaian kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment berupa pemilihan bidang berkinerja terbaik namun belum diformalkan penetapannya;

7) Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, hal tersebut terjadi karena hasil pengukuran kinerja tidak dapat dibandingkan dengan rencana aksinya. karena rencana aksi dokumen perencanaan kin erja hanya berupa jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan per bulan selama 1 (satu) tahun anggaran, tanpa dilengkapi target keberhasilan dari target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan secara periodik (bulanan/ triwulanan/ semesteran).

c. Pelaporan Kinerja

Penilaian atas Pelaporan Kinerja dengan nilai 9,86 meliputi : Pemenuhan Pelaporan 2,25, Penyajian Informasi Kinerja 4,91 dan Pemanfaatan Informasi Kinerja 2,70, Nilai pelaporan kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjI P) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021, secara umum cukup baik namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1) Dokumen LKjiP belum dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Kota/OPD atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses;

2) Laporan Kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, namun hanya sebatas memaparkan jumlah personil PNS dan Non PNS, seharusnya informasi tentang analisis efisiensi peng gunaan sumber daya memuat sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (dana dan barang) dan diuraikan dengan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja pada kondisi ideal dibandingkan dengan sumber daya yang ada;

3) Informasi kinerja dalam laporan kinerja belum dapat diandalkan karena hasil kinerja yang disampaikan pada laporan kinerja belum didukung oleh data yang valid, sumber data yang jelas, dan dapat diverifikasi sesuai dengan rumusan perhitungannya;

4) Informasi kinerja belum sepenu hnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

Penilaian atas Evaluasi Kinerja dengan nilai 6,08 meliputi : Pemenuhan Evaluasi 1,59, Kualitas Evaluasi 2,99 dan Pemanfaatan E valuasi 1,50. Nilai evaluasi kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021, secara umum cukup baik namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1) Dalam laporan kinerja belum ditemukan adanya pengungkapan mengenai adanya evaluasi terhadap rencana aksi yang hasilnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2) Hasil evaluasi atas rencana aksi juga belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah - langkah yang nyata.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian atas Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi dengan nilai 13,84, meliputi : Kinerja yang dilaporkan (Output) 4,00 dan Kinerja yang dila porkan (Outcome) 9,84. Nilai pencapaian sasaran/kinerja organisasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021, secara umum cukup baik namun masih ter dapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target kinerja yaitu persentase kelompok masyarakat yang berprestasi sedangkan 6 (enam) indikator kinerja sasaran lainnya telah tercapai/melebihi target dan pengungkapan pengukuran kinerja belum dapat diandalkan karena mekanisme pengukuran kinerja tidak dituangkan secara komprehensif dalam laporan kinerja..

6. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak d an Keluarga Berencana Kota Serang, beserta seluruh jajarannya agar melakukan langkah - langkah perbaikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang agar :

1) Menentukan target keber hasilan pada indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada dokumen Rencana Strategis (Renstra);
2) Mempublikasikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Perjajnian Kinerja (PK) melalui website resmi Pemerintah Kota/perangkat daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses;
3) Target – target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran;
4) Menyempurnakan dokumen rencana aksi kinerja pada dokumen laporan kinerja dengan melengkapi target keberhasilan dari target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan secara periodik (bulanan/ triwulanan/ semesteran);
5) Memanfaarkan hasil monitoring dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dengan melakukan tindaklanjut berupa instruksi kepada pengampu kegiatan yang realisasinya kurang dari target agar secepatnya melakukan akselerasi kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai rencana aksinya.

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Per lindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang agar :

1) Mempublikasikan dokumen Indikator Kerja Utama (IKU) melalui website resmi Pemerintah Kota/perangkat daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses;
2) Dalam proses pengumpulan data kine rja terkait realisasi kinerja agar didukung dengan validitas data dan data pendukung yang memadai;

3) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi untuk lebih disempurnakan dengan dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semesteran) atas target keberhasilan dari target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan;
4) Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasikan secara lebih tepat dan akurat;
5) Seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan untuk dijadikan alat ukur pencapaian target jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen penganggaran atau perjanjian kinerja, serta tercapainya outcome program yang telah ditetapkan;
6) Pemberian reward dan punishment yang telah dilakukan berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dikembangkan lebih spesifik dan diformalkan dalam bentuk penetapannya;
7) Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang agar :

1) Mempublikasikan dokumen LKjiP melalui website resmi Pemerintah Kota/perangkat daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses;
2) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada laporan kinerja disempurnakan tidak hanya memaparkan jumlah personil PNS dan Non PNS, namun memuat informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (dana d an barang) dengan menguraikan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target kinerja pada kondisi ideal dibandingkan dengan sumber daya yang ada;
3) Menyempurnakan informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan didukung oleh data yang valid, sum ber datanya jelas, dan dapat diverifikasi sesuai dengan rumusan perhitungannya;
4) Informasi kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Per lindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang agar :

1) Dalam laporan kinerja diungkapkan mengenai adanya evaluasi terhadap rencana aksi yang hasilnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak -pihak yang berkepentingan;
2) Hasil evaluasi atas rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata dan diungkapkan dalam laporan kinerja.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target kinerja yaitu persentase kelompok masyarakat yang berprestasi dan melaku kan rencana tindak lanjutnya agar pada masa yang akan datang indikator sasaran tersebut dapat tercapai dan melakukan penyempurnaan terhadap pengukuran capaian seluruh indikator kinerja yang sebelumnya telah ditetapkan, sehingga capaian seluruh target indikator kinerja dapat diungkap dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai capaian kinerja perangkatdaerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun 2021, untuk bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

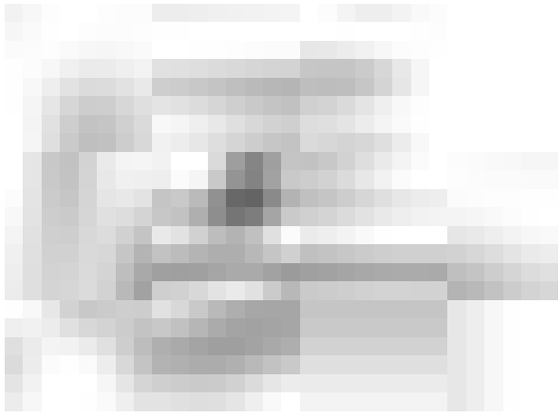

Tembusan :

1. Yth. Walikota Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang (sebagai laporan).

POHON KINERJA

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

Indikator : Indeks Evaluasi RB (Pemenuhan, Reform, Pengungkit)

MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

Indikator : Capaian Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

MENINGKATNYA PENGELOLAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstradan Renja Perangkat Daerah, IKU, PK dan Profil OPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen RKA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah dokumen DPA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Peyusunan Perubahan DPA-SKPD

Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah evaluasi renja (LPPD OPD, LAKIP OPD)

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah

Persentase ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan PNS

Terlaksananya Koordinasi dan enyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

Peningkatan Kualitas Penatausahaan BMD

Ketersediaan dokumen aset barang milik daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah dokumen aset barang milik daerah

Pengadaan BMD yang Berkualitas

Persentase tingkat ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor

Peningkatan Kualitas Pemeliharaan BMD

Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barag Milik Daerah

Jumlah bulan jasa pemeliharaan barang milik daerah

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor

Jumlah bulan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor

Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian

Persentase tingkat ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah sarana dan prasarana pegawai

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum

Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum PD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah bulan penyediaan aat tulis kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah bulan kebutuhan peralatan rumah tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bulanpenyediaan makanan dan minuman rapat dan harian pegawai

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan

Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah

Peningkatan Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat dan jumlah materai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan tagihan kebutuhan telepon, internet dan listrik

Penyediaa jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah bulan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor

TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG BERKUALITAS

Indikator : Indeks KLA dan APE

PELAYANAN YANG TERINTEGRASI PADA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Indikator : Rasio KDRT

Persentase Perlindungan Anak

PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase Pelayanan perlindungan anak

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak

Penurunan kekerasan terhadap anak

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Jumlah pembentukan PUSPA di Kota Serang

Jumlahevaluasi PATBM di Kota Serang

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Capaian perlindungan terhadap anak

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Jumlah peserta pelatihan Perlindungan Anak Kebutuhan Khusus / LKSA

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi

Capaian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Jumlah pengaduan perlindungan khusus anak

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Jumlah pendampingan kasus anak yang tertangani

PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Persentase penanganan Kekerasan Perempuan

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Capaian pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Jumlah Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Perempuan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan PUSPAGA dan P2TP2A

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi

Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan

Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan

Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan

Jumlah kegiatan pendampingan layanan perlindungan perempuan

PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Persentase pemenuhan hak anak

Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha

Persentase PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha

Terlaksananya Advokasi Kebijkan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

Jumlah forum anak tingkat Kota Serang dan Kelurahan yang dibentuk

Jumlah anak pada Peringtan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Serang

Pemilihan Duta Anak Kota Serang

Jumlah anak pada Kongres Anak Nasional

Pembinaan Forum Anak Kota Serang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah kegiatan Rapat koordinasi Persiapan Kota Layak Anak

Jumlah kegiatan Rapat persiapan verifikasi Kota Layak Anak

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indikator : Indeks IPG dan IDG

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Indikator : Persentasi keluarga berdaya

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak

Persentase keluarga yang dibina

Pelaksanaan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga

Jumlah keluarga yang mengikuti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Jumlah keluarga yang mengikuti sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Indikator : Persentase pembinaan pemberdayaan perempuan

Peningkatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah

Persentase pokja PUG dan Vokal Point Gender

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

Jumlah peraturan tentang Pengarusutamaan Gender (Perwal dan SK)

Jumlah koordinasi Gender analysls Pathway (GAP) dan Gender Budger Statement (GBS)

Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG

Jumlah laporan data terpilah gender dan anak

Jumlah laporan IPG dan IDG

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah koordinasi dan advokasi kebijakan PUG dan PPRG

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Jumlah peserta sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG bagi OPD se Kota Serang

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Persentase pemberdayaan perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah perempuan/ peserta pembinaan dan pelatihan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan

Jumlah pembinaan Gabungan Organisasi Wanita

Jumlah Pembinaan Dharma Wanita

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan

Jumlah kegiatan Program Peningkatan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

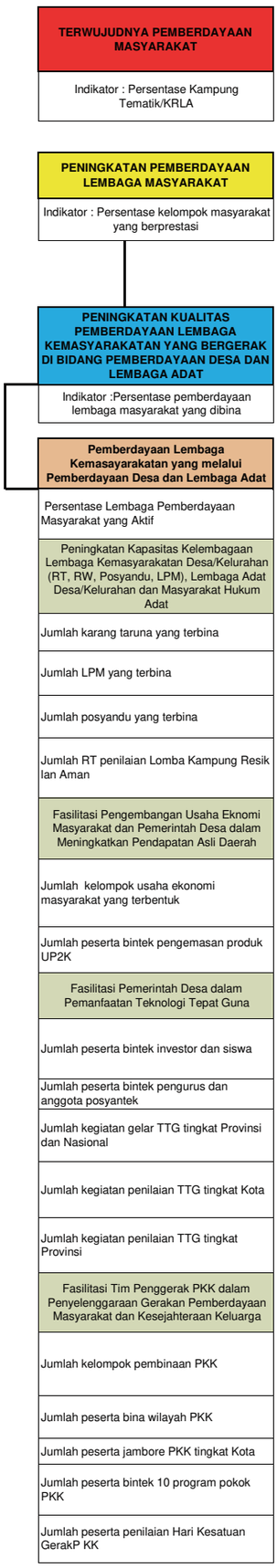
TERWUJUDNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Indikator : Persentase Kampung Tematik/KRLA
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT
Indikator : Persentase kelompok masyarakat yang berprestasi
PENINGKATAN KUALITAS PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
Indikator :Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat yang dibina
Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan yang melalui Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah karang taruna yang terbina
Jumlah LPM yang terbina
Jumlah posyandu yang terbina
Jumlah RT penilaian Lomba Kampung Resik lan Aman
Fasilitasi Pengembangan Usaha Eknomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang terbentuk
Jumlah peserta bintek pengemasan produk UP2K
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Jumlah peserta bintek investor dan siswa
Jumlah peserta bintek pengurus dan anggota posyantek
Jumlah kegiatan gelar TTG tingkat Provinsi dan Nasional
Jumlah kegiatan penilaian TTG tingkat Kota
Jumlah kegiatan penilaian TTG tingkat Provinsi
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah kelompok pembinaan PKK
Jumlah peserta bina wilayah PKK
Jumlah peserta jambore PKK tingkat Kota
Jumlah peserta bintek 10 program pokok PKK
Jumlah peserta penilaian Hari Kesatuan GerakP KK

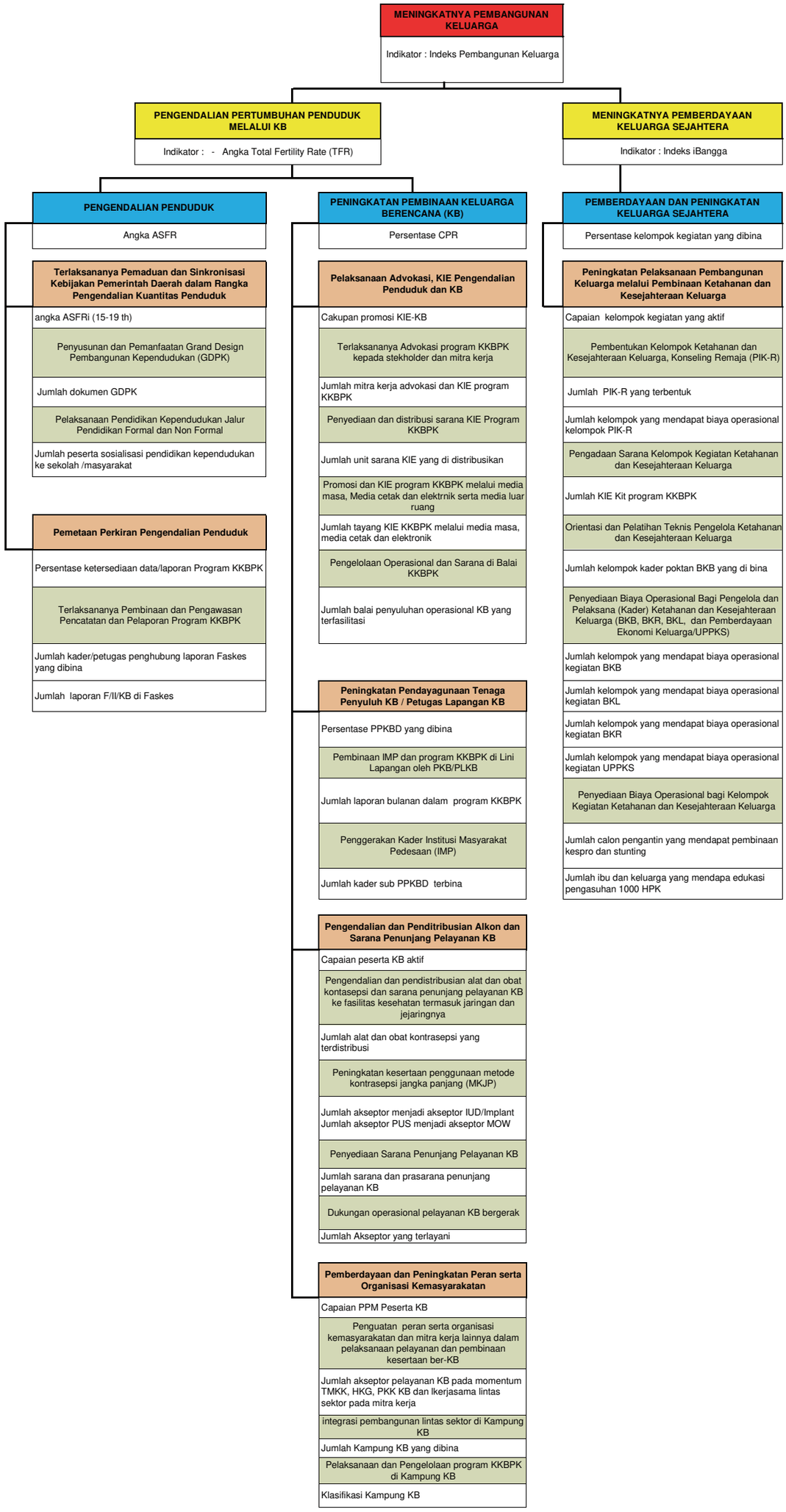
MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KELUARGA
Indikator : Indeks Pembangunan Keluarga
PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK MELALUI KB
Indikator : - Angka Total Fertility Rate (TFR)
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA
Indikator : Indeks iBangga
PENGENDALIAN PENDUDUK
Angka ASFR
Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
angka ASFRi (15-19 th)
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
Jumlah dokumen GDPK
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal
Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan ke sekolah /masyarakat
Pemetaan Perkiran Pengendalian Penduduk
Persentase ketersediaan data/laporan Program KKBPK
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
Jumlah kader/petugas penghubung laporan Faskes yang dibina
Jumlah laporan F/II/KB di Faskes
PENINGKATAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase CPR
Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan promosi KIE-KB
Terlaksananya Advokasi program KKBPK kepada stekholder dan mitra kerja
Jumlah mitra kerja advokasi dan KIE program KKBPK
Penyediaan dan distribusi sarana KIE Program KKBPK
Jumlah unit sarana KIE yang di distribusikan
Promosi dan KIE program KKBPK melalui media masa, Media cetak dan elektrnik serta media luar ruang
Jumlah tayang KIE KKBPK melalui media masa, media cetak dan elektronik
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai KKBPK
Jumlah balai penyuluhan operasional KB yang terfasilitasi
Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB
Persentase PPKBD yang dibina
Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
Jumlah laporan bulanan dalam program KKBPK
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Jumlah kader sub PPKBD terbina
Pengendalian dan Penditribusian Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Capaian peserta KB aktif
Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusi
Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
Jumlah akseptor menjadi akseptor IUD/Implant Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor MOW
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB
Dukungan operasional pelayanan KB bergerak
Jumlah Akseptor yang terlayani
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan
Capaian PPM Peserta KB
Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
Jumlah akseptor pelayanan KB pada momentum TMKK, HKG, PKK KB dan lkerjasama lintas sektor pada mitra kerja
integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB
Jumlah Kampung KB yang dibina
Pelaksanaan dan Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB
Klasifikasi Kampung KB
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
Persentase kelompok kegiatan yang dibina
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Capaian kelompok kegiatan yang aktif
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Konseling Remaja (PIK-R)
Jumlah PIK-R yang terbentuk
Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kelompok PIK-R
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah KIE Kit program KKBPK
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah kelompok kader poktan BKB yang di bina
Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKB
Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKL
Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKR
Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan UPPKS
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah calon pengantin yang mendapat pembinaan kespro dan stunting
Jumlah ibu dan keluarga yang mendapa edukasi pengasuhan 1000 HPK